



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2025

MATRIKS PEMBANGUNAN
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025



- 2 -

MATRIKS PEMBANGUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2025

SASARAN PEMBANGUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2025

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
01 - Pertumbuhan ekonomi	persen	5,03	5,3	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02 - GNI Per Kapita	USD	4.810	5.410	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
03 - Kontribusi PDB Maritim	persen	7,9 (2022)	8,1	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
04 - Kontribusi PDB manufaktur	persen	18,98	20,8	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05 - Tingkat Kemiskinan	persen	8,57	7,0 – 8,0	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
06 - Tingkat Kemiskinan Ekstrem	persen	1,47	0 ^{a)}	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
07 - Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	9,03	4,5 – 5,0	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
08 - Rasio gini		0,381	0,379 - 0,382	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
09 - Kontribusi PDRB KTI	persen	20,9	21,4	132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
10 - Nilai Tukar Petani (Kumulatif)		119,62	115 - 120	018 - Kementerian Pertanian
11 - Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif)		101,88	105 - 108	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
12 - <i>Global Power Index</i>	peringkat	34 (2023)	33	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
13 - Indeks Modal Manusia		0,54 (2023)	0,56	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
14 - Penurunan intensitas emisi GRK	persen	34,09 (2022)	35,53	131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
15 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,54 (2023)	76,49	131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Keterangan: a) Target menggunakan US\$ 1,90 PPP, sedangkan apabila menggunakan US\$ 2,15 PPP target tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2025 adalah 0,5–1 persen.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

PRIORITAS NASIONAL 1: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01 PN: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	01 - Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		79,51 (2023)	81,69–85,23	1.170.120,0	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Hak Asasi Manusia		2,70 (2023)	2,75		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	01 - Menguatnya Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan berbangsa, dan bernegara	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan		77,46 (2023)	84,12–87,76	474.805,5	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Aktualisasi Pancasila		77,73 (2023)	79,37		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
01.01.01 KP: Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara	01 - Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara	01 - Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara		84,87 (2023)	82,33–87,01	131.183,5	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		04 - Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	persen	- (indikator baru)	40		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.01.01.01 PRO-P: Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila							
01.01.01.02 PRO-P: Aktualisasi Pancasila							
01.01.01.03 PRO-P: Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pancasila pada Penyelenggaraan Negara							
01.01.02 KP: Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	01 - Meningkatnya kohesivitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat multikultural yang berwawasan kebangsaan dan nilai- nilai Pancasila	01 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa		78,32 (2023)	80	311.349,9	122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		81,46 (2023)	83		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		03 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia		81,18 (2023)	83		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		04 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan		79,35 (2023)	81		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia		68,33 (2023)	70		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		06 - Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila	persen	- (indikator baru)	70		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.01.02.01 PRO-P: Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Penyelenggara Negara dan Masyarakat							
01.01.02.02 PRO-P: Penguatan Kohesivitas Sosial melalui Pengembangan Ekosistem Teknologi Informasi Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila							
01.01.02.03 PRO-P: Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Kebangsaan pada Generasi Muda							
01.01.03 KP: Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah	01 - Meningkatnya kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga tingkat daerah	01 - Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional		82,88 (2023)	85,34-89,87	32.272,1	064 - Lembaga Ketahanan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.01.03.01	PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan Pengaderan Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah						
01.01.03.02	PRO-P: Penyelenggaraan <i>Training of Trainers</i> Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan						
01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	01 - Terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers dan media massa yang berintegritas	01 - Indeks Kemerdekaan Pers		69,36	70,00	451.506,6	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75,65	76,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik		69,80 (2023)	71		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.01 KP: Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	01 - Terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku		3,15	3,18	208.216,7	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers	persen	65,8	66,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat	persen	65,69	66,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik	persen	63,74	64,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		05 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers	persen	70,12	70,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		06 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan	persen	69,08	69,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		07 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers	orang	2.015	690		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers							
01.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers							
01.02.01.03 PRO-P: Penyehatan Media Arus Utama							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.02.02 KP: Penguatan Sistem Komunikasi dan Keseimbangan Masyarakat atas Informasi Publik	01 - Terbangunnya sistem komunikasi dan jaminan keseimbangan hak masyarakat atas informasi publik	01 - Jumlah kebijakan yang mendukung implementasi SKPN	dokumen	11	1	243.289,8	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital	orang	118.284	40.100		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Persentase akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat	persen	77,48	77,73		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik	persen	75,68	77,73		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik	persen	76,25	76,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik	persen	79,92	80,17		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik	persen	76,33	76,58		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.02.01 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional							
01.02.02.02 PRO-P: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik							
01.02.02.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital							
01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		76,46 (2023)	79,46–82,90	8.405,2	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
01.03.01 KP: Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	01 - Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang semakin meningkat sebagai pilar demokrasi	01 - Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi		53,92 (2023)	55,59–58,84	8.405,2	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



- 11 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.03.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif							
01.03.01.02 PRO-P: Penguatan Lembaga dan Proses Demokrasi di Daerah							
01.03.02 KP: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya kinerja penyelenggara pemilu yang semakin meningkat dalam mendukung demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial	01 - Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel ^{a)}	persen	- (indikator baru)	0	0,0	115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
01.03.02.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu							
01.03.02.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pengawas Pemilu							
01.04 PP: Penguatan Keseimbangan Masyarakat Sipil	01 - Terwujudnya partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan		83,74 (2023)	81,55–85,08	158.000,0	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.04.01 KP: Penyediaan Dana Abadi dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial	01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik	daerah	- (indikator baru)	12	3.500,0	010 - Kementerian Dalam Negeri
01.04.01.01 PRO-P: Penyusunan Regulasi Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan							
01.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil							
01.04.02 KP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik	01 - Terwujudnya penguatan jaminan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik untuk menjalankan peran pemberdayaan dan kontrol sosial	01 - Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih	orang	- (indikator baru)	55.300	154.500,0	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 - Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	orang	900	16.590	115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum	
01.04.02.01 PRO-P: Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik							



- 13 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.04.02.02 PRO-P: Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu							
01.05 PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	01 - Terwujudnya regulasi dan kelembagaan berperspektif HAM serta perlindungan HAM terutama tapi tidak terbatas pada kelompok rentan	01 - Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik		2,60 (2023)	2,65	77.402,7	136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
		02 - Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		2,80 (2023)	2,85		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.05.01 KP: Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif, dan Berperspektif Gender	01 - Terwujudnya kebijakan dan kelembagaan yang berperspektif hak asasi manusia, humanis, inklusif, dan gender	01 - Persentase K/L/D dan masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM	persen	- (indikator baru)	50,05	26.704,5	136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
		02 - Jumlah kebijakan diskriminatif yang ditindaklanjuti	kebijakan	10	10		074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
01.05.01.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, Humanis, Inklusif, dan Gender							
01.05.01.02 PRO-P: Pendidikan HAM bagi Aktor Negara dan Nonnegara							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.05.02 KP: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi	01 - Terwujudnya Perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan	01 - Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	37,6 (2023)	39,6	50.698,1	074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
		03 - Persentase capaian aksi RANHAM	persen	81,7	75		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.05.02.01 PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik Diskriminasi							
01.05.02.02 PRO-P: Penguatan Mekanisme Penanganan Pengaduan HAM pada K/L/D							

Keterangan: a) Penghitungan indikator hanya dilakukan pada tahun tahapan pemilu.

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.



- 15 -

PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02 PN: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01 - Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	01 - Asia Power Index (<i>Diplomatic Influence</i>)		65,6	65,7	193.737.059,8	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Asia Power Index (<i>Military Capability</i>)		15,7	16		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		03 - Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	persen	62,8 (2020)	67,5		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		04 - <i>Global Cybersecurity Index</i>		100	100		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		05 - Indeks Keamanan Laut Nasional		59	60		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	persen	71,2	73,2		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
		02 - Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan		0,67	2,20		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	03 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Energi		6,64	6,77		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Air Nasional		3,48 (2022)	3,50		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	05 - Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	01 - Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI)	peringkat	3 (2023)	3		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02 - Indonesia Blue Economy Index (IBEI)		34,25 (2023)	38,76		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		03 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	peringkat	45 (2023)	43		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	06 - Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	01 - Indeks Ekonomi Hijau		60,37 (2023)	68,34		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		73,53	76,49		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,35 (2020)	0,44		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	01 - Terwujudnya pondasi kemampuan pertahanan berdaya gentar kawasan	01 - Persentase pemenuhan pembangunan kekuatan pokok TNI	persen	30,3	30,3	44.738.971,2	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.01 KP: Melanjutkan Program Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Menjaga Kedaulatan NKRI	01 - Terwujudnya kelanjutan program penguatan postur pertahanan dengan konsep <i>optimum essential force</i> dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI	01 - Persentase pemenuhan alutsista	persen	30,3	30,3	41.706.192,8	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.01.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista Strategis Luar Negeri							
02.01.01.02 PRO-P: Pengadaan Alutsista Integratif							
02.01.01.03 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Darat							
02.01.01.04 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Laut							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.01.01.05 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Udara							
02.01.01.06 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan							
02.01.02 KP: Meningkatkan Kekuatan TNI di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terwujudnya peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar	01 - Persentase penurunan pelanggaran terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa	persen	51,3	40	0,0	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.02.01 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan Perbatasan							
02.01.02.02 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pendukung Pertahanan di Perbatasan							
02.01.03 KP: Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi dan Memperkuat Kapabilitas Badan Pertahanan Siber	01 - Terwujudnya penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber	01 - Persentase pemenuhan peralatan siber	persen	67,5	67,5	10.010,1	012 - Kementerian Pertahanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.01.03.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista Siber							
02.01.03.02 PRO-P: Pendidikan dan Latihan							
02.01.04 KP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit	01 - Persentase pemenuhan sarpras rumah dinas	persen	69,42	69,42	1.208.133,9	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.04.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Prajurit							
02.01.04.02 PRO-P: Pendidikan Tinggi Pertahanan							
02.01.05 KP: Meningkatkan Kesiapan Alpalhankam melalui Pemeliharaan dan Perawatan	01 - Terwujudnya peningkatan kesiapan alpalhankam melalui pemeliharaan dan perawatan	01 - Persentase pemenuhan harwat alutsista	persen	49,7	49,7	1.814.634,4	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.05.01 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Darat							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.01.05.02 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Laut							
02.01.05.03 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Udara							
02.02 PP: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Terwujudnya industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing	01 - <i>Ranking</i> industri pertahanan (SIPRI top 100)	peringkat	>100	<100	9.308.631,2	012 - Kementerian Pertahanan
02.02.01 KP: Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri	01 - Terwujudnya percepatan peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi TNI/Polri	01 - Persentase peningkatan kemampuan industri pertahanan	persen	60	68	19.890,0	012 - Kementerian Pertahanan
02.02.01.01 PRO-P: Litbang Alpalhankam							
02.02.01.02 PRO-P: First Article							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.02.02 KP: Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri	01 - Terwujudnya peningkatan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri	01 - Persentase pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan	persen	100	100	9.288.741,2	012 - Kementerian Pertahanan
02.02.02.01 PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Pertahanan Negara							
02.02.02.02 PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Keamanan Negara							
02.02.03 KP: Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema <i>Spend to Invest</i>	01 - Terwujudnya transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema <i>spend to invest</i>	01 - Persentase perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri	persen	100	100	0,0	012 - Kementerian Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam <i>Spend to Invest</i> Matra Darat							
02.02.03.02 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam <i>Spend to Invest</i> Matra Laut							
02.02.03.03 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam <i>Spend to Invest</i> Matra Udara							
02.03 PP: Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	01 - Terwujudnya penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung	01 - Persentase sumber daya nasional yang dimanfaatkan menjadi kekuatan pertahanan	persen	100	100	112.488,0	012 - Kementerian Pertahanan
02.03.01 KP: Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Memperkuat Komponen Cadangan	01 - Terwujudnya penguatan konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat komponen cadangan	01 - Persentase kader bela negara yang telah terbentuk	persen	- (indikator baru)	10	108.312,4	012 - Kementerian Pertahanan
		02 - Persentase kelulusan komponen cadangan dengan nilai baik	persen	100	100		012 - Kementerian Pertahanan



- 24 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.03.01.01 PRO-P: Bela Negara							
02.03.01.02 PRO-P: Pembangunan Komcad							
02.03.02 KP: Pembinaan Komponen Pendukung untuk Penguatan Pertahanan Negara	01 - Terwujudnya pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan negara	01 - Persentase penataan dan pembinaan komponen pendukung	persen	- (indikator baru)	100	4.175,6	012 - Kementerian Pertahanan
02.03.02.01 PRO-P: Pembinaan Komduk							
02.03.02.02 PRO-P: Penataan Komduk							
02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya sistem deteksi dini yang mampu mendukung keamanan negara	01 - <i>Fragile State Index</i> 02 - <i>Global Terrorism Index</i>		63,7 3,99	62,8 3,95	268.465,6	050 - Badan Intelijen Negara 113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.04.01 KP: Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, Serta Paham Kebhinekaan di Daerah-daerah yang Rawan Konflik Serta Rentan Isu Separatisme	01 - Terwujudnya sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme	01 - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek wawasan kebangsaan pada wilayah konflik dan rentan	kegiatan	5	5	1.800,0	010 - Kementerian Dalam Negeri
02.04.01.01 PRO-P: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan							
02.04.02 KP: Penguatan Kapabilitas Penyelidikan, Pengamanan dan Penggulangan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya penguatan kapabilitas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan dalam negeri	01 - Cakupan deteksi dini intelijen	persen	100	100	203.728,0	050 - Badan Intelijen Negara
02.04.02.01 PRO-P: Penguatan Operasi Intelijen dan Kontra Intelijen							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.04.02.02 PRO-P: Penguatan SDM Intelijen							
02.04.03 KP: Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme	01 - Meningkatnya sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	01 - Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	persen	97,8	100	28.164,4	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.03.01 PRO-P: Kolaborasi dan Penguatan Instrumen Penanggulangan Terorisme							
02.04.03.02 PRO-P: Penguatan Kesiapsiagaan Nasional							
02.04.04 KP: Penguatan Kontra Radikalisasi	01 - Terwujudnya penguatan kontra radikalisasi	01 - Indeks Risiko Terorisme (Target)		51,87	51,77	20.314,3	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.04.01 PRO-P: Penguatan Intelijen dan Kontra Terorisme							



- 27 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.04.05 KP: Penguatan Deradikalisasi Terorisme	01 - Terwujudnya penguatan deradikalisasi terorisme	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)		30,01	29,91	13.355,1	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.05.01 PRO-P: Deradikalisasi Terorisme							
02.04.06 KP: Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	01 - Terwujudnya penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis	01 - Persentase peningkatan kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis	persen	30	40	1.104,0	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.06.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Terorisme)							
02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terwujudnya interaksi dan transaksi siber, persandian, dan sinyal yang aman	01 - Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber		- (indikator baru)	0,69	559.182,4	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.01 KP: Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi	01 - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana keamanan siber, sandi, dan sinyal nasional	01 - Persentase pemanfaatan inovasi hasil perekayasa di bidang keamanan siber dan sandi	persen	- (indikator baru)	33	523.982,8	051 - Badan Siber dan Sandi Negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.05.01.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.01.02 PRO-P: Sertifikasi Produk Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.02 KP: Pengembangan SDM, Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terpenuhiya SDM keamanan siber dan sandi nasional	01 - Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM siber dan sandi	persen	- (indikator baru)	16	3.895,8	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.02.01 PRO-P: Pelatihan dan Peningkatan Profesionalisme SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.02.02 PRO-P: Peningkatan Budaya Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.03 KP: Penguatan Kelembagaan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terwujudnya kelembagaan keamanan siber dan sandi nasional	01 - Nilai kematangan keamanan siber PSE		2,59	2,77	26.889,5	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
		02 - Nilai kematangan penyelenggara persandian		- (indikator baru)	3		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.03.01 PRO-P: Kebijakan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							



- 29 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.05.03.02 PRO-P: Kerjasama Antar Lembaga Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.03.03 PRO-P: Peningkatan Maturitas Lembaga Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.04 KP: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Strategis	01 - Terwujudnya operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis yang efektif	01 - Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional		- (indikator baru)	0,70	4.414,3	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.04.01 PRO-P: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.04.02 PRO-P: Penanganan Kejahatan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro- Oseanografi	01 - Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia	01 - IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut		67	74,5	1.247.691,0	119 - Badan Keamanan Laut
		02 - IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut		48	58,5		119 - Badan Keamanan Laut
		03 - IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut		67	67,5		119 - Badan Keamanan Laut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut		33	33,2		119 - Badan Keamanan Laut
		05 - Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi		54,22	54,22		012 - Kementerian Pertahanan
02.06.01 KP: Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	01 - Terwujudnya penguatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	01 - Persentase kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut	persen	25	50	405,0	119 - Badan Keamanan Laut
02.06.01.01 PRO-P: Kerja Sama Keamanan Laut							



- 31 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.06.01.02 PRO-P: Kerja Sama Patroli Internasional							
02.06.02 KP: Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut	01 - IKLN Dimensi Kapasitas Patroli		68	68,2	323.960,6	119 - Badan Keamanan Laut
		02 - Persentase pemenuhan postur Bakamla RI	persen	5,19	7		119 - Badan Keamanan Laut
		03 - Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP		80.00	80.00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.02.01 PRO-P: Pengadaan dan Harwat Alpalhankam Keamanan Laut							
02.06.02.02 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut							
02.06.02.03 PRO-P: Penyusunan Kebijakan Keamanan Laut							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.06.03 KP: Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point	01 - Terwujudnya kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut, ALKI, dan <i>choke point</i>	01 - IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan		68	68,1	873.267,2	119 - Badan Keamanan Laut
		02 - Persentase kesesuaian rencana patroli nasional	persen	100	100		119 - Badan Keamanan Laut
		03 - Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		91.00	92.00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.03.01 PRO-P: Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut							
02.06.03.02 PRO-P: Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat							
02.06.04 KP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut	01 - Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut	01 - Persentase pemenuhan sarpras profesionalisme dan kesejahteraan	persen	4,2	4,2	47.537,0	119 - Badan Keamanan Laut
02.06.04.01 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Kesejahteraan Personel							



- 33 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.06.04.02 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Profesionalisme Personel							
02.06.05 KP: Pemetaan Batimetri dan Alur Laut serta Modernisasi Peralatan dan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Hidro-Oseanografi	01 - Terwujudnya pemetaan batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana prasarana penyelenggaraan hidro-oseanografi	01 - Persentase realisasi rencana luas wilayah perairan Indonesia (pedalaman, kepulauan, teritorial, ZEE, dan landas kontinen) yang diperbarui melalui surta hidrografi dan oseanografi	persen	54,22	54,22	2.521,2	012 - Kementerian Pertahanan
		02 - Persentase pemenuhan peralatan dan sarpras penyelenggaraan hidro oseanografi	persen	42,1	42,1		012 - Kementerian Pertahanan
02.06.05.01 PRO-P: Survei dan Pemetaan							
02.06.05.02 PRO-P: Pengadaan Alat dan Sarpras Hidros							
02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali dan kondusif	01 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		3,39	3,80	19.498,6	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.07.01 KP: Melakukan Peningkatan Kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan Pengamanan Objek Vital	01 - Terwujudnya aparat keamanan yang memiliki kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan pengamanan objek vital sesuai dengan standar dan humanis	01 - Indeks Harkamtibmas		67,5	67,6	12.636,8	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.07.01.01 PRO-P: Pengamanan Konflik Sosial yang Profesional dan Humanis							
02.07.01.02 PRO-P: Pengamanan Obyek Vital							
02.07.02 KP: Melakukan Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana	01 - Terwujudnya penyelesaian tindak pidana oleh Polri secara efektif, efisien dan tepat sasaran	01 - <i>Crime Rate</i>	per 100.000 penduduk	43	40	6.861,8	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - <i>Clearance Rate</i> Tindak Pidana	persen	74	75		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.07.02.01 PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Transnasional							
02.07.02.02 PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Konvensional							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator / Pengampu
02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	01 - Terwujudnya profesionalisme pelayanan kepolisian	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian		85,77	86,00	773.876,5	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.01 KP: Melakukan Peningkatan Kesiapan Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	01 - Terpenuhinya kebutuhan almatsus dan sarana prasarana Polri dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga kepolisian	01 - Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i> (MEPE)	persen	- (indikator baru)	80	770.905,4	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.01.01 PRO-P: Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian							
02.08.01.02 PRO-P: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Kepolisian							
02.08.02 KP: Melakukan Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Layanan Kepolisian	01 - Terwujudnya peningkatan layanan kepolisian yang berkualitas dan mudah diakses yang didukung oleh teknologi terbaru	01 - Indeks SPBE		3,00	3,40	1.530,9	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri	persen	85,1	86		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.02.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Kepolisian							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.08.02.02 PRO-P: Digitalisasi Layanan Kepolisian							
02.08.03 KP: Melakukan Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan	01 - Terwujudnya kesetaraan gender di lingkungan Polri melalui penyesuaian rasio jumlah SDM dan pembaharuan <i>work arrangement</i>	01 - Jumlah pusat pendidikan Polwan	unit	1	1	0,0	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Jumlah kapasitas pusat pendidikan Polwan	orang	805	900		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.03.01 PRO-P: Rekrutmen Personil Polri Berbasis Gender							
02.08.03.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Penunjang Karier bagi Polwan							
02.08.04 KP: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Anggota Polri	01 - Terwujudnya SDM Polri yang memiliki standar kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri	01 - Indeks Profesionalitas SDM Polri		- (indikator baru)	70,5	1.440,2	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.04.01 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tematik Personil Polri							
02.08.04.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Personil Polri							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	01 - Terpeliharanya hubungan internasional yang kondusif dengan terselenggaranya diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi	01 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara		- (indikator baru)	0,546	635.094,6	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional		4,97 (2023)	4,10 (Skala 5)		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional		4,07 (2024)	4,10 (Skala 5)		011 - Kementerian Luar Negeri
		04 - Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi		75	76		011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.01 KP: Percepatan Penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Skema <i>Good Neighbour Policy</i>	01 - Terlaksananya percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema <i>good neighbour policy</i>	01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga		52,43	69,75	15.623,8	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara		61,13	63,00		010 - Kementerian Dalam Negeri



- 38 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.09.01.01	PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Maritim Negara						
02.09.01.02	PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Darat Negara						
02.09.02 KP: Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia	01 - Meningkatnya peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional, terbangunnya postur diplomasi, serta meningkatnya pelibatan diaspora Indonesia	01 - Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	persen	75	75	3.557,5	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral	persen	75	75		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Persentase keberhasilan pencalonan Indonesia/wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional	persen	75	75		011 - Kementerian Luar Negeri
		04 - Angka pembangunan postur diplomasi		0	5		011 - Kementerian Luar Negeri



- 39 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	persen	15	20		011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.02.01 PRO-P: Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi/Fora Kerja Sama Internasional, serta Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia							
02.09.02.02 PRO-P: Strategi Pembangunan Postur Diplomasi							
02.09.02.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Partisipasi Diaspora dalam Agenda Pembangunan Nasional melalui Pemberian Insentif							
02.09.03 KP: Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Menguatnya kerja sama pembangunan internasional	01 - Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional	persen	0	20	98.192,5	011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.03.01 PRO-P: Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional							
02.09.03.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional							



- 40 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.09.04 KP: Penguatan Diplomasi Ekonomi	01 - Terwujudnya penguatan diplomasi ekonomi	01 - Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	persen	75	80	44.684,0	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas	persen	75	80		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	PTA/FTA/CEPA	19	23		090 - Kementerian Perdagangan
02.09.04.01 PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang adaptif							
02.09.04.02 PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang strategis dengan mitra utama							
02.09.04.03 PRO-P: Diplomasi Ekonomi dengan negara tetangga, perbatasan, regional, dan sub regional							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.09.05 KP: Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil	01 - Terwujudnya perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang untuk perluasan kesempatan kerja dengan keahlian menengah dan tinggi	01 - Jumlah kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil	kesepakatan	0	7	189.604,9	104 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
02.09.05.01 PRO-P: Mengembangkan dan Memperkuat Proses Migrasi Tenaga Kerja Berbasis Kawasan							
02.09.05.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA) untuk Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja							
02.09.06 KP: Proses Akses Indonesia ke OECD	01 - Terwujudnya akses Indonesia ke OECD	01 - Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen <i>initial memorandum</i> kepada Sekretariat OECD (2024- 2025)	persen	- (indikator baru)	100	283.432,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Persentase dokumen <i>initial memorandum</i> yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028)	persen	- (indikator baru)	0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)	persen	- (indikator baru)	0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.09.06.01 PRO-P: Penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen <i>Initial Memorandum</i> kepada Sekretariat OECD							
02.09.06.02 PRO-P: Penyelesaian proses reviu <i>Initial Memorandum</i> dari Komite OECD							
02.09.06.03 PRO-P: Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD							
02.10 PP: Swasembada Pangan	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis lumbung pangan	01 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	91,4	97,3	99.454.546,6	125 - Badan Pangan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan	01 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi		93,5	94		125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	persen	8,27	7,21		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	03 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan tata kelola sistem pangan	01 - Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	persen	3,4 (2022)	3,5		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)		0,693 (2023)	0,7445		018 - Kementerian Pertanian
02.10.01 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	ton	23.578	196.984	270.343,2	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Kalimantan Tengah	ha	2.042 (2023)	146.806		018 - Kementerian Pertanian
02.10.01.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah							



- 44 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.01.02 PRO-P: <i>On Farm</i> KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah							
02.10.01.03 PRO-P: <i>Off Farm</i> KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah							
02.10.02 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Utara	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen hortikultura di KSPP Sumatera Utara	01 - Peningkatan produksi hortikultura KSPP Sumatera Utara	ton	481	500	0,0	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen hortikultura KSPP Sumatera Utara	ha	16,02	150		018 - Kementerian Pertanian
02.10.02.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara							
02.10.02.02 PRO-P: <i>On Farm</i> KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara							
02.10.02.03 PRO-P: <i>Off Farm</i> KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.03 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Sumatera Selatan	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan	ton	- (indikator baru)	65.724	551.042,8	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Sumatera Selatan	ha	- (indikator baru)	28.568		018 - Kementerian Pertanian
02.10.03.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan							
02.10.03.02 PRO-P: <i>On Farm</i> KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan							
02.10.03.03 PRO-P: <i>Off Farm</i> KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan							
02.10.04 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Nusa Tenggara Timur	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	- (indikator baru)	33.624	1.041,0	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	- (indikator baru)	10.930		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya produksi dan luas panen jagung di KSPP Nusa Tenggara Timur	01 - Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	- (indikator baru)	49.100		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	- (indikator baru)	9.048		018 - Kementerian Pertanian
02.10.04.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur							
02.10.04.02 PRO-P: <i>On Farm</i> KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur							
02.10.04.03 PRO-P: <i>Off Farm</i> KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur							
02.10.05 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen jagung di KSPP Papua	01 - Peningkatan produksi jagung KSPP Papua	ton	- (indikator baru)	1.310	0,0	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Papua	ha	- (indikator baru)	189		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.05.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua							
02.10.05.02 PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua							
02.10.05.03 PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua							
02.10.06 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Papua Selatan	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Papua Selatan	ton	- (indikator baru)	109.308	2.126,0	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Papua Selatan	ha	- (indikator baru)	75.621		018 - Kementerian Pertanian
02.10.06.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan							
02.10.06.02 PRO-P: On Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan							
02.10.06.03 PRO-P: Off Farm KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.07 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	01 - Peningkatan produksi bahan pangan utama	01 - Lahan baku sawah yang dicetak	ribu ha	- (indikator baru)	42	16.422.470,2	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman	ribu ha	- (indikator baru)	6,9		018 - Kementerian Pertanian
02.10.07.01 PRO-P: Peningkatan Luas Lahan Pertanian (Ekstensifikasi)							
02.10.07.02 PRO-P: Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian (Intensifikasi)							
02.10.07.03 PRO-P: Infrastruktur Pendukung KSPP/Lumbung Pangan Lainnya							
02.10.08 KP: Penguatan Cadangan Pangan	01 - Terjaganya cadangan pangan nasional	01 - Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras	juta ton	1,17	3-3,5	11.136,3	125 - Badan Pangan Nasional
02.10.08.01 PRO-P: Pengelolaan Cadangan Pangan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.08.02 PRO-P: Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan							
02.10.09 KP: Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	01 - Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	01 - Volume produksi ikan budi daya	juta ton	6,20 (2023)	6,75	977.942,0	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Volume produksi perikanan tangkap	juta ton	7,75 (2023)	6,19		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.10.09.01 PRO-P: Pengembangan Input Produksi Perikanan Budi Daya							
02.10.09.02 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budi Daya							
02.10.09.03 PRO-P: Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya dan Revitalisasi Tambak Rakyat							
02.10.09.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Mendukung Transformasi Perikanan Budi daya							
02.10.09.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap serta Kampung/Sentra Nelayan							
02.10.09.06 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha KP							



- 50 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.09.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pendampingan/Penyuluhan Masyarakat KP							
02.10.09.08 PRO-P: Peningkatan Perlindungan terhadap Pelaku Usaha KP							
02.10.09.09 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Sistem Rantai Dingin, dan Logistik Perikanan							
02.10.10 KP: Pengembangan Pangan Hewani	01 - Meningkatkan produksi bahan pangan hewani	01 - Produksi daging	juta ton	4,90 (2023)	4,96	384.387,2	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi telur	juta ton	6,89 (2023)	7,43		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi susu	ribu ton	837,22 (2023)	855,57		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatkan keamanan pakan dan mutu pakan	01 - Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	persen	- (indikator baru)	80		127 - Badan Karantina Indonesia
02.10.10.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Input Peternakan							
02.10.10.02 PRO-P: Implementasi Praktik Peternakan Modern							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.10.03 PRO-P: Penguatan Pasca Panen dan Hilirisasi Produk Hasil Ternak							
02.10.10.04 PRO-P: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Pendekatan Satu Kesehatan							
02.10.11 KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	01 - Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	01 - Produksi padi	juta ton	53,14	54,45	7.000.723,5	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi jagung	juta ton	19,99	21,48		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi aneka kacang	ribu ton	516,11	540,28		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produksi buah dan sayur	juta ton	28,82	30,66		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produksi sorghum	ribu ton	17,34	18,21		018 - Kementerian Pertanian
		07 - Produksi ubi jalar	ton	1.430.341	1.517.449		018 - Kementerian Pertanian
		08 - Produksi kedelai	ton	349.099	370.359		018 - Kementerian Pertanian
		09 - Produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	ton	388.049	450.000		143 - Kementerian Kehutanan



- 52 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.11.01 PRO-P: Input dan Pendukung Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati							
02.10.11.02 PRO-P: <i>On Farm</i> Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati							
02.10.11.03 PRO-P: <i>Off Farm</i> Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati							
02.10.11.04 PRO-P: Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat							
02.10.12 KP: Penganekaragaman Konsumsi Pangan	01 - Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia	01 - Konsumsi buah dan sayur	gram/kapita/hari	244,6	245,33	57.490,0	125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Konsumsi pangan hewani	gram/kapita/hari	124,5	129,11		125 - Badan Pangan Nasional
		03 - Konsumsi umbi-umbian	gram/kapita/hari	41,1	53,40		125 - Badan Pangan Nasional
		04 - Konsumsi ikan masyarakat	kg/kap/tahun	25,07 (2023)	26,26		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.10.12.001 PRO-P: Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan							



- 53 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.12.002 PRO-P: Promosi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat							
02.10.13 KP: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya kualitas keamanan pangan	01 - Indeks Keamanan Pangan Segar		60	61	384.015,3	125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	persen	0	70,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	persen	- (indikator baru)	40		127 - Badan Karantina Indonesia
		04 - Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	persen	0	100		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Persentase komoditas produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan	persen	90	90,5		018 - Kementerian Pertanian



- 54 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Terkendalnya penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan	01 - Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	persen	- (indikator baru)	85		127 - Badan Karantina Indonesia
		02 - Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	persen	- (indikator baru)	85		127 - Badan Karantina Indonesia
		03 - Persentase wilayah terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	persen	- (indikator baru)	85		127 - Badan Karantina Indonesia
		04 - Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	persen	80,5	70		018 - Kementerian Pertanian
02.10.13.01 PRO-P: Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan							
02.10.13.02 PRO-P: Pengujian Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan							
02.10.13.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.13.04 PRO-P: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan							
02.10.14 KP: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi	01 - Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	komoditas	3	3	2.341,2	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	persen	0	20		125 - Badan Pangan Nasional
02.10.14.001 PRO-P: Fasilitas Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi							
02.10.14.002 PRO-P: Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi							
02.10.15 KP: Penanganan Kerawanan Pangan	01 - Menurunnya daerah rentan rawan pangan	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	persen	12	16,7	43.884.400,1	125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan	persen	4,5	3,75		125 - Badan Pangan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
Pangan / Food Insecurity Experience Scale (FIES)							
02.10.15.01 PRO-P: Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan							
02.10.15.02 PRO-P: Intervensi Kerawanan Pangan							
02.10.16 KP: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif	01 - Ditumbuhkan dan dikembangkannya kelembagaan ekonomi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam	01 - Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	lembaga	120	125	29.321.643,1	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi	lembaga	15	4		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	02 - Meningkatnya persentase petani muda	01 - Persentase petani muda terhadap jumlah petani	persen	21,93 (2023)	22,03		018 - Kementerian Pertanian
02.10.16.01 PRO-P: Riset dan Inovasi yang Adaptif dan Inklusif							
02.10.16.02 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia							



- 57 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.16.03							
PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan							
02.10.16.04							
PRO-P: Pengembangan Satu Data Pangan							
02.10.16.05							
PRO-P: Implementasi Bantuan Langsung Petani							
02.10.17 KP: Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	01 - Meningkatnya nilai tambah bahan baku industri prioritas	01 - Produksi tanaman obat	ton	526.889 (2023)	529.523,45	160.036,4	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi vanili	ton	1.579 (2023)	1.582		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi lada	ton	64.279 (2023)	64.408		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produksi pala	ton	41.444 (2023)	41.527		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produksi florikultura	ribu tangkai	679.328,585 (2023)	597.622,499		018 - Kementerian Pertanian
		06 - Produksi cengkeh	ton	133.408 (2023)	133.570		018 - Kementerian Pertanian
		07 - Produksi kopi	ton	758.725 (2023)	780.957		018 - Kementerian Pertanian
		08 - Produksi tebu	ton	31.045.342 (2023)	36.813.539		018 - Kementerian Pertanian
		09 - Produksi karet	ton	2.240.826 (2023)	2.496.364		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		10 - Produksi kakao	ton	632.117 (2023)	632.787		018 - Kementerian Pertanian
		11 - Produksi teh	ton	116.506 (2023)	116.555		018 - Kementerian Pertanian
		12 - Pertumbuhan PDB tanaman perkebunan	persen	1,73 (2023)	1,94		018 - Kementerian Pertanian
		13 - Pertumbuhan PDB tanaman hortikultura	persen	- 0,31 (2023)	1,36		018 - Kementerian Pertanian
02.10.17.01 PRO-P: Input dan Pendukung Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah							
02.10.17.02 PRO-P: <i>On Farm</i> Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah							
02.10.17.03 PRO-P: <i>Off Farm</i> Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah							
02.10.18 KP: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	01 - Meningkatnya implementasi praktik budi daya pertanian berkelanjutan	01 - Indeks Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		0	3,0	23.408,4	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	persen	10,46 (2021)	11,0		018 - Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	persen	73,4	75		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya nilai tambah dan ketertelusuran produk budi daya pertanian berkelanjutan	01 - Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	persen	1,45 (2022)	1,47		018 - Kementerian Pertanian
	03 - Terjaganya sumber daya genetik komoditas produksi pertanian	01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	varietas dan/atau galur	28 (2021)	30		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	aksesi	4.675,0 (2021)	4.700		018 - Kementerian Pertanian
02.10.18.01 PRO-P: Peningkatan Implementasi Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan							
02.10.18.02 PRO-P: Pengembangan Nilai Tambah dan Ketertelusuran Produk Pertanian Berkelanjutan							



- 60 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.18.03 PRO-P: Konservasi Komoditas Pertanian dan Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan							
02.11 PP: Swasembada Energi	01 - Meningkatnya ketersediaan energi	01 - Pasokan energi primer	MTOE	273	312	4.767.173,8	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan energi	01 - Konsumsi energi final per kapita	TOE per kapita	0,640	0,750		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	03 - Meningkatnya pemanfaatan energi bersih	01 - Porsi EBT dalam bauran energi primer	persen	13,2 (2023)	20,0		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Intensitas energi primer	SBM/miliar rupiah	149,1	147,7		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.01 KP: Peningkatan Penyediaan Energi	01 - Meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi	01 - Jumlah <i>lifting</i> minyak bumi	ribu BOPD	605,5	605	15.645,5	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi	01 - Jumlah <i>lifting</i> gas bumi	ribu BOEPD	964	1.005		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 61 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	01 - Jumlah produksi batu bara	juta ton	775,20	717		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Realisasi kebutuhan batu bara dalam negeri	persen	120	100		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.01.01 PRO-P: Peningkatan Cadangan dan Produktivitas Energi							
02.11.01.02 PRO-P: Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri							
02.11.02 KP: Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	01 - Meningkatnya akses terhadap gas bumi	01 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	kumulatif, sambungan rumah	947.995	100.000	76.326,7	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi	km	22.478	22.550		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya akses terhadap BBM	01 - Jumlah volume penyaluran BBM bersubsidi	juta kl	17	19,41		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah volume penyaluran BBM nonsubsidi	juta kl	- (indikator baru)	35,16		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	03 - Meningkatnya akses terhadap listrik	01 - Jumlah pelanggan listrik (kumulatif)	ribu pelanggan	92.494	95.256		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	04 - Meningkatnya keterjangkauan energi	01 - Deviasi harga jual eceran BBM	persen	0	0		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Disparitas harga jual eceran BBM (jenis BBM tertentu)	persen	- (indikator baru)	49		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Disparitas harga jual eceran bensin (jenis BBM khusus penugasan)	persen	- (indikator baru)	22		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.02.01 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Gas Bumi							
02.11.02.02 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan BBM							
02.11.02.03 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Listrik							
02.11.02.04 PRO-P: Pengawasan dan Penyaluran Energi yang Disubsidi							
02.11.03 KP: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	01 - Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	01 - Konsumsi <i>biofuel</i>	juta kl	11,30	13,50	4.675.201,7	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Produksi listrik energi terbarukan	GWH	44.706,80	50.739		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



- 63 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya efisiensi energi	01 - Penurunan intensitas energi final	SBM/miliar rupiah	0,98	0,97		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.03.01 PRO-P: Diversifikasi Menuju Energi Bersih							
02.11.03.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Terbarukan							
02.11.03.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Pendukung Energi Bersih							
02.11.03.04 PRO-P: Perluasan Pemanfaatan Biofuel							
02.11.03.05 PRO-P: Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi							
02.12 PP: Swasembada Air	01 - Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif	01 - Kapasitas tampungan air	m ³ /kapita	59,59	59,31	24.776.302,0	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	persen	53,34	53,01		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	persen	61,55	61,61		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	persen	15,6	15,6	4.632.562,0	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m ³	0,31	0,34		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	persen	0	12		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	01 - Rumah tangga dengan akses air minum aman	persen	11,80 (2020)	33		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	persen	10,21 (2023)	12,5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	persen	4,2 (2023)	2,5		024 - Kementerian Kesehatan
	02.12.01 KP: Pembangunan dan Pengelolaan Tampungan Air	01 - Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	unit (kumulatif)	1.563	1.563		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah bendungan yang selesai dibangun	unit (kumulatif)	47 (2015-2024)	1		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



- 65 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	unit (kumulatif)	1.391 (2015- 2024)	13		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	unit (kumulatif)	19	20		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Jumlah bendungan yang direhabilitasi	unit (kumulatif)	2	10		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.01.01 PRO-P: Pembangunan Tampungan Air							
02.12.01.02 PRO-P: Rehabilitasi dan revitalisasi tampungan air							
02.12.01.03 PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Tampungan Air							
02.12.02 KP: Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pasokan air berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air	01 - Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	persen	35	35	90.049,7	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit	wilayah sungai	50	50		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



- 66 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.02.01 PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis		03 - Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	m ³ /detik (kumulatif)	75,03	78,78		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun	m ³ /detik (kumulatif)	46,7 (2015-2024)	0,37		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	m ³ /detik (kumulatif)	1,44	0,84		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Luas layanan irigasi yang dikelola	ha (kumulatif)	3.142.532	3.142.532		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		07 - Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	ha (kumulatif)	134.118 (2020-2024)	10.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		08 - Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	ha (kumulatif)	1.078.057 (2020-2024)	75.864		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		09 - Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	milyar m ³	58,32	55,40		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator / Pengampu
02.12.02.02	PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil						
02.12.02.03	PRO-P: Penyediaan Air Baku Bersumber dari Bendungan						
02.12.02.04	PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan						
02.12.02.05	PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal						
02.12.02.06	PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang Bersumber dari Bendungan						
02.12.02.07	PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Penyediaan Pasokan Air						
02.12.02.08	PRO-P: Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah						
02.12.03 KP: Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air	01 - Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	01 - Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	persen	36	38	2.489.515,4	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	ha (kumulatif)	37.754 (2020- 2024)	3.600		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.03.01 PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis		03 - Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	unit (kumulatif)	549	549		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasikan dan dipelihara	km (kumulatif)	1.784	1.784		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	juta m ³	1,57	0,35		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	kawasan (kumulatif)	- (indikator baru)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		07 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	wilayah sungai (kumulatif)	- (indikator baru)	19		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.03.02 PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Perkotaan							
02.12.03.03 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Pulau Kecil							
02.12.03.04 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Kawasan Strategis Ekonomi dan Daerah Berisiko Daya Rusak Air Tinggi							
02.12.03.05 PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Pengelolaan Risiko Banjir							
02.12.04 KP: Konservasi Sumber Daya Air	01 - Terwujudnya kuantitas air secara berkelanjutan melalui peningkatan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS)	01 - Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan	juta ha	12,7	12,65	8.830.716,6	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat	01 - Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan	unit	175	60		143 - Kementerian Kehutanan
02.12.04.01 PRO-P: Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air							



- 70 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.04.02 PRO-P: Pengawetan Air							
02.12.04.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan, Data, dan Informasi							
02.12.04.04 PRO-P: Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove							
02.12.04.05 PRO-P: Penyelamatan Mata Air Kritis							
02.12.04.06 PRO-P: Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Kualitas Air							
02.12.05 KP: Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir	01 - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	persen	24 (2020)	39,20	1.221.774,1	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas SPAM terbangun	liter/detik	281.045	281.795		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Akses air minum jaringan perpipaan	persen	19.76 (2023)	31		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Persentase <i>Non Revenue Water</i> (NRW) PDAM	persen	33 (2023)	32		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



- 71 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala	01 - Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	100		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	persen	65 (2023)	50		024 - Kementerian Kesehatan
02.12.05.01 PRO-P: Pengembangan SPAM							
02.12.05.02 PRO-P: Pengelolaan SPAM							
02.12.05.03 PRO-P: Pengawasan Kualitas Air Minum							
02.12.06 KP: Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	01 - Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD	01 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik	kab/kota	196	211	2.366.094,8	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas IPAL yang terbangun	sambungan rumah	684.782 (2023)	684.782		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala	persen	9,35 (2023)	11		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD	01 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL	persen	0	0		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - <i>Idle capacity</i> IPLT	persen	75,27 (2023)	70		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - <i>Idle capacity</i> IPAL	persen	65 (2023)	64		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah kab/kota yang melaksanakan LLTT	kab/kota	19 (2023)	21		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.06.001	PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat						
02.12.06.002	PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat						
02.12.06.003	PRO-P: Peningkatan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						
02.12.06.004	PRO-P: Pemantauan dan Inspeksi Kualitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						
02.12.06.005	PRO-P: Pengembangan Manajemen Layanan Sanitasi (Air Limbah Domestik)						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.07 KP: Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan	01 - Meningkatnya kualitas perencanaan air minum dan sanitasi (air limbah domestik)	01 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Jakstra SPAM	provinsi dan kab/kota	15 Provinsi dan 103 Kab/Kota	18 Provinsi dan 178 Kab/Kota	136.367,2	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	21 Provinsi dan 505 Kab/Kota	23 Provinsi dan 508 Kab/Kota		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	278 (2023)	300		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM	BUMN air minum	121	176		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang aman dan berkelanjutan	01 - BUMD air minum berkinerja sehat	persen	65,39 (2023)	74		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah BUMD air minum yang mengelola layanan air limbah domestik	BUMD air minum	5 (2023)	7		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



- 74 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Tersedianya landasan regulasi dan pedoman penyelenggaraan air minum dan air limbah domestik	01 - Jumlah NSPK air minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	2		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah NSPK air limbah domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	1		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.07.001 PRO-P: Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) melalui P3AM dan PPSP							
02.12.07.002 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Pengaturan Air Baku, Air Minum, dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)							
02.12.07.003 PRO-P: Reformasi Kebijakan Tarif Air Baku, Air Minum, dan Air Limbah Domestik							
02.12.07.004 PRO-P: Penyusunan dan Pendampingan Pengaturan dan NSPK Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.08 KP: Penguatan Peran Masyarakat dan Ekosistem Air Minum dan Sanitasi Berbasis Inovasi dan Kolaborasi	01 - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air minum dan ALD	01 - Kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 pilar STBM	kab/kota	4 (2023)	30	77.203,6	024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Berkembangnya ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi	01 - Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	8	10		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.08.001	PRO-P: Kampanye dan Edukasi Masyarakat untuk Mendorong Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Aman						
02.12.08.002	PRO-P: Pengembangan Manajemen Data Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang Terintegrasi						
02.12.08.003	PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Teknologi Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)						
02.12.08.004	PRO-P: Pengembangan Model Bisnis, Skema Kerjasama, SDM, dan Pasar Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)						
02.12.09 KP: Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	01 - Meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	01 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	ha(kumulatif)	3.577 (2020- 2024)	200	4.932.018,6	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m ³ /detik (kumulatif)	2,98 (2020- 2024)	0,2		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya layanan air minum dan sanitasi di Pesisir Utara Jawa	01 - Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa	persen	30	31,5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	kab/kota (kumulatif)	32	32		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.09.01 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air							
02.12.09.02 PRO-P: Penyediaan Air Baku dan Air Minum							
02.12.09.03 PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							
02.12.09.04 PRO-P: Pemantauan Penurunan Muka Tanah							
02.12.09.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							
02.12.09.06 PRO-P: Pengembangan Kawasan							
02.13 PP: Ekonomi Syariah	01 - Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	01 - Kontribusi PDB syariah	persen	46,72 (2023)	49,04	503.320,3	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.01 KP: Industri Halal dan UMKM Halal	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri dan UMKM halal	01 - Persentase peningkatan daya saing industri yang memproduksi produk halal	persen	- (indikator baru)	4,46	15.915,5	019 - Kementerian Perindustrian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Pertumbuhan pariwisata ramah muslim	persen	20,41 (2023)	10,28		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri Makanan Minuman Halal							
02.13.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal							
02.13.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri Fesyen Muslim							
02.13.01.04 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim							
02.13.01.05 PRO-P: Penguatan Halal <i>Value Chain</i>							
02.13.01.06 PRO-P: Penguatan Promosi Industri Halal							
02.13.02 KP: Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional	01 - Meningkatnya ekspor produk halal berdaya saing global dan menguatnya kerjasama ekonomi syariah internasional	01 - Nilai ekspor halal/PDB	persen	3,69 (2023)	3,73	2.134,8	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)



- 79 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.13.02.01 PRO-P: Penguatan Ekspor Halal							
02.13.02.02 PRO-P: Penguatan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional							
02.13.03 KP: Ekosistem Halal	01 - Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah	01 - Jumlah produk tersertifikasi halal	produk	2.172.106	7.000.000	393.382,9	142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
02.13.03.01 PRO-P: Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal							
02.13.03.02 PRO-P: Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal							
02.13.03.03 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Ekosistem Halal							
02.13.03.04 PRO-P: Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal							
02.13.03.05 PRO-P: Pengembangan Riset Pendukung Ekosistem Halal							
02.13.03.06 PRO-P: Pengembangan Penghitungan PDB Syariah							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.13.04 KP: Keuangan Syariah	01 - Meningkatnya peran keuangan syariah mendukung perekonomian nasional	01 - Aset keuangan syariah/PDB	persen	42,67	45,38	3.617,4	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.04.01 PRO-P: Penguatan Perbankan Syariah							
02.13.04.02 PRO-P: Penguatan Pasar Modal Syariah							
02.13.04.03 PRO-P: Penguatan IKNB Syariah							
02.13.05 KP: Dana Sosial Syariah	01 - Meningkatnya peran dana sosial syariah mendukung perekonomian dan perlindungan sosial nasional	01 - ZIS-DSKL/PDB	persen	0,155 (2023)	0,169	88.269,7	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02 - Aset wakaf uang/PDB	persen	0,011 (2023)	0,016		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.05.01 PRO-P: Akselerasi Bauran ZISWAF dan Keuangan Syariah							
02.13.05.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.14 PP: Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi digital dalam mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	01 - Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	persen	8	8-9	500.654,1	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.14.001 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya jumlah SDM digital	01 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif)	persen	3	3,21	227.470,9	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)	persen	79 (2023)	83		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
02.14.001.001 PRO-P: Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi Masyarakat							
02.14.001.002 PRO-P: Penguatan Infrastruktur dan Pelindungan Keamanan Data							
02.14.001.003 PRO-P: Riset dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital							
02.14.001.004 PRO-P: Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Iklim Bisnis							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis		39,12 (2022)	40,215	273.183,2	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Tingkat kesuksesan startup digital nasional (<i>success rate startup digital</i>)	persen	- (indikator baru)	6		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 <i>Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	perusahaan	74 (2023)	87		019 - Kementerian Perindustrian
		04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB	persen	4,3	4,3		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
02.14.002.001 PRO-P: Pengembangan Industri dan Perangkat Digital							
02.14.002.002 PRO-P: Penguatan Pengembangan Ekonomi Digital UMKM							
02.14.002.003 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Perdagangan							



- 83 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.14.002.004 PRO-P: Pengembangan Keuangan dan Perbankan Digital							
02.14.002.005 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan							
02.14.002.006 PRO-P: Pengembangan Media Digital							
02.14.002.007 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Transportasi dan Pariwisata							
02.14.002.008 PRO-P: Pelayanan Kesehatan Digital							
02.14.002.009 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Pendidikan							
02.14.002.010 PRO-P: Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah							
02.14.002.011 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Sektor Energi dan Lingkungan							
02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	01 - Meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material	01 - Tingkat input material sirkular	persen	9	9,2	231.281,1	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	perusahaan (kumulatif)	140	152	23.500,0	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	persen	10	10		019 - Kementerian Perindustrian
02.15.01.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Industri dalam Penerapan Ekonomi Sirkular							
02.15.01.02 PRO-P: Penerapan Industri Hijau							
02.15.02 KP: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	01 - Mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan	01 - Persentase penurunan susut pangan	persen	3	3–5	57.477,1	018 - Kementerian Pertanian
	02 - Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	02 - Persentase pangan yang terselamatkan	persen	1,44	3–5		125 - Badan Pangan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 85 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.15.02.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan							
02.15.02.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pangan Pertanian, Perikanan, dan Peternakan							
02.15.02.03 PRO-P: Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kerjasama Penyelamatan Pangan							
02.15.03 KP: Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	01 - Meningkatkan jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	01 - Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan	produk ramah lingkungan (kumulatif)	51	70	109.637,6	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.15.03.01 PRO-P: Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan							
02.15.03.02 PRO-P: Penerapan Konstruksi Berkelanjutan dan Bangunan Gedung Hijau							
02.15.03.03 PRO-P: Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan							
02.15.04 KP: Penguatan Ekosistem Daur Ulang	01 - Peningkatan kapasitas dan tingkat daur ulang	01 - Persentase sampah yang didaur ulang	persen	13	16	40.666,3	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.15.04.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan, Teknologi dan Fasilitas Pengelolaan Sampah dengan Prinsip Sirkular							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.15.04.02 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha, Bank Sampah, dan Kelompok Masyarakat dalam Penerapan Ekonomi Sirkular							
02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	01 - Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan serta konservasi ekosistem dan spesies	01 - Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati		0,40 (2020)	0,51	614.932,3	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	01 - Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan		0,31 (2020)	0,37		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya upaya pengelolaan sumber daya genetik keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	01 - Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk <i>digital sequence information</i> pada sumber daya genetik	model	1	1		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.16.01 KP: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	01 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	01 - Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	unit	294 (2023)	304	85.797,9	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	nilai	49,56 (2023)	50,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.16.01.01 PRO-P: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	03 - Meningkatnya luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	persen	8,98 (2023)	9,23		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	04 - Meningkatnya pengelolaan areal preservasi	01 - Luas areal preservasi yang dikembangkan	ha	- (indikator baru)	258.000		143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanaan dan pengelolaannya	unit	2	2		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	05 - Meningkatnya pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem melalui pengembangan geopark	01 - Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark	unit (kumulatif)	10	12		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	06 - Meningkatnya pemulihan ekosistem terdegradasi	01 - Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	ha	29.734,22	20.000		143 - Kementerian Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.16.01.02	PRO-P: Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil						
02.16.01.03	PRO-P: Pengelolaan Areal Preservasi						
02.16.01.04	PRO-P: Pengelolaan Geologi untuk Mendukung Keanekaragaman Ekosistem						
02.16.01.05	PRO-P: Pemulihan Ekosistem Darat yang Terdegradasi						
02.16.01.06	PRO-P: Pemulihan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir, dan Laut yang Terdegradasi						
02.16.01.07	PRO-P: Identifikasi Tipe, Luasan, dan Status Keterancaman Ekosistem						
02.16.02 KP: Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan	01 - Berkurangnya status keterancaman spesies	01 - Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies		0,75	0,75	104.746,2	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Menurunnya penyebaran jenis asing invasif di Indonesia	01 - Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area karantina Indonesia	persen	- (indikator baru)	81		127 - Badan Karantina Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.16.02.01	PRO-P: Pemantauan, Penyelamatan, dan Penanganan Konflik Spesies Tumbuhan, Satwa Liar, dan Biota Perairan						
02.16.02.02	PRO-P: Pengembangbiakan dan Konservasi Keragaman Genetik Spesies Tumbuhan, Satwa Liar, dan Biota Perairan						
02.16.02.03	PRO-P: Pemberantasan Perburuan dan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar, serta IUU (<i>Illegal, Unreported, Unregulated</i>) Fishing						
02.16.02.04	PRO-P: Pengendalian Jenis Asing Invasif, Vektor Penyakit, dan Zoonosis						
02.16.03 KP: Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati	01 - Meningkatnya tata kelola keanekaragaman hayati	01 - Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	kelompok masyarakat (kumulatif)	- (indikator baru)	200	28.238,0	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia	dokumen	1	1		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati	lembaga	- (indikator baru)	10		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



- 90 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati	inovasi	50 (2023)	100		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
02.16.03.01 PRO-P: Pelibatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
02.16.03.02 PRO-P: Integrasi Data dan Pengayaan IPTEK Keanekaragaman Hayati							
02.16.03.03 PRO-P: Penguatan Perencanaan dan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati							
02.16.03.04 PRO-P: Mobilisasi Pendanaan Inovatif, Dukungan Swasta, dan Insentif Positif untuk Keanekaragaman Hayati							
02.16.04 KP: Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi	01 - Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan	01 - Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	miliar rupiah	25,96	26	34.322,7	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau appendix CITES	nilai	62,40 (2023)	68,30		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	persen	- (indikator baru)	60		127 - Badan Karantina Indonesia
	02 - Meningkatnya pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	juta ha (kumulatif)	2,0	2,1		143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	miliar rupiah	204	209		143 - Kementerian Kehutanan
02.16.04.01 PRO-P: Pemanfaatan Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan Secara Berkelanjutan							
02.16.04.02 PRO-P: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon, Air, dan Panas Bumi Secara Berkelanjutan							
02.16.04.03 PRO-P: Pengelolaan Wisata Alam dan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.16.05 KP: Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	01 - Meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan	01 - Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	produk (kumulatif)	10	15	361.827,5	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi	produk	25	50		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya pengelolaan keamanan hayati (<i>biosafety dan biosecurity</i>)	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (<i>biosafety dan biosecurity</i>)	rekomendasi kebijakan (kumulatif)	40	44		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.16.05.01 PRO-P: Pengembangan Bioprospeksi, Bioteknologi, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik							
02.16.05.02 PRO-P: Pengelolaan Keamanan Hayati (<i>Biosafety and Biosecurity</i>)							
02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Air	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)		54,78	72,02	679.890,4	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	01 - Indeks Kualitas Udara (IKU)		90,13	78,53		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	01 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		81,67	81,02		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	01 - Indeks Kualitas Lahan (IKL)		61,95	77,97		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	05 - Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	persen	30	30		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	06 - Terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	01 - Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	persen	0,564	0,567		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	01 - Meningkatnya ketersediaan data kualitas air sungai dan danau	01 - Ketersediaan status mutu DAS dan danau	data	188	190	299.785,0	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya kualitas air permukaan	01 - Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu	lokasi	1	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air	kab/kota	- (indikator baru)	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya pengendalian pencemaran air di sektor industri	01 - Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu industri	industri	3.235	2.940		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.01.01 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Danau							
02.17.01.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Air melalui Pengelolaan Air Limbah							
02.17.01.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Air							
02.17.01.04 PRO-P: Pengendalian Pencemaran Air di Sektor Industri							
02.17.02 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Udara di Kab/Kota	01 - Meningkatnya pengelolaan kualitas udara	01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor udara	kab/kota	- (indikator baru)	5	26.100,0	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya pengelolaan emisi udara di industri, prasarana, dan jasa	01 - Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara	industri	3.345	2.940		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.02.01 PRO-P: Pemantauan Kualitas Udara di Kab/Kota							
02.17.02.02 PRO-P: Pengendalian Pencemaran Udara di Kab/Kota serta Sektor Industri, Prasarana, dan Jasa							
02.17.03 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut	01 - Meningkatnya pemulihan kualitas ekosistem pesisir dan laut yang terkontaminasi	01 - Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan	m ²	21.311 m ²	5.000	7.990,2	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah	pelabuhan/industri	36	36		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut	provinsi	- (indikator baru)	37		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.03.01 PRO-P: Pengelolaan Kualitas Air Laut							
02.17.03.02 PRO-P: Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Pesisir							



- 96 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.04 KP: Peningkatan Kualitas Lahan	01 - Meningkatnya luasan lahan rusak yang dipulihkan	01 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61,96	77,98	74.772,4	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya pengelolaan kerusakan lahan	01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor lahan	kab/kota	- (indikator baru)	15		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan	01 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH)	industri	170	113		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	01 - Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS	persen	5,85	9,86		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		02 - Persentase Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	persen	70,38	73,88		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
02.17.04.01 PRO-P: Pemulihan Ekosistem Mangrove dan Lahan Rusak							
02.17.04.02 PRO-P: Implementasi Program Indonesia Hijau dan PROPER Sektor Lahan							



- 97 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.04.03 PRO-P: Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang							
02.17.05 KP: Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	01 - Meningkatnya ketersediaan data dan informasi karakteristik ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)		69,94	64,15	64.123,6	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut	industri	401	100		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.05.01 PRO-P: Pengelolaan Data dan Informasi Ekosistem Gambut							
02.17.05.02 PRO-P: Pemulihan Lahan Gambut							
02.17.06 KP: Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Limbah Radioaktif	01 - Meningkatnya jumlah B3 yang dikelola	01 - Jumlah B3 yang dikelola	ton	6.220.572	6.002.005	20.261,6	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya jumlah limbah B3 dan non-B3 yang dikelola	01 - Jumlah limbah B3 dan non-B3 yang dikelola	ton	62.508.066	65.153.500		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya jumlah limbah radioaktif yang dikelola	01 - Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola	fasilitas	- (indikator baru)	2		085 - Badan Pengawas Tenaga Nuklir
02.17.06.01 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan B3							
02.17.06.02 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 dan non-B3							
02.17.06.03 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Limbah Radioaktif							
02.17.07 KP: Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang	01 - Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi	01 - Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya	usaha/kegiatan/izin	80	260	108.797,4	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Menurunnya tingkat kerawanan kawasan hutan	01 - Luas kawasan hutan yang diamankan	ha	4.589.460 ha (2023)	800.000		143 - Kementerian Kehutanan
	03 - Meningkatnya penyelesaian tindak pidana dan perdata, dan sengketa terkait lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	perkara	14	29		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



- 99 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	04 - Meningkatnya Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal	01 - Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	persen	50	52		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	05 - Meningkatnya sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di pusat dan daerah	01 - Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program	layanan	- (indikator baru)	18		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.07.01 PRO-P: Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Aparat Pengawas, Penyidik dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Tata Ruang							
02.17.07.02 PRO-P: Pengawasan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK							
02.17.07.03 PRO-P: Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan							
02.17.07.04 PRO-P: Penanganan Perkara Bidang LHK yang Diselesaikan							
02.17.07.05 PRO-P: Layanan Pengujian Laboratorium dan Standar Pengelolaan SDA dan Lingkungan							



- 100 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.07.06 PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
02.17.07.07 PRO-P: Penertiban Pemanfaatan Ruang							
02.17.08 KP: Penguatan Instrumen Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (<i>environmental safeguard</i>)	01 - Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah dengan ekosistem rentan	provinsi/kab/kota	24	48	78.060,2	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya kualitas kebijakan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan	01 - Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)	persen	100	100		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan hidup	01 - Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	persen	63	65		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.08.01 PRO-P: Penerapan dan Penguatan RPPLH							
02.17.08.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas KRP dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
02.17.08.04 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan dampak Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan							
02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya IKPS Nasional	01 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		54,70	58	538.398,2	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	01 - Meningkatnya Sampah yang dikelola	01 - Persentase Sampah yang dikelola	persen	39,01	51,21	8.550,0	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (Pilar 4 STBM)	01 - Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (Pilar 4 STBM)	kabupaten/kota	4 (2023)	30		024 - Kementerian Kesehatan



- 102 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.18.01.01	PRO-P: Penguatan Kebijakan, Pendanaan, dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah						
02.18.01.02	PRO-P: Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persampahan						
02.18.01.03	PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengelolaan Sampah						
02.18.01.04	PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah						
02.18.01.05	PRO-P: Perubahan Perilaku untuk Pemilahan Sampah						
02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	01 - Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	01 - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	529.848,2	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - TPA/LUR yang dioperasikan secara <i>sanitary landfill</i> / tingkat pengontrolan penuh	unit	- (indikator baru)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	ton	744,6	18		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



- 103 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.18.02.01	PRO-P: Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah						
02.18.02.02	PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah						
02.18.02.03	PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan TPA <i>Sanitary Landfill</i>						
02.18.02.04	PRO-P: Pengelolaan Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
02.18.02.05	PRO-P: Penanganan Sampah dari Badan Air						
02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	01 - Menurunnya emisi GRK	01 - Persentase penurunan emisi GRK (kumulatif)	persen	17,47 (2023)	18,37	897.648,0	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase penurunan emisi GRK (tahunan)	persen	28,53 (2023)	26,67		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
02.19.01 KP: Penurunan Emisi GRK Sektor Energi	01 - Menurunnya emisi GRK Sektor Energi	01 - Reduksi emisi GRK sektor energi	juta ton CO ₂ -Eq	142	164	770.767,1	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.19.01.01 PRO-P: Pengembangan Energi Rendah Karbon							
02.19.01.02 PRO-P: Peningkatan Konservasi Energi							
02.19.01.03 PRO-P: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan							
02.19.02 KP: Penurunan Emisi GRK Sektor Berbasis Lahan	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor lahan	01 - Reduksi emisi GRK sektor hutan	juta ton CO ₂ -Eq	- (indikator baru)	410,80	24.982,9	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Reduksi emisi GRK sektor pertanian	juta ton CO ₂ -Eq	- (indikator baru)	6,27		018 - Kementerian Pertanian
02.19.02.01 PRO-P: Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan							
02.19.02.02 PRO-P: Restorasi dan Pencegahan Degradasi Lahan Gambut							
02.19.02.03 PRO-P: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan							
02.19.02.04 PRO-P: Implementasi Pertanian Berkelanjutan							



- 105 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.19.03 KP: Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru	01 – Meningkatnya nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	01 - Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi		0	55	13.453,3	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.19.03.01 PRO-P: Rehabilitasi Mangrove							
02.19.03.02 PRO-P: Rehabilitasi Lamun							
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	juta ton CO ₂ -Eq	6,75 (2022)	6,75	4.206,0	019 - Kementerian Perindustrian
02.19.04.01 PRO-P: Peningkatan Implementasi Standar Industri Hijau							
02.19.04.02 PRO-P: Kebijakan dan Capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor IPPU							
02.19.05 KP: Penguatan Aksi Penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah	01 - Menurunnya emisi GRK sektor pengelolaan limbah	01 - Reduksi emisi GRK sektor limbah	juta ton CO ₂ -Eq	10,39	14,13	9.000,0	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.19.05.01 PRO-P: Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat							
02.19.05.02 PRO-P: Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Limbah Cair Domestik oleh Pemerintah Pusat							
02.19.06 KP: Penguatan Tata Kelola dan Faktor Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon	01 - Meningkatkan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK	01 - Jumlah data informasi yang ter-register dan terverifikasi	sektor	5	5	75.238,7	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung nilai ekonomi karbon	kebijakan	2	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.19.06.01 PRO-P: Pemutakhiran Inventarisasi, Verifikasi, serta Registrasi Emisi GRK							
02.19.06.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya							
02.19.06.03 PRO-P: Pengembangan Regulasi dan Mekanisme Perdagangan Karbon (termasuk Bursa Karbon) di Tingkat Internasional, Nasional dan Daerah)							
02.20 PP: Pekerjaan Hijau / <i>Green Jobs</i>	01 - Meningkatnya proporsi tenaga kerja hijau	01 - Proporsi tenaga kerja hijau	persen	2,62 (2023)	2,70–2,73	527.902,2	026 - Kementerian Ketenagakerjaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 107 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.20.01 KP: Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau/ <i>Green Jobs</i>	01 - Berkembangnya ekosistem pekerjaan hijau/ <i>green jobs</i>	01 - Jumlah kebijakan yang spesifik mendukung pekerjaan hijau/ <i>green jobs</i>	kebijakan	- (indikator baru)	1	72.249,7	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
	02 - Menguatnya peran asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/ <i>green jobs</i>	01 - Jumlah kerja sama yang melibatkan asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/ <i>green jobs</i>	kerja sama	- (indikator baru)	1		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.01.01 PRO-P: Penyiadartahuan tentang Pekerjaan Hijau/ <i>Green Jobs</i>							
02.20.01.02 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Regulasi tentang Pekerjaan Hijau/ <i>Green Jobs</i>							
02.20.01.03 PRO-P: Pembangunan Data/Informasi tentang Pekerjaan Hijau/ <i>Green Jobs</i> dan Keterampilan Hijau							
02.20.01.04 PRO-P: Pengembangan Kerja Sama/Kemitraan dalam Ekosistem Pekerjaan Hijau/ <i>Green Jobs</i>							
02.20.01.05 PRO-P: Pemagangan dan Penyediaan Tenaga Pengajar/Guru/Instruktur Pelatihan oleh DUDIKA Hijau							
02.20.01.06 PRO-P: Fasilitasi Hubungan Industrial dan Pelindungan Pekerja Hijau							



- 108 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.20.02 KP: Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau	01 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja hijau	01 - Jumlah tenaga kerja yang dikembangkan kompetensi hijaunya	orang	120.000 (2023)	300.000	455.652,6	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) pekerjaan hijau / <i>green jobs</i> yang ditetapkan	dokumen	- (indikator baru)	1		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.02.01 PRO-P: Pengembangan Standar Kompetensi Hijau							
02.20.02.02 PRO-P: Penyusunan dan Penerapan Kurikulum Hijau dan Metode Pendidikan/Pelatihan Hijau							
02.20.02.03 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Hijau							
02.20.02.04 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Hijau bagi Tenaga Pengajar/Guru/Instruktur							
02.20.02.05 PRO-P: Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan Hijau							
02.20.02.06 PRO-P: Pelaksanaan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi Hijau							



- 109 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Meningkatnya aktivitas ekonomi hijau di sektor kehutanan	01 - Nilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan	triliun rupiah	122,2	134,74	330.375,4	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.01 KP: Peningkatan Produktivitas Hutan	01 - Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kehutanan secara berkelanjutan	01 - Nilai PNBP fungsional kehutanan	triliun rupiah	7,16	7,72	47.928,4	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Nilai ekspor produk kehutanan	miliar USD	15,01	15,42		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.01.01 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Produk Kehutanan Kayu							
02.21.01.02 PRO-P: Diversifikasi Produk Kehutanan (Non Kayu)							
02.21.02 KP: Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan melalui Agroforestri	01 - Meningkatkan potensi pengembangan produk bioekonomi hutan	01 - Nilai investasi sektor kehutanan	triliun rupiah	- (indikator baru)	0,24	47.525,8	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.02.01 PRO-P: Pengembangan Percontohan Bioekonomi berbasis Agroforestri							
02.21.02.02 PRO-P: Riset dan Teknologi untuk Mendukung Peningkatan Nilai Tambah							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.21.02.03 PRO-P: Pengembangan Akses Pasar, Investasi, dan Infrastruktur Pendukung							
02.21.03 KP: Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari	01 - Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)	unit	1.467	1.022	12.186,9	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pemerintah							
02.21.03.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pelaku Bisnis							
02.21.04 KP: Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Menguatnya kepastian legalitas dan legitimasi kawasan hutan	01 - Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	desa	- (indikator baru)	528	81.861,7	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.04.01 PRO-P: Penguatan Perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan							
02.21.04.02 PRO-P: Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 111 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.21.05 KP: Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan	01 - Menguatnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	kelompok masyarakat	14.774	15.574	15.964,3	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan	01 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	miliar rupiah	1.400	1.900		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.05.01 PRO-P: Pengembangan Hasil Hutan Berbasis Masyarakat untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan Air							
02.21.05.02 PRO-P: Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan							
02.21.06 KP: Perlindungan dan Pengamanan Hutan	01 - Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	01 - Penurunan laju deforestasi	juta ha/tahun	0,120	0,111	124.908,3	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.06.01 PRO-P: Peningkatan Pengamanan Hutan dan Kawasan Hutan							
02.21.06.02 PRO-P: Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	01 - Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi biru	01 - IBEI Pilar Ekonomi		22,19 (2023)	24,43	2.250.736,3	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	02 - Meningkatnya perlindungan kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - IBEI Pilar Lingkungan		31,27 (2023)	33,79		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	03 - Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia sektor ekonomi biru	01 - IBEI Pilar Sosial		55,19 (2023)	57,23		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
02.22.01 KP: Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	01 - Memperkuat tata kelola ekonomi biru	01 - Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	persen	91,17	13,6	193.332,4	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		81,00	82,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil		0,45	0,49		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



- 113 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman	persen	≤80	≤80		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.01.01	PRO-P: Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut						
02.22.01.02	PRO-P: Penguatan Tata Kelola Penangkapan Ikan Terukur dan Perizinan Usaha Perikanan						
02.22.01.03	PRO-P: Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan						
02.22.01.04	PRO-P: Penguatan Sistem Teknologi Informasi, Kerja Sama, dan Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan						
02.22.01.05	PRO-P: Penguatan Tata Kelola Industri, Wisata Bahari, dan Jasa Kelautan Berkelanjutan						
02.22.01.06	PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Kawasan Konservasi						
02.22.01.07	PRO-P: Pemanfaatan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil/Terluar						
02.22.02 KP: Peningkatan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Ekosistem Pesisir	01 - Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau- pulau kecil yang efektif dikelola (kumulatif)	juta ha	16,5	18,5	294.045,2	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	juta ha	29,2	30		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.02.02 PRO-P: Pemanfaatan Data dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
02.22.02.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
02.22.02.04 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
02.22.02.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
02.22.03 KP: Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri kelautan dan perikanan	01 - Pertumbuhan PDB perikanan (ADHK)	persen	5,49 (2023)	4,00-6,00	1.274.285,8	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Volume produksi ikan	juta ton	13,95 (2023)	12,94		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Volume produksi olahan perikanan	juta ton	3,62 (2023)	3,71		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		04 - PDB perikanan	triliun rupiah	554,04 (2023)	595,06		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



- 115 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)	juta rupiah	220.600	604.200		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		06 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tilapia	juta rupiah	77.361	447.260		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal
		07 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi udang	juta rupiah	659.210	397.550		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.22.03.02	PRO-P: Pengelolaan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap						
02.22.03.03	PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kluster Komoditas Ikan Budidaya Berbasis Kawasan						
02.22.03.06	PRO-P: Peningkatan Kualitas, Mutu, dan Daya Saing Hasil Perikanan						
02.22.03.07	PRO-P: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan						
02.22.03.08	PRO-P: Perluasan Pasar Produk Perikanan						



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 116 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.22.03.09 PRO-P: Penguatan Logistik dan Sistem Rantai Dingin Produk Perikanan							
02.22.04 KP: Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut	01 - Volume produksi garam	juta ton	2	2,25	17.000,0	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Produktivitas lahan garam rakyat	ton/ha	83	83		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Utilisasi industri pengolahan garam industri	persen	50	52.50		019 - Kementerian Perindustrian
		04 - Utilisasi industri pengolahan hasil laut	persen	41,93	45		019 - Kementerian Perindustrian
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi garam	juta rupiah	2.280.864	7.379.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.22.04.01 PRO-P: Pengembangan Garam Industri Terintegrasi							
02.22.04.02 PRO-P: Penguatan Sarana dan Prasarana Industri Garam							
02.22.04.03 PRO-P: Pengembangan Produk Olahan Laut dan Bioprospeksi Sumber Daya Kelautan							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 117 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.22.05 KP: Penguatan Industri Transportasi Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah industri galangan kapal pendukung transportasi penyebrangan	01 - Volume reparasi kapal	ribu DWT (kumulatif)	9,5 (Jan–Nov 2024)	11,2	8.182,2	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Volume produksi pembuatan kapal	ribu DWT(kumulatif)	0,98	1,1		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai ekspor industri perkapalan	ribu USD	830,89	686,42		019 - Kementerian Perindustrian
02.22.05.01 PRO-P: Pengembangan Industri Galangan Kapal sebagai Industri Berteknologi Tinggi							
02.22.05.02 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Bahan Baku Industri Perkapalan							
02.22.05.03 PRO-P: Pengembangan Mutu dan Daya Saing Industri Perkapalan							
02.22.06 KP: Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan	01 - Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau	lokasi destinasi pariwisata bahari	0	10	240.242,3	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu perjalanan	7.797,76 (2023)	13.686,56		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu kunjungan	8.344,92 (2023)	12.204,23		147 - Kementerian Pariwisata
02.22.06.01 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Bahari							
02.22.06.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Pariwisata Bahari							
02.22.06.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Sektor Pariwisata Bahari							
02.22.06.04 PRO-P: Peningkatan <i>Branding Coral Triangle</i> Indonesia							
02.22.06.05 PRO-P: Penguatan Sektor Pendukung Pariwisata Bahari							
02.22.07 KP: Pengembangan Iptek, Inovasi, dan SDM Ekonomi Biru	01 - Meningkatnya hasil dan pemanfaatan riset, Sumber Daya Manusia di sektor Biru	01 - Pusat inovasi berbasis maritim	unit (kumulatif)	0	0	223.648,5	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja	persen	74,17 (2023)	75		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan



- 119 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.22.07.01 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Kelautan dan Perikanan							
02.22.07.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Maritim, Kelautan dan Perikanan							
02.22.07.03 PRO-P: Penguatan Riset di Bidang Maritim, Kelautan dan Perikanan							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03 PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01 - Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01 - Stok infrastruktur terhadap PDB	persen	43,00 (2019)	46,50	40.785.856,3	132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	02 - Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB	01 - Total aset sektor keuangan/PDB	persen	170,5 (2023)	188,5		Otoritas Jasa Keuangan
	03 - Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	01 - Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	persen	24,50	35,00		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04 - Meningkatnya nilai tambah pariwisata	01 - Rasio PDB pariwisata	persen	3,60 (2022)	4,20–4,30		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Devisa pariwisata	miliar USD	16,71	17,10–18,30		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	05 - Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	01 - Proporsi PDB ekonomi kreatif	persen	6,77 (2023)	7,3–7,9		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 121 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	01 - Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat, laut dan udara	01 - Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	jam per 100 km	1,90	1,89	35.606.671,5	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	persen	98,20 (2023)	98		107 - Badan SAR Nasional
		03 - Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92		022 - Kementerian Perhubungan
		04 - <i>On time performance</i> penerbangan	persen	73,78	80		022 - Kementerian Perhubungan
		05 - Peningkatan volume angkutan laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen	5,6 (2023)	6		022 - Kementerian Perhubungan
		06 - Jumlah penumpang angkutan kereta api	juta penumpang	501	519		022 - Kementerian Perhubungan
		07 - Volume angkutan penyeberangan	juta kendaraan	11,5 (2023)	11,6		022 - Kementerian Perhubungan
		08 - Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	850		022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.01 KP: Pengembangan Konektivitas jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan	01 - Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan mendukung pertumbuhan dan pemerataan	09 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan	persen	53,68 (2023)	65	22.248.355,5	022 - Kementerian Perhubungan
		10 - Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten	persen	85,5 (2023)	85,5		022 - Kementerian Perhubungan
		01 - Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan	km per 100 km ²	2,70	2,76		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.01.01 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan/Jembatan Lintas Utama Pulau	01 - Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan mendukung pertumbuhan dan pemerataan	02 - Panjang jalan tol yang beroperasi (kumulatif angka dasar tahun 2020)	km	933 (2020– 2024)	1176	22.248.355,5	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten /kota	persen	95/69/55	94/71/56/82		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.01.02 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan/Jembatan Non Lintas Utama							
03.01.01.03 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan Mendukung Kawasan Strategis Nasional							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.01.04 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan Mendukung Simpul Transportasi dan/atau Terintegrasi dengan <i>Hinterland</i>							
03.01.01.05 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan mendukung Wilayah Tertinggal dan Perbatasan							
03.01.01.06 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Jalan Berkeselamatan							
03.01.01.09 PRO-P: Penanganan Jalan Daerah							
03.01.01.10 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Jalan							
03.01.02 KP: Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang	01 - Terwujudnya KA penumpang antar kota dan penguatan KA angkutan barang yang andal	01 - Panjang jalur KA yang beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	2.795.392,2	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	persen	63 (2023)	65		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	94		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.02.01 PRO-P: Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.02.02 PRO-P: Peningkatan, Perawatan, dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api Mendukung Keandalan dan Keselamatan							
03.01.02.03 PRO-P: Penyediaan Layanan Nonkomersil Kereta Api							
03.01.02.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Kereta Api							
03.01.03 KP: Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan pelabuhan yang terpadu	01 - Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar 2020)	lokasi	72	97	4.965.367,9	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Penumpang angkutan laut nonkomersil	ribu penumpang	1.297	1.342		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Muatan barang angkutan laut nonkomersil	ton	986.594	725.132		022 - Kementerian Perhubungan
		04 - Tingkat keandalan kenavigasian	persen	92,33 (2023)	95,35		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.03.01 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut							
03.01.03.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Mendukung Kawasan Prioritas							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.03.03 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Mendukung Kawasan Tertinggal dan Perbatasan							
03.01.03.05 PRO-P: Penyediaan Layanan Angkutan Laut Penumpang dan Barang Nonkomersil							
03.01.03.06 PRO-P: Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Laut							
03.01.03.08 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Laut							
03.01.04 KP: Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah	01 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (Kumulatif)	lokasi	100 (2020–2023)	116 (2020–2025)	1.429.792,7	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	309	295		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	83,49	77		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.04.01 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara							
03.01.04.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara Mendukung Kawasan Prioritas							



- 126 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.04.03 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara Mendukung Kawasan Tertinggal dan Perbatasan							
03.01.04.04 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang							
03.01.04.05 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Kargo Udara							
03.01.04.06 PRO-P: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan							
03.01.04.07 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Udara							
03.01.05 KP: Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas	01 - Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi	lokasi, kumulatif	230 (2023)	235	2.090.324,0	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Terminal penumpang yang beroperasi	lokasi, kumulatif	113 (2023)	115		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Lokasi rawan kecelakaan yang ditangani	lokasi	71	59		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.05.01 PRO-P: Pengembangan/Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.05.02 PRO-P: Pembangunan Sarana Angkutan Penyeberangan							
03.01.05.03 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Angkutan Jalan, Multimoda, dan Angkutan Penyeberangan Nonkomersil ke Daerah 3TP							
03.01.05.04 PRO-P: Peningkatan Keselamatan Angkutan Darat							
03.01.05.05 PRO-P: Pengembangan/Pembangunan Simpul Konektivitas Darat							
03.01.05.06 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Darat							
03.01.06 KP: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terwujudnya sistem angkutan umum massal perkotaan yang efisien	01 - Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif)	kota	6 (2020–2023)	10 (2020– 2025)	1.107.077,9	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	juta penumpang/hari	1,4 (2023)	1,42		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	juta penumpang/hari	2,989 (2023)	2,825		022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif)	km (kumulatif)	51,50 (2020–2024)	54,50 (2020–2025)		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.06.01 PRO-P: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan							
03.01.06.02 PRO-P: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel							
03.01.06.03 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan							
03.01.06.04 PRO-P: Jalan Perkotaan							
03.01.07 KP: Pengembangan SDM untuk Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi	01 - Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM transportasi yang berdaya saing	01 - Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	persen	92 (2023)	92	398.755,1	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM transportasi	persen	85,1 (2023)	70		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.07.01 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Vokasi SDM Transportasi							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.07.02 PRO-P: Pemenuhan Infrastruktur Penunjang SDM Transportasi							
03.01.07.03 PRO-P: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi							
03.01.07.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pengembangan SDM Transportasi							
03.01.08 KP: Peningkatan Layanan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Transportasi	01 - Meningkatnya layanan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi	01 - Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	persen	42,10 (2023)	44,59	571.606,2	107 - Badan SAR Nasional
		02 - Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020)	orang, kumulatif	5.155 (2020– 2023)	12.558		107 - Badan SAR Nasional
03.01.08.01 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan (SAR)							
03.01.08.02 PRO-P: Peningkatan SDM Pencarian dan Pertolongan (SAR)							
03.01.08.03 PRO-P: Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	01 - Meningkatnya pembangunan TIK di tingkat nasional	01 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional	-	5,90 (2023)	6,10	2.522.076,6	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
	02 - Meningkatnya transformasi digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	-	49,20 (2022)	50,80		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
	03 - Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berkualitas	01 - Konsumsi listrik per kapita	kwh	1.411	1.464		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.01 KP: Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran	01 - Meningkatnya cakupan dan kualitas di bidang telekomunikasi, pos dan penyiaran	01 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan	persen	70,53 (2023)	78	1.662.601,2	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - <i>Integrated Index for Postal Development</i> (2IPD)	-	50 (2022)	60		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (<i>free to air</i>) per populasi	persen	73,44 (2023)	74		117 - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
		04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi	persen	70 (2023)	73		116 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02 - Meningkatnya kualitas internet pitalebar (<i>broadband</i>) nasional		05 - Jangkauan jaringan pitalebar bergerak (<i>mobile broadband</i>) per populasi	persen	97,16 (2023)	97,30		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		06 - Pelanggan terlayani jaringan pitalebar tetap (<i>fixed broadband</i>) terhadap total rumah tangga	persen	20,82 (2023)	30		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		07 - Pengguna internet	persen	79,50	81,10		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		08 - Pertumbuhan pengakses <i>streaming</i> siaran radio digital	persen	31 (2023)	35		116 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
	01 - Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (<i>fixed broadband</i>)	01 - Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (<i>fixed broadband</i>)	Mbps	32,10	37		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (<i>mobile broadband</i>)	Mbps	38,91 (2023)	50		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		03 - Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita	persen	8,41 (2021)	4,50		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02.01.001	PRO-P: Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat						
03.02.01.002	PRO-P: Pemerataan dan Pemenuhan Layanan Pos dan Logistik Digital						
03.02.01.003	PRO-P: Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan Multiplatform						
03.02.01.004	PRO-P: Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital						
03.02.01.005	PRO-P: Pengelolaan dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit						
03.02.02 KP: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	01 - Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat		51,75 (2022)	52,065	343.176,6	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah		51,13 (2022)	53,67		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		03 - Kapasitas pusat data per kapita	watt per kapita	0,74	0,85		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		04 - Indeks Ruang Digital Kondusif		- (indikator baru)	3		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital



- 133 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02.02.001 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital							
03.02.02.002 PRO-P: Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital							
03.02.02.003 PRO-P: Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan							
03.02.02.004 PRO-P: Riset dan Pengembangan Ekosistem Digital							
03.02.02.005 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Superplatform							
03.02.02.006 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan <i>Emerging Technology</i>							
03.02.03 KP: Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Beban Dasar dan Variabel	01 - Terbangunnya infrastruktur pembangkit listrik yang andal	01 - Kapasitas pembangkit listrik (kumulatif angka dasar tahun 2024)	GW	100,69	103,9	51.357,7	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Penurunan emisi pembangkitan listrik	juta ton CO ₂	16,94	16,41		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Produksi tenaga listrik	GWh	339.459	363.044		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02.03.01 PRO-P: Pembangunan Pembangkit Listrik Beban Dasar dan Variabel serta Sistem Penyimpanan Energi							
03.02.03.02 PRO-P: Pengubahan Bahan Bakar Pembangkit Listrik yang Rendah Karbon							
03.02.04 KP: Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	01 - Meningkatnya kapasitas infrastruktur jaringan tenaga listrik	01 - Panjang jaringan transmisi tenaga listrik	kms	11.146,44	2.152	115.964,3	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Kapasitas gardu induk	MVA	12.276,5	1.510		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Panjang jaringan distribusi tenaga listrik	kms	18.014,07	11.714		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		04 - Kapasitas gardu distribusi	MVA	2.368,74	1.949		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		05 - Rasio elektrifikasi nasional	persen	99,83	99,85		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		06 - SAIDI / SAIFI Nasional	(jam / pelanggan/tahun) / (kali / pelanggan/tahun)	5,34 / 3,23 (2023)	5,38 / 4,07		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		07 - Susut jaringan	persen	8,69 (TW III 2024)	8,72		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02.04.01 PRO-P: Pembangunan Jaringan Transmisi dan Interkoneksi Dalam dan Antar Pulau (<i>Super Grid</i>)							
03.02.04.02 PRO-P: Pembangunan Jaringan Distribusi dan Terisolasi serta Listrik Pedesaan							
03.02.04.03 PRO-P: Digitalisasi Infrastruktur Ketenagalistrikan							
03.02.05 KP: Perluasan Jangkauan Infrastruktur Tenaga Listrik	01 - Meningkatnya jangkauan infrastruktur tenaga listrik	01 - SPKLU dan <i>private charging station</i> terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	3.202	5.810	348.976,8	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - SPBKLU terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	1.902	2.070		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Koneksi tenaga listrik tambahan yang berkualitas	unit	155.429	130.000		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.05.01 PRO-P: Pengembangan Koneksi Tenaga Listrik							
03.02.05.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur SPKLU dan SPBKLU							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	01 - Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal	01 - Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	persen	0,97	1,10	1.463.774,4	149 - Kementerian Koperasi
		02 - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	persen	3,06	3,10		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		03 - Rasio kewirausahaan	persen	3,08	3,10		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.01 KP: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	01 - Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi	01 - Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi	persen	7,24	8,35	77.932,5	149 - Kementerian Koperasi
03.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Usaha Koperasi							
03.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi							
03.03.01.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas SDM dan Reputasi Koperasi							
03.03.01.04 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Koperasi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.03.02 KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses UMKM pada sumber daya produktif	01 - Proporsi UMKM yang memiliki izin usaha	persen	18,64	19,50	190.912,3	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		02 - Proporsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan	persen	19,00	21,60		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Teknologi, Riset, dan Inovasi							
03.03.02.02 PRO-P: Perluasan Akses dan Inovasi Pembiayaan							
03.03.02.03 PRO-P: Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar							
03.03.02.04 PRO-P: Formalisasi Usaha serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk							
03.03.02.05 PRO-P: Penyusunan Konsep dan Kebijakan UMKM Berkelanjutan							
03.03.03 KP: Pengembangan Kewirausahaan	01 - Meningkatnya jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap	01 - Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	persen	18,99	19,17	1.194.929,6	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.03.01 PRO-P: Integrasi dan Pemanfaatan Basis Data Tunggal UMKM dan Koperasi							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.03.03.02 PRO-P: Integrasi Layanan Usaha							
03.03.03.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja UMKM							
03.03.03.04 PRO-P: Inkubasi dan Pendampingan Wirausaha Inklusif dan Berkelanjutan							
03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Peningkatan pendalaman sektor keuangan	01 - Aset perbankan/PDB	persen	57,2 (2023)	66,9	204.848,3	Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Aset dana pensiun/PDB	persen	7,3 (2023)	8,0		Otoritas Jasa keuangan
		03 - Aset asuransi/PDB	persen	9,0 (2023)	9,1		Otoritas Jasa Keuangan
		04 - Kapitalisasi pasar modal/PDB	persen	55,9 (2023)	57,8		Otoritas Jasa Keuangan
		05 - Total kredit/PDB	persen	33,9 (2023)	37,8		Otoritas Jasa Keuangan
		06 - Inklusi keuangan	persen	88,7 (2023)	91,0		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.01 KP: Penguatan Peran Perbankan	01 - Meningkatnya peran perbankan	01 - Total DPK/PDB	persen	40,5 (2023)	43,0	18.852,5	Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit	persen	20,55 (2023)	21,58		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.01.001 PRO-P: Keberagaman Produk Perbankan							



- 139 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.04.01.002 PRO-P: Kredit Sektor Produktif							
03.04.01.003 PRO-P: Kredit Penyediaan Perumahan							
03.04.01.004 PRO-P: Kredit Sektor Berkelanjutan							
03.04.02 KP: Penguatan Peran Sektor Keuangan Nonbank	01 - Memperkuat peran sektor keuangan nonbank	01 - Densitas dana pensiun	juta rupiah	0,98 (2023)	1,05	799,8	Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Penetrasi asuransi	persen	2,8 (2023)	2,9		Otoritas Jasa Keuangan
		03 - Nilai transaksi saham/PDB	persen	16,0 (2023)	19,8		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.02.001 PRO-P: Penetrasi dan Densitas Dana Pensiun							
03.04.02.002 PRO-P: Penetrasi dan Densitas Asuransi							
03.04.02.003 PRO-P: Pendalaman Pasar Modal							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.04.03 KP: Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	01 - Meningkatnya inklusi dan literasi keuangan	01 - Indeks Literasi Keuangan	persen	51,20 (2023)	57,25	185.196,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
03.04.03.001 PRO-P: Literasi dan Edukasi Keuangan							
03.04.03.002 PRO-P: Perlindungan Konsumen							
03.04.03.003 PRO-P: Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah							
03.04.03.004 PRO-P: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat							
03.04.03.005 PRO-P: Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi							
03.04.03.006 PRO-P: Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan							
03.04.03.007 PRO-P: Ekosistem Pendukung Sektor Keuangan							



- 141 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan	01 - Pengeluaran wisatawan mancanegara	USD/kunjungan	1.239 (2023)	1.220	720.640,8	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Tenaga kerja pariwisata	juta orang	22,89 (2022)	25,75		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index, *terbit bienial tahun genap)	peringkat (xx besar)	22	22*		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Kunjungan wisatawan mancanegara	juta kunjungan	11,57 (2023)	14,0–15,0		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Perjalanan wisatawan nusantara	juta perjalanan	852,80 (2023)	1.084		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.01 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur- Yogyakarta- Prambanan	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta- Prambanan	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Borobudur- Yogyakarta-Prambanan	juta rupiah	19.976.019,1 (2023)	22.023.561,06	254.925,8	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta- Prambanan	miliar rupiah	10.878,30 (2018)	23.672,34		147 - Kementerian Pariwisata



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 142 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Devisa pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan	juta USD	334 (2018)	718,37		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan (Jawa Tengah)	orang	2.925.715 (2022)	3.280.514		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Borobudur- Yogyakarta-Prambanan	juta rupiah	955.099,60 (2023)	1.191.228,32		147 - Kementerian Pariwisata
		06 - Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan (DIY)	orang	439.029 (2022)	454.432		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.01.001	PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan						
03.05.01.002	PRO-P: Pengembangan Atraksi Berbasis Pelestarian Kearifan Budaya Jawa dan Ziarah, termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi, di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan						
03.05.01.003	PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan						
03.05.01.004	PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.01.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.01.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.01.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.02 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Bali	01 - Meningkatkan kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Bali	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bali	juta rupiah	54.683.173,97 (2023)	60.288.199,30	88.330,3	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali	miliar rupiah	101.325,81 (2023)	123.500,99		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bali	juta USD	9.364,00 (2019)	12.665,99		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bali	orang	622.432 (2022)	644.270		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bali	juta rupiah	7.547.919,45 (2023)	9.413.987,20		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.02.001 PRO-P: Penataan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata Sarbagita							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.02.002	PRO-P: Pengembangan Transportasi Umum Ramah Lingkungan Bali						
03.05.02.003	PRO-P: Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Bali Utara						
03.05.02.004	PRO-P: Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Bali						
03.05.02.005	PRO-P: Pengembangan SDM dan Kebudayaan Bali						
03.05.02.006	PRO-P: Promosi dan <i>Branding</i> Bali sebagai Destinasi Terbaik di Dunia						
03.05.03 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Kepulauan Riau	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kepulauan Riau	juta rupiah	6.301.872,6 (2023)	6.947.814,54	39.656,2	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau	miliar rupiah	5.413,10 (2019)	5.819,81		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Kepulauan Riau	juta USD	2.001,1 (2019)	2.870,43		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau	orang	236.159 (2022)	294.642		147 - Kementerian Pariwisata



- 145 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	juta rupiah	2.355.111,35 (2023)	2.937.364,16		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.03.001 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Batam-Bintan							
03.05.03.002 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim dan Wisata Kesehatan							
03.05.03.003 PRO-P: Penguatan Identitas KTA Batam, Bintan, dan Natuna							
03.05.03.004 PRO-P: Akselerasi Ekonomi Biru di Natuna							
03.05.03.005 PRO-P: Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Kepulauan Riau							
03.05.03.006 PRO-P: Pengembangan SDM Pariwisata dan Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau							
03.05.03.007 PRO-P: Pengembangan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.04 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Greater Jakarta	01 - Meningkatnya kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Jakarta	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum <i>greater Jakarta</i>	juta rupiah	191.980.855,2 (2023)	211.658.892,8 6	16.896,6	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara <i>greater Jakarta</i>	miliar rupiah	367.760,29 (2023)	421.993,70		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Jakarta	juta USD	2.291,8 (2019)	3.439,37		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata <i>greater Jakarta</i> (DKI)	orang	1.479.227 (2022)	1.537.529		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Tenaga kerja pariwisata <i>greater Jakarta</i> (Jawa Barat)	orang	4.978.804 (2022)	5.591.063		147 - Kementerian Pariwisata
		06 - Tenaga kerja pariwisata <i>greater Jakarta</i> (Banten)	orang	1.230.545 (2022)	1.523.452		147 - Kementerian Pariwisata
		07 - Investasi sektor pariwisata <i>greater Jakarta</i>	juta rupiah	12.650.725,3 (2023)	14.130.860,16		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.04.001 PRO-P: Transformasi Jakarta sebagai Kota Global							
03.05.04.002 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.04.003 PRO-P: Pengurangan Emisi dan Pengelolaan Lingkungan							
03.05.04.004 PRO-P: Penguatan Destinasi Wisata Urban dan MICE							
03.05.04.005 PRO-P: Pengarusutamaan Pariwisata Berkelanjutan							
03.05.04.006 PRO-P: Pengembangan SDM Pariwisata Berstandar Internasional							
03.05.05 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Lombok- Gili Tramena	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Lombok-Gili Tramena	juta rupiah	2.206.361,02 (2023)	2.432.513,02	59.966,1	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena	miliar rupiah	5.666,50 (2018)	14.850,43		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Lombok-Gili Tramena	juta USD	290 (2018)	800,60		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena	orang	428.952 (2022)	544.460		147 - Kementerian Pariwisata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena	juta rupiah	4.488.604,30 (2023)	5.598.319,34		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.05.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.003 PRO-P: Pembangunan Sarana Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.008 PRO-P: Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.06 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado- Likupang	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Manado- Likupang	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Manado-Likupang	juta rupiah	2.573.717,65 (2023)	2.837.523,71	5.016,5	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado-Likupang	miliar rupiah	6.491,89 (2019)	8.982,47		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Manado-Likupang	juta USD	139(2019)	267,09		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Manado-Likupang	orang	208.674 (2022)	219.919		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	juta rupiah	774.326,55 (2023)	965.762,85		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.06.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Manado-Likupang							
03.05.06.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Manado-Likupang							
03.05.06.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Manado-Likupang							
03.05.06.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Manado-Likupang							



- 150 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.06.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Manado-Likupang							
03.05.06.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Manado-Likupang							
03.05.06.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Manado-Likupang							
03.05.06.008 PRO-P: Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus							
03.05.07 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata Kelola di destinasi pariwisata Bangka-Belitung	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bangka Belitung	juta rupiah	3.281.893,64 (2023)	3.614.153,73	39.792,4	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung	miliar rupiah	2.455,23 (2019)	13.161,89		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bangka Belitung	juta USD	23,90 (2019)	41,54		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bangka Belitung	orang	98.106 (2022)	109.216		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	juta rupiah	527.458,60 (2023)	657.861,88		147 - Kementerian Pariwisata



- 151 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.07.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Bangka-Belitung							
03.05.07.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Bangka-Belitung							
03.05.07.008 PRO-P: Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.08 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Danau Toba	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Danau Toba	juta rupiah	2.193.003,64 (2022)	2.417.786,51	64.278,0	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba	miliar rupiah	1.021 (2018)	2.048,41		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Danau Toba	juta USD	73,1 (2018)	163,91		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Danau Toba	orang	1.118.911 (2022)	1.199.556		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Danau Toba	juta rupiah	411.336,50 (2023)	513.030,98		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.08.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Danau Toba							
03.05.08.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Danau Toba							
03.05.08.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Danau Toba							
03.05.08.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Danau Toba							



- 153 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.08.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Danau Toba							
03.05.08.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Danau Toba							
03.05.08.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Danau Toba							
03.05.09 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Raja Ampat	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Raja Ampat	juta rupiah	14.636,37 (2022)	18.196,50	1.396,0	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat	miliar rupiah	195,67 (2022)	290,40		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata dari Raja Ampat	juta USD	5 (2019)	42,44		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat	orang	7.542 (2022)	9.054		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Raja Ampat	juta rupiah	12.575,05 (2023)	15.683,97		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.09.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Raja Ampat							



- 154 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.09.002	PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Raja Ampat						
03.05.09.003	PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Raja Ampat						
03.05.09.004	PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Raja Ampat						
03.05.09.005	PRO-P: Pemasaran Pariwisata Raja Ampat						
03.05.09.006	PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Raja Ampat						
03.05.09.007	PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Raja Ampat						
03.05.10 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Labuan Bajo	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Labuan Bajo	juta rupiah	38.850 (2023)	42.889,25	6.269,8	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo	miliar rupiah	974,49	1.175,23		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Labuan Bajo	juta USD	161 (2019)	283,52		147 - Kementerian Pariwisata



- 155 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo	orang	251.887 (2023)	304.910		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	juta rupiah	532.233,85 (2023)	663.817,72		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.10.001	PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Labuan Bajo						
03.05.10.002	PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Labuan Bajo						
03.05.10.003	PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Labuan Bajo						
03.05.10.004	PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Labuan Bajo						
03.05.10.005	PRO-P: Pemasaran Pariwisata Labuan Bajo						
03.05.10.006	PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Labuan Bajo						
03.05.10.007	PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Labuan Bajo						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.11 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo- Tengger-Semeru	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bromo-Tengger- Semeru	juta rupiah	17.501.425,28 (2023)	19.273.275,88	119.541,1	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara di Bromo-Tengger-Semeru	miliar rupiah	838,7	1.112,12		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	juta USD	4,0 (2019)	7,21		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	orang	3.493.968 (2022)	3.954.841		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger- Semeru	juta rupiah	778.773,45 (2023)	971.309,16		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.11.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 157 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.11.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.008 PRO-P: Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus							
03.05.12 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Wakatobi	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Wakatobi	juta rupiah	35.525,73 (2023)	39.122,37	21.521,6	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi	miliar rupiah	108	132,95		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Wakatobi	juta USD	7,44	9,38		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Wakatobi	orang	209.447 (2022)	243.687		147 - Kementerian Pariwisata



- 158 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Investasi sektor pariwisata Wakatobi	juta rupiah	31.376,65 (2023)	45.520,70		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.12.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Wakatobi							
03.05.12.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Wakatobi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.13 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Morotai	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Morotai	juta rupiah	2.584,92 (2023)	2.849,87	3.050,5	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai	miliar rupiah	103,92 (2022)	159,98		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Morotai	juta USD	0,69	0,78		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Morotai	orang	73.603 (2022)	82.835		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Morotai	juta rupiah	1.151,65 (2023)	49.626,20		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.13.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Morotai							
03.05.13.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk <i>Event</i> Berkualitas dan Warisan Geologi Morotai							
03.05.13.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Morotai							
03.05.13.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Morotai							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.13.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Morotai							
03.05.13.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Morotai							
03.05.13.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Morotai							
03.05.13.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus							
03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	01 - Meningkatnya kinerja sektor ekonomi kreatif	01 - Laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	persen	5,30 (2022)	5,3-5,5	267.844,6	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif	persen	-11,07 (2023)	4,9-5,2		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	juta orang	24,92 (2023)	25,55		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		04 - Pertumbuhan investasi ekonomi kreatif	persen	31,94 (2023)	5,3-7,3		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.01 KP: Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif	01 - Meningkatnya investasi ekonomi kreatif	01 - Nilai investasi ekonomi kreatif	triliun rupiah	89,33 (2023)	123,85-136,28	43.074,7	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



- 161 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.06.01.01 PRO-P: Penguatan Data Ekonomi Kreatif							
03.06.01.02 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif							
03.06.01.03 PRO-P: Fasilitasi Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif							
03.06.01.04 PRO-P: Penguatan Komersialisasi Kekayaan Intelektual							
03.06.01.05 PRO-P: Pelindungan Hasil Kreativitas							
03.06.01.06 PRO-P: Penguatan Jejaring dan Integrasi Rantai Pasok Ekonomi Kreatif							
03.06.02 KP: Penguatan Ekosistem Film, Animasi, Video, dan Musik	01 - Meningkatnya kinerja subsektor film, animasi, video, dan musik	01 - Pertumbuhan PDB subsektor film, animasi, video, dan musik	persen	2,72 (2022)	6,8-7,5	150.259,2	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor film, animasi, video, dan musik	persen	-8,00 (2020)	6,7-11,9		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor film, animasi, video, dan musik	ribu orang	188 (2022)	203		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.03 PRO-P: Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.03 KP: Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya	01 - Meningkatnya kinerja subsektor fesyen dan kriya	01 - Pertumbuhan PDB subsektor fesyen dan kriya	persen	7,76 (2022)	5,3-8,0	28.400,0	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor fesyen dan kriya	persen	-12,01 (2023)	3,5		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor fesyen dan kriya	ribu orang	9.107 (2022)	9.836		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	01 - Meningkatnya kinerja subsektor aplikasi dan gim	01 - Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim	persen	2,58 (2022)	6,7-7,0	36.650,7	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim	persen	152,41 (2021)	6,0-10,0		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim	ribu orang	152 (2022)	187		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.04.01	PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Aplikasi dan Gim						
03.06.04.02	PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Aplikasi dan Gim						
03.06.04.03	PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Aplikasi dan Gim						
03.06.04.04	PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Aplikasi dan Gim						
03.06.04.05	PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Aplikasi dan Gim						
03.06.04.06	PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Aplikasi dan Gim						
03.06.05	01 - Meningkatnya kinerja subsektor kuliner	01 - Pertumbuhan PDB subsektor kuliner	persen	8,61 (2022)	5,3–8,8	9.460,0	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
KP: Penguatan Ekosistem Kuliner		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor kuliner	persen	-2,47 (2023)	5,2–5,4		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



- 165 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor kuliner	ribu orang	13.435 (2022)	14.048		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.05.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Kuliner							
03.06.05.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Kuliner							
03.06.05.03 PRO-P: Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Kuliner							
03.06.05.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Kuliner							
03.06.05.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Kuliner							
03.06.05.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Kuliner							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.



- 166 -

PRIORITAS NASIONAL 4: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04 PN: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	01 - Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	01 - Rata-rata nilai PISA: membaca; matematika; sains		359; 366; 383 (2022)	396; 404; 416	328.315.722,0	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,22	9,33		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03 - Harapan lama sekolah	tahun	13,21	13,32		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	persen	66,30 (2023)	66,78		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	persen	10,15 (2023)	11,11		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06 - Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional: literasi membaca; numerasi		63,06; 55,92 (2024)	64,89; 57,36		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	02 - Terwujudnya kesehatan untuk semua	01 - Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	72,13 (2023)	74,43		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Angka kelahiran total (<i>total fertility rate</i>)	rata-rata kelahiran per wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun	2,11	2,11		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	03 - Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	01 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,447 (2023)	0,430		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		69,51 (2023)	72,89		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 168 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda		60,59 (2023)	65,16		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Indeks Pembangunan Gender		91,85	92,02–92,11		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		05 - Indeks Perlindungan Anak		68,29 (2023)	70,19		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06 - Mobilitas penduduk lanjut usia	persen	92,94 (2023)	94		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		07 - Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	persen	68,42 (2023)	69		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	04 - Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja	01 - Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,91	4,50–5,00		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Peringkat Indeks Inovasi Global	peringkat	54	53		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	05 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat	01 - Peringkat pada SEA Games	peringkat	3 (2023)	2-4		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	persen	9,04	10,36-11,45		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	01 - Tercapainya pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun yang berkualitas (1 tahun pendidikan pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	01 - Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	persen	67,07	67,44	45.231.624,4	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun	anak tidak sekolah	3.777.202	3.622.785		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD	persen	63,81	64,39		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.01.01 KP: Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	01 - Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	36,03	36,61	933.971,7	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.01.01.01 PRO-P: Penyediaan Bantuan Operasional Satuan PAUD							
04.01.01.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Afirmatif untuk PAUD							
04.01.02 KP: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	01 - Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	26,67	31,14	21.196.086,4	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	42,09	46,08		025 - Kementerian Agama
04.01.02.01 PRO-P: Revitalisasi Prasarana Pendidikan dan Pembangunan Satuan Pendidikan Baru (PHTC)							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.01.02.02 PRO-P: Revitalisasi Sarana Pendidikan (PHTC)							
04.01.03 KP: Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran	01 - Terwujudnya perluasan kesempatan belajar untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin	01 - Rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya		0,765	0,788	22.916.824,6	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Uta ma Widyalyaya/Uttama Dhammasekha	persen	68,63	70,48		025 - Kementerian Agama
04.01.03.01 PRO-P: Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah							
04.01.03.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bagi Peserta Didik Kurang Mampu							
04.01.03.03 PRO-P: Penyediaan Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Afirmasi							
04.01.04 KP: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	01 - Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	anak	- (indikator baru)	496.810	184.741,7	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



- 172 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	anak	261.197	261.297		025 - Kementerian Agama
04.01.04.01 PRO-P: Pembinaan dalam Pencegahan Anak Tidak Sekolah							
04.01.04.02 PRO-P: Penanganan Anak Tidak Sekolah							
04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Terwujudnya kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif	01 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi membaca; dan b. numerasi	persen	a. 46,57; b. 41,42	a. 50,55; b. 43,52	6.861.877,7	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	persen	33,03 (2023)	33,24		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.01 KP: Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	01 - Terwujudnya pembelajaran yang inovatif, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik	03 - <i>Early Childhood Development Index</i> (ECDI)		87,70	88,30	364.949,0	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri	persen	- (indikator baru)	70		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		01 - Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	15,69	16,56		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	30,50	32,24		025 - Kementerian Agama



- 174 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.01.01 PRO-P: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi							
04.02.01.02 PRO-P: Penyediaan Akses Listrik dan Internet untuk Satuan Pendidikan							
04.02.02 KP: Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Proses Pembelajaran Berkualitas, termasuk Peningkatan Kecakapan Literasi Kelas Awal, serta Penguatan Karakter dan <i>Wellbeing</i> Peserta Didik dan Pendidik	01 - Terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan mampu mengembangkan kompetensi sebagai masyarakat yang aktif	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar	persen	18,15	36,30	359.529,7	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	persen	10,08	20,05		025 - Kementerian Agama
04.02.02.01 PRO-P: Penguatan Pendidikan Karakter yang Dilaksanakan pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik dan Pendidik							
04.02.02.02 PRO-P: Peningkatan Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN Maupun Non ASN dalam Bentuk Finansial dan Nonfinansial							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.02.03 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Peserta Didik							
04.02.03 KP: Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif	01 - Terwujudnya peserta didik yang kompeten dan mampu mengaplikasikan materi-materi pembelajaran	01 - Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi membaca; dan b. numerasi	persen	a. 68,13; b. 62,51 (2023)	a. 68,62; b. 67,35	344.918,9	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi membaca; dan b. numerasi	persen	a. 58,07; b. 50,91 (2023)	a. 59,30; b. 52,55		025 - Kementerian Agama
04.02.03.02 PRO-P: Pelaksanaan Asesmen dan Pengujian Pendidikan							



- 176 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.03.03 PRO-P: Pengembangan Kebijakan dan Model Asesmen Pendidikan							
04.02.04 KP: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	01 - Terwujudnya tumbuh kembang anak usia dini secara optimal dalam mendukung kualitas belajar anak	01 - Persentase kab/kota yang menerapkan PAUD-HI	persen	50,19	64,79	3.412.504,2	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.02.04.01 PRO-P: Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan PAUD-HI							
04.02.04.02 PRO-P: Penguatan Pendidikan, Pengasuhan, Peningkatan Gizi dan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Dini							
04.02.05 KP: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	01 - Tercapainya peningkatan kualitas dan pemahaman ilmu agama pada peserta didik untuk diterapkan dalam kehidupan	01 - Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	persen	41,96	54,93	60.745,9	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	persen	54,67	62,08		025 - Kementerian Agama
04.02.05.01 PRO-P: Peningkatan Kompetensi pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Agama							



- 177 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.05.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Pemberdayaan Kualitas bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan							
04.02.05.03 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pembelajaran Agama							
04.02.06 KP: Penerapan Kurikulum yang Kontekstual Berpusat pada Peserta Didik serta Fokus pada Karakter dan Kompetensi Esensial	01 - Terwujudnya pembelajaran yang memuat aspek mendasar dan relevan dengan kebutuhan saat ini dan masa depan	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	83,94	87,96	234.654,1	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	50,21	53,52		025 - Kementerian Agama
04.02.06.01 PRO-P: Penyediaan Buku dan Bahan Ajar yang Berkualitas							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.06.02 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Adaptif							
04.02.06.03 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Model Pembelajaran Adaptif							
04.02.07 KP: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	01 - Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	01 - Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi	unit	- (indikator baru)	- (indikator baru)	2.000.000,0	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina	unit	- (indikator baru)	12		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.02.07.01 PRO-P: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul							
04.02.07.02 PRO-P: Pembinaan Sekolah Unggul Transformasi							
04.02.08 KP: Revitalisasi Pendidikan Nonformal	01 - Tercapainya peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dan menjamin pendidikan kesetaraan sebanding dengan pendidikan formal	01 - Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	22,01	24,43	84.575,9	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.08.01 PRO-P: Penyediaan Layanan Pendidikan Nonformal							
04.02.08.02 PRO-P: Penguatan Lembaga Pendidikan Nonformal							
04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	01 - Terwujudnya layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	01 - Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	persen	56,00	65,00	350.357,2	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	persen	- (indikator baru)	10,00		025 - Kementerian Agama
04.03.01 KP: Peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Meningkatnya kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	persen	- (indikator baru)	30,00	277.390,5	025 - Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 180 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.03.01.01 PRO-P: Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Keagamaan							
04.03.01.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Berbasis Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keagamaan							
04.03.01.03 PRO-P: Penyediaan Bantuan Sarana Prasarana untuk Satuan Pendidikan Keagamaan							
04.03.02 KP: Rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Terpenuhiya rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi	persen	32	55	34.983,1	025 - Kementerian Agama
04.03.02.01 PRO-P: Pembinaan Satuan Pendidikan Keagamaan							
04.03.02.02 PRO-P: Pembinaan Keagamaan untuk Peserta Didik							
04.03.03 KP: Penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Terwujudnya penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	persen	- (indikator baru)	10,00	37.983,6	025 - Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.03.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan Keagamaan							
04.03.03.02 PRO-P: Pendampingan dalam Peningkatan Mutu pada Satuan Pendidikan							
04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	01 - Terwujudnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	01 - Indeks Pemerataan Guru		36,91	35,91	21.813.310,0	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	persen	35,21 (2023)	41,63		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.04.01 KP: Reformasi Pendidikan Keguruan melalui Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	01 - Menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan dan profesi guru	01 - Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi	persen	94,24 (2022)	96,4	658.288,1	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul	persen	0 (2022)	1,25		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	02 - Meningkatnya proporsi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	01 - Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	persen	57,94	71,50		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	persen	38,91 (2023)	51,17		025 - Kementerian Agama
04.04.01.01	PRO-P: Revitalisasi LPTK dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan PPG						
04.04.01.02	PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidik melalui Sertifikasi Profesi						
04.04.02	01 - Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran	01 - Persentase daerah (provinsi dan kab/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	persen	32,61	40,22	21.155.021,9	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
KP: Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, <i>in-service training</i>), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja		02 - Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik	persen	80,00	80,85		025 - Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.04.02.01	PRO-P: Pemenuhan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
04.04.02.02	PRO-P: Pemenuhan Kesejahteraan Afirmatif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Memenuhi Kekurangan Guru						
04.04.02.03	PRO-P: Perencanaan dan Kebijakan Penyediaan Guru ASN						
04.04.02.04	PRO-P: Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
04.04.02.05	PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Guru Agama Berbasis Kinerja						
04.04.02.06	PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Kinerja						
04.04.02.07	PRO-P: Pendampingan Pembelajaran untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	01 - Terselenggaranya sistem tata kelola pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta reputasi kelembagaan pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	persen	62,80	64,06	1.407.991,2	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B	persen	64,94 (2023)	67,16		



- 184 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.05.01 KP: Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan	01 - Terwujudnya lembaga pendidikan yang ideal, mandiri, dan berintegritas	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	54,06 (2023)	59,47	62.149,5	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	41,79	42,50		025 - Kementerian Agama
04.05.01.02 PRO-P: Pendampingan dalam Peningkatan Kualitas untuk Kepala Satuan Pendidikan							
04.05.02 KP: Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Khususnya Terkait Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Terwujudnya kolaborasi yang bersinergi dan berkualitas dalam peningkatan mutu pendidikan	01 - Persentase daerah (provinsi dan kab/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	persen	42,75	57,61	626.029,6	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.05.02.01 PRO-P: Pembinaan Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan							
04.05.02.02 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Pendidikan							
04.05.03 KP: Penguatan Sistem Penjaminan Mutu	01 - Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP	persen	89,67 (2023)	98,65	719.812,1	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP	persen	30,48	33,81		025 - Kementerian Agama
04.05.03.01 PRO-P: Pendampingan Satuan Pendidikan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu							
04.05.03.02 PRO-P: Penyediaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pendidikan							
04.05.03.03 PRO-P: Percepatan Akreditasi Lembaga Pendidikan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan <i>Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM)</i>	01 - Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan berkembangnya STEAM di pendidikan tinggi	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi	persen	31,45 (2023)	33,94	18.810.467,1	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. total; b. karyawan atau wirausaha;	persen	a. 59,86 (2022); b. 81,87 (2022)	a. 62,16; b. 83,59		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Proporsi mahasiswa baru berkuliah di prodi STEM terakreditasi unggul	persen	23,6 (2020)	28,8		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas	persen	92,6 (2020)	93,7		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	persen	40,67 (2022)	43,70		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		06 - Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM	persen	28,13 (2023)	29,04		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06.01 KP: Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	01 - Meningkatnya relevansi dan partisipasi pendidikan tinggi	01 - Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)		0,33 (2023)	0,46	18.318.331,4	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31%	provinsi	22 (2023)	23		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan	bulan	13 (2023)	12,5		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Rasio <i>outbound</i> per <i>inbound</i> mahasiswa	persen	6,50 (2018)	7,20		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	persen	31,99 (2023)	32,99		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.01.01 PRO-P: Penyaluran Bantuan Pembiayaan Pendidikan Tinggi yang Tepat Sasaran							
04.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi							
04.06.01.03 PRO-P: Inovasi dan Perluasan Layanan Pendidikan Tinggi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06.01.04 PRO-P: Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi							
04.06.01.05 PRO-P: Pendidikan Karakter, Peningkatan Kemampuan Interpersonal dan Mobilitas Akademik Mahasiswa							
04.06.02 KP: Pengembangan STEAM	01 - Menguatnya bidang STEAM di perguruan tinggi	01 - Proporsi program studi STEM	persen	43,5 (2022)	47,7	80.112,3	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi program studi terakreditasi unggul a. total b. STEM c. Non STEM	persen	a. 14,97; b. 14,90; c. 15,02 (2022)	a. 16,93; b.16,87; c.16,98		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.02.01 PRO-P: Restrukturisasi dan Penataan Program Studi							
04.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis STEAM							
04.06.03 KP: Penguatan Otonomi Perguruan Tinggi Sebagai Rumah Masyarakat Ilmiah	01 - Meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah	01 - Proporsi perguruan tinggi terakreditasi	persen	59,55 (2022)	63,64	51.005,0	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	perguruan tinggi	11 (2023)	12		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



- 189 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06.03.01 PRO-P: Akreditasi Perguruan Tinggi							
04.06.03.02 PRO-P: Fasilitasi dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perguruan Tinggi							
04.06.03.03 PRO-P: Penguatan kampus Sehat, Aman, Nyaman, dan Inklusif							
04.06.03.04 PRO-P: Akselerasi Implementasi Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi							
04.06.04 KP: Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Dosen	01 - Terwujudnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi dosen	01 - Persentase dosen berkualifikasi S3: a. total b. STEM c. Non STEM	persen	a. Total: 18,18 (2021); b. STEM: 16,01 (2021); c. Non STEM: 19,93 (2021)	a. Total: 21,56; b. STEM: 19,08; c. Non STEM: 23,54	361.018,4	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen	persen	50,12 (2023)	51,29		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kapasitas	orang	16.551 (2023)	17.000		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.04.01 PRO-P: Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen melalui Beasiswa Gelar							



- 190 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator / Pengampu
04.06.04.02 PRO-P: Tata Kelola dan Peningkatan Jenjang Karier Dosen							
04.06.04.03 PRO-P: Peningkatan dan Reorientasi Keterampilan Dosen							
04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	01 - Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing yang relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	persen	42,18	44,88	3.603.142,9	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	persen	1,63 (2023)	3,30		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.01 KP: Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi	01 - Terwujudnya lulusan pendidikan menengah vokasi yang produktif dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	persen	12,86	13,42	1.246.728,3	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.07.01.01 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Berbasis Industri							
04.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Pemerataan Pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 191 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.07.01.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Siswa pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi							
04.07.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi (DAK)							
04.07.02 KP: Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi	01 - Meningkatnya lulusan pendidikan tinggi vokasi yang produktif dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a. bekerja; b. berwirausaha	persen	a. 74,25; b. 4,29 (2023)	a. 74,50; b. 4,50	1.245.930,5	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.07.02.01 PRO-P: Relevansi Kurikulum dan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi							
04.07.02.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Mobilitas Dosen dan Instruktur PT Vokasi							
04.07.02.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa PT Vokasi							
04.07.02.04 PRO-P: Sarana dan Prasarana PT Vokasi							
04.07.02.05 PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Sektor Strategis							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.07.03 KP: Penguatan Pelatihan Vokasi	01 - Terwujudnya kegiatan pelatihan vokasi dan ketenagakerjaan yang produktif dan sesuai kebutuhan industri bagi lulusan vokasi	01 - Persentase lulusan pelatihan vokasi setahun terakhir yang bekerja atau berwirausaha	persen	41,86 (2023)	44	956.737,3	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.03.01 PRO-P: Pelatihan Vokasi di Sektor Strategis							
04.07.03.02 PRO-P: Pemagangan Industri di Dalam dan Luar Negeri							
04.07.03.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja							
04.07.03.04 PRO-P: Fasilitasi dan Bantuan Lembaga Pelatihan Vokasi							
04.07.03.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Pelatih							
04.07.04 KP: Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	01 - Terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja	01 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi 02 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	persen orang	62,13 (2023) 7.120.907 (2023)	62,97 13.289.510	153.746,8	026 - Kementerian Ketenagakerjaan 026 - Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan	perusahaan	530.809 (2023)	447.352		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.04.01 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
04.07.04.02 PRO-P: Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
04.07.04.03 PRO-P: Iklim Ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif							
04.07.04.04 PRO-P: Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja							
04.08 PP: Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	01 - Meningkatnya proporsi anggaran iptek dan inovasi terhadap PDB untuk mendukung pembangunan nasional	01 - Pengeluaran iptek dan inovasi	persen PDB	0,28 (2020)	0,30	5.121.798,4	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Proporsi anggaran litbang non pemerintah/swasta	persen	12,5 (2020)	25		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat <i>THE Impact Ranking</i> SDGs: a. Top 300; b. Top 600; c. Top 1000	perguruan tinggi	a. 8; b. 11; c. 22 (2023)	a. 8; b. 12; c. 22		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.01 KP: Penguatan kapasitas Iptek dan inovasi	01 - Meningkatnya kualitas SDM iptek dan inovasi	01 - Jumlah SDM iptek (dosen, peneliti dan perekayasa) per juta penduduk	SDM iptek per juta penduduk	1.242	1.267	1.655.568,1	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi SDM iptek kualifikasi s3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	persen	- (indikator baru)	25		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Proporsi jumlah SDM iptek dengan H Index $\geq$ 10	persen	0,12	0,15		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		04 - Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 periset	KI/100 periset	1,62	4,56		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya kualitas infrastruktur iptek dan inovasi	01 - Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun	infrastruktur	8	1		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.01.01 PRO-P: SDM Iptek yang Mengikuti Pendidikan S3							
04.08.01.02 PRO-P: SDM Iptek dan Inovasi yang Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas yang Mendukung Kegiatan Iptek dan Inovasi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.01.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Iptek dan Inovasi Strategis							
04.08.01.04 PRO-P: Pengembangan Skema Rekrutmen dan Jenjang Karier SDM Iptek							
04.08.01.05 PRO-P: Pengembangan Skema Insentif SDM Iptek, Lembaga Riset, dan Industri							
04.08.02 KP: Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Meningkatnya peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi	01 - Jumlah lembaga pengelola penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	- (indikator baru)	5	1.781.459,5	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	02 - Meningkatnya peran BRIDA dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal	lembaga	- (indikator baru)	2		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	03 - Meningkatnya peran Science Techno Park (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Jumlah Science Techno Park (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	5	5		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah Science Techno Park (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa	lembaga	- (indikator baru)	0		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi	milyar rupiah	- (indikator baru)	50		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Jumlah <i>startup</i> binaan yang produktif	<i>startup</i>	- (indikator baru)	2		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Jumlah <i>hub</i> tematik yang dikembangkan di BRIN	lembaga	- (indikator baru)	0		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		06 - Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN	milyar rupiah	- (indikator baru)	20		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	04 - Meningkatnya peran sektor (K/L) terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas	01 - Jumlah <i>hub</i> iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk	lembaga	- (indikator baru)	0		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.02.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat							
04.08.02.02 PRO-P: Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemanfaatan Iptek dan Inovasi							



- 197 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.02.03 PRO-P: Pengembangan Layanan dan Fasilitasi BRIDA/Ekosistem Daerah							
04.08.02.04 PRO-P: Pengembangan <i>Hub</i> Inovasi Sektoral dan Tematik							
04.08.02.05 PRO-P: Pengembangan Kapasitas <i>Science Techno Park</i> (STP)							
04.08.02.06 PRO-P: <i>Start up</i> yang Mendapatkan Fasilitasi Inkubasi							
04.08.03 KP: Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi secara masif di berbagai Bidang termasuk Pengawasan Ketenaganukliran	01 - Meningkatnya pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat pada bidang-bidang prioritas	produk	- (indikator baru)	25	879.464,7	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya kerjasama iptek dan inovasi dengan mitra/ industri	01 - Jumlah kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan industri/badan usaha pada bidang-bidang prioritas	kerjasama	- (indikator baru)	25		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.03.01 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Pangan							
04.08.03.02 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Energi							
04.08.03.03 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Pertahanan dan Keamanan							
04.08.03.04 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Sumber Daya Air							
04.08.03.05 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Industri Manufaktur yang Mendukung Hilirisasi SDA							
04.08.03.06 PRO-P: Pemanfaatan Hasil Riset Bidang Kesehatan							
04.08.03.07 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup							
04.08.03.08 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Kebijakan, Sosial Humaniora, dan Kebudayaan							



- 199 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.03.09 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Kelautan							
04.08.03.10 PRO-P: Kerjasama Iptek dan Inovasi dengan Mitra/Industri							
04.08.03.11 PRO-P: Pengawasan Tenaga Nuklir							
04.08.04 KP: Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	01 - Terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat	01 - Indeks <i>QS International Research Network Collaboration</i>		14,29 (2023)	19,35	805.306,2	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a. rasio sitasi; b. <i>h-index</i>		a. 0,42; b. 318 (2023)	a. 1,88; b. 318		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Jumlah paten <i>granted</i> dari perguruan tinggi	paten	15.465 (2023)	17.500		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat	produk	75.669 (2023)	82.000		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.04.01 PRO-P: Pengembangan Pusat Keunggulan dan Peningkatan Produktivitas Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi							
04.08.04.02 PRO-P: Peningkatan Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi							
04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	01 - Terwujudnya talenta riset inovasi, seni budaya, dan olahraga yang memperoleh rekognisi di tingkat nasional dan internasional	01 - Jumlah SDM iptek yang mendapatkan rekognisi internasional	orang	95	99	1.152.222,1	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional	karya seni budaya	15 (2023)	15		140 - Kementerian Kebudayaan
		03 - Persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di tingkat regional/internasional	persen	73,38 (2023)	76-80		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Peringkat pada <i>Asian Youth Games</i>	peringkat	15 (2013)	13-15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05 - Peringkat pada <i>Asian Youth Para Games</i>	peringkat	5 (2021)	3-5		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



- 201 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.09.01 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	01 - Meningkatnya rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya serta penyelenggaraan ajang dan non ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia	01 - Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	talenta seni budaya	97 (2023)	111	738.871,3	140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	festival dan pameran seni budaya	6	7		140 - Kementerian Kebudayaan
		03 - Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	persen	31,49	32,76		140 - Kementerian Kebudayaan
04.09.01.01 PRO-P: Pembinaan Talenta Seni Budaya							
04.09.01.02 PRO-P: Penyelenggaraan Ajang Seni dan Festival Seni Budaya							
04.09.01.03 PRO-P: Pemberian Penghargaan untuk Talenta Seni Budaya							



Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.09.02 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	01 - Terciptanya SDM Iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional	01 - Rasio SDM iptek per satu juta penduduk	SDM iptek per 1 juta penduduk	1.151 (2023)	1.265	141.813,4	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientists</i>	orang	95 (2023)	99		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Raihan olimpiade sains dan teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa	peraih	100 (2023)	144		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.09.02.01 PRO-P: Memperluas Kumpulan Bakat (<i>Talent Pool</i>) dan akuisisi Talenta Riset dan Inovasi							
04.09.02.02 PRO-P: Memperkuat Pembinaan serta Fasilitasi Talenta Riset dan Inovasi							
04.09.02.03 PRO-P: Meningkatkan Sarana Prasarana Esensial Manajemen Talenta							
04.09.02.04 PRO-P: Meningkatkan Sinergi Pendanaan dan Tata Kelola Kelembagaan Riset dan Inovasi							
04.09.02.05 PRO-P: Meningkatkan Apresiasi Talenta Riset dan Inovasi							



- 203 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.09.03 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	01 - Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	01 - Provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandarisasi	provinsi	16 (2023)	18	146.453,1	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Kab/kota dengan PPLP yang terbentuk	kab/kota	24 (2023)	29		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah	persen	- (indikator baru)	15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat	persen	- (indikator baru)	15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05 - Jumlah perolehan medali pada <i>Asian Youth Games</i>	medali	1 emas/2 perak/2 perunggu (2013)	1-2		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



- 204 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Jumlah perolehan medali pada <i>Asian Youth Para Games</i>	medali	12 emas/11 perak/14 perunggu (2021)	12-15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.09.03.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga							
04.09.03.02 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga							
04.09.04 KP: Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)	01 - Terwujudnya tata kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akuntabel dan berkelanjutan	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan rencana aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN)	rekomendasi kebijakan	1 (2023)	1	125.084,3	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
04.09.04.01 PRO-P: Penguatan Basis Data Terpadu MTN							
04.09.04.02 PRO-P: Penguatan Sinergi Pelaksanaan MTN							
04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	01 - Terwujudnya masyarakat literat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta	01 - Nilai dimensi budaya literasi IPK		60,49 (2023)	63,24	357.367,9	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 205 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.10.01 KP: Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	01 - Terwujudnya layanan perpustakaan yang berkualitas untuk menguatkan budaya literasi, kreativitas dan inovasi	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		69,42 (2023)	73,50	273.185,4	057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.10.01.01 PRO-P: Peningkatan Layanan Literasi yang Berkualitas dan Merata							
04.10.01.02 PRO-P: Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial							
04.10.02 KP: Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Meningkatnya budaya kegemaran membaca	01 - Tingkat kegemaran membaca		66,67 (2023)	73,00	84.182,5	057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.10.02.01 PRO-P: Pembiasaan Kegemaran Membaca							
04.10.02.02 PRO-P: Penguatan Komunitas dan Penggerak Literasi							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	01 - Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat berbasis siklus hidup melalui penguatan edukasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat	01 - Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	189 (2020)	122	76.693.477,6	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Angka kematian balita	per 1.000 kelahiran hidup	19,83 (2020)	15,00		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	persen	21,50 (2023)	18,8		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Prevalensi remaja putri anemia	persen	- (indikator baru)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	74,30 (2023)	75		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB <i>Modern</i> (<i>proportion of demand satisfied by modern methods</i>)	persen	83,9	84,7		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



- 207 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		08 - Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	- (indikator baru)	36		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.01 KP: Penurunan kematian ibu dan anak	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata laksana balita sakit, serta imunisasi	01 - Persentase persalinan di fasyankes	persen	87,2 (2023)	88	96.453,9	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase kab/kota dengan RS PONEK sesuai standar	persen	19,45 (2023)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase kab/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	persen	- (indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase kab/kota dengan <i>CFR direct obstetric</i> (eklamsi & pendarahan <i>postpartum</i>) < 1%	persen	- (indikator baru)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase <i>antenatal care</i> (ANC) 6 kali (K6)	persen	- (indikator baru)	80		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Cakupan <i>antenatal care</i> (ANC) sesuai standar (12T)	persen	- (indikator baru)	63		024 - Kementerian Kesehatan



- 208 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		07 - Persentase anemia pada ibu hamil	persen	27,7 (2023)	26		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Persentase calon pengantin yang mendapat <i>skrining</i> kesehatan	persen	49,2 (2023)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		09 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	kelahiran hidup per 1000 perempuan	18	18		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		10 - Cakupan KF lengkap sesuai standar	persen	26,8 (2023)	35		024 - Kementerian Kesehatan
		11 - Persentase KB pasca persalinan	persen	48,9	57		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		12 - Angka kematian neonatal	per 1.000 kelahiran hidup	9,30 (2020)	9,2		024 - Kementerian Kesehatan
		13 - Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup	16,85 (2020)	12,62		024 - Kementerian Kesehatan



- 209 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		14 - Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar	persen	90,77 (2023)	91	73.123.134,7	024 - Kementerian Kesehatan
		15 - Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	75 (2023)	80		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.01.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu & Anak							
04.11.01.02 PRO-P: Penguatan Pelayanan Promotif & Preventif Ibu & Anak							
04.11.01.03 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Penurunan Kematian Ibu dan Anak							
04.11.02 KP: Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i>	01 - Pencegahan dan penurunan <i>stunting</i> melalui pendekatan spesifik dan sensitif	01 - Prevalensi <i>wasting</i> (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	persen	8,5 (2023)	8	73.123.134,7	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase bayi lahir <i>premature</i> (<37 minggu)	persen	11,1 (2023)	11		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	persen	- (indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 210 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	persen	68,6 (2023)	73		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	persen	55,5 (2023)	61		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	persen	60,9 (2023)	73		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	persen	24 (2023)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)	persen	74,2	75		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.11.02.01 PRO-P: Penguatan Intervensi Spesifik <i>Stunting</i>							
04.11.02.02 PRO-P: Penguatan Intervensi Sensitif <i>Stunting</i>							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.11.03 KP: Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah	01 - Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD	persen	61,3 (2023)	65	255.289,0	024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia produktif	01 - Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	persen	- (indikator baru)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah pos upaya kesehatan kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	pos	10.200 (2023)	15.000		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
	03 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia	01 - Persentase lansia yang mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar	persen	47,22 (2022)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase puskesmas santun lansia	persen	69	70		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	persen	11,01 (2023)	20		024 - Kementerian Kesehatan



- 212 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP)	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
	04 - Meningkatnya pelayanan KB dan kespro	01 - Angka prevalensi kontrasepsi <i>modern/modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	persen	61,7	61,8		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i> KB)	persen	11,1	10,5		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03 - Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	persen	25,5	25,7		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		04 - Persentase puskesmas mampu pelayanan KB MKJP	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan



- 213 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.11.03.01 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Sekolah							
04.11.03.02 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Produktif							
04.11.03.03 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Lansia							
04.11.03.04 PRO-P: Peningkatan Pelayanan KB & Kespro							
04.11.04 KP: Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	01 - Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	01 - Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	persen	- (indikator baru)	40	3.218.600,0	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	persen	- (indikator baru)	65		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	persen	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	persen	- (indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	persen	- (indikator baru)	35		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	persen	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.04.01 PRO-P: Skrining Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia							
04.11.04.02 PRO-P: Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pemeriksaan Kesehatan Gratis							
04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	01 - Terlaksananya pemberian makan bergizi gratis bagi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah untuk mencapai pemenuhan gizi	01 - Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	persen	87,3 (2023)	87,99	62.986.535,5	128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	persen	75,03 (2023)	75,28		128 - Badan Gizi Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.12.01 KP: Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita		03 - Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	persen	- (indikator baru)	91		128 - Badan Gizi Nasional
		04 - Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	persen	- (indikator baru)	100		128 - Badan Gizi Nasional
	01 - Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	01 - Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	10	51.575.250,0	128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	11		128 - Badan Gizi Nasional
		03 - Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	11		128 - Badan Gizi Nasional
		04 - Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/ sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 216 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Persentase siswa SD/MI/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional
		06 - Persentase siswa SMP/MTs/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional
		07 - Persentase siswa SMA/MA/SMK/ sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional
		08 - Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional
		09 - Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	2		128 - Badan Gizi Nasional
		10 - Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	persen	- (indikator baru)	50		128 - Badan Gizi Nasional



- 217 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		11 - Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	persen	- (indikator baru)	50		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.01.01	PRO-P: Penyediaan Makanan Bergizi Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita						
04.12.01.02	PRO-P: Penyediaan Makanan Bergizi Gratis bagi Siswa dan Santri						
04.12.01.03	PRO-P: Promosi dan Edukasi Gizi dan Pangan						
04.12.02 KP: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	01 - Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional	sistem	- (indikator baru)	1	11.411.285,5	128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	unit	- (indikator baru)	5.000		128 - Badan Gizi Nasional
		03 - Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan	persen	- (indikator baru)	100		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.02.01	PRO-P: Pengembangan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Makanan Bergizi						
04.12.02.02	PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Makanan Bergizi						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.12.02.03 PRO-P: Penguatan Intervensi Pendukung Pemberian Makan Bergizi							
04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	01 - Meningkatnya Pengendalian Penyakit melalui upaya pencegahan, penemuan kasus, dan penuntasan pengobatan	01 - Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	387 (2023)	329	12.541.800,4	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kab/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	6	11		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Desa endemis <i>schistosomiasis</i> yang mencapai eliminasi	desa	16 (2023)	18		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Insidensi HIV	per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,10 (2023)	0,09		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Kab/kota dengan eliminasi malaria	kab/ kota	389 (2023)	425		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase diabetes dalam pengendalian	persen	- (indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase hipertensi dalam pengendalian	persen	18,9	20		024 - Kementerian Kesehatan



- 219 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		08 - Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	kab/kota	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		09 - Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun	persen	1,4 (2023)	1,4		024 - Kementerian Kesehatan
		10 - Kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat, serta pembangunan berwawasan kesehatan	01 - Prevalensi obesitas >18 tahun	persen	23,4 (2023)	23,4		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	persen	12,4 (2023)	12,4		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.01 KP: Penuntasan TBC	01 - Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan	01 - Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	persen	81	90	8.766.289,5	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Angka keberhasilan pengobatan TBC (<i>TB Success Rate</i>)	persen	84	90		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	pengobatan TBC sampai tuntas	03 - Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	persen	19,2	72		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (<i>Enrollment TBC</i>)	persen	90	95		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.01.01 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan TBC							
04.13.01.02 PRO-P: Intensifikasi Penemuan Kasus							
04.13.01.03 PRO-P: Pengobatan TBC							
04.13.02 KP: Eliminasi Penyakit Kusta & <i>Schistosomiasis</i>	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit kusta & <i>schistosomiasis</i>	01 - Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	persen	84,36	86	305.772,1	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	persen	84,97 (2023)	90		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	persen	9,60	<5		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Cakupan pemberian obat pencegahan masal (POPM) untuk <i>schistosomiasis</i>	persen	83,6 (2023)	87,2		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.02.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit Kusta							
04.13.02.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit <i>Schistosomiasis</i>							
04.13.03 KP: Pengendalian penyakit menular lainnya	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit menular lainnya	01 - ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	persen	70 (2023)	90	732.513,3	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota yang mencapai <i>Positivity Rate</i> (PR) malaria <5%	kab/kota	333 (2023)	405		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.03.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit HIV/AIDS							
04.13.03.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit Malaria							
04.13.04 KP: Pengendalian penyakit tidak	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	01 - Jumlah kab/kota yang melakukan <i>skrining</i> DM > 60%	kab/kota	32	52	293.123,0	024 - Kementerian Kesehatan



- 222 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa		02 - Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	- (indikator baru)	5		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	persen	- (indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Cakupan imunisasi HPV	persen	6	90		024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya pengendalian gangguan jiwa	01 - Cakupan <i>skrining</i> kesehatan jiwa	persen	6 (2023)	10		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Tata Laksana Kasus PTM							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.13.04.03 PRO-P: Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa							
04.13.05 KP: Pembudayaan hidup sehat dan Pengendalian faktor risiko PTM	01 - Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	01 - Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	persen	62,6 (2023)	65	183.858,7	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penduduk dengan literasi kesehatan	persen	36,3 (2023)	38,3		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	persen	15 (2023)	15		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR	kab/kota	367	397		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah kab/kota yang melakukan pelayanan UBM	kab/kota	228 (2023)	276		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	persen	- (indikator baru)	3		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	persen	- (indikator baru)	75		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 224 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.13.05.01 PRO-P: Tata Kelola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat							
04.13.05.02 PRO-P: Pengendalian Konsumsi Rokok							
04.13.05.03 PRO-P: Aktivitas Fisik							
04.13.05.04 PRO-P: Pangan Sehat							
04.13.06 KP: Penyehatan Lingkungan	01 - Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan	01 - Kab/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	100	2.260.243,8	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kab/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (kab/kota)	kab/kota	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Kab/kota sanitasi total berbasis masyarakat	kab/kota	4 (2023)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Kab/kota sehat	kab/kota	136	182		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.06.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Sistem dalam Penyehatan Lingkungan							



- 225 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.13.06.02 PRO-P: Perubahan Perilaku <i>Hygiene</i> dan Sanitasi							
04.13.06.03 PRO-P: Penyediaan Akses Air Bersih & Sanitasi							
04.13.06.04 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lingkungan							
04.14 PP: Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	01 - Meningkatnya kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit <i>emerging</i> dan <i>re- emerging</i> , dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat	01 - Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah	persen	37,16 (2023)	40	2.402.037,2	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	persen	90 (2023)	94		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Jumlah KLB keracunan pangan	kejadian	291	250		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Jumlah kab/kota eliminasi rabies	kab/kota	418	430		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (imunisasi rutin lengkap)	persen	62 (TW III 2024)	65		024 - Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.14.01 KP: Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana	01 - Meningkatnya pengendalian KLB/ wabah dan penanganan bencana dengan fokus pada penguatan sistem surveilans, laboratorium, & pos pintu masuk negara	06 - Persentase sediaan farmasi aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	72,5	1.577.717,9	063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		07 - Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		01 - Kab/kota yang merespons sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	kab/kota	452 (2023)	462	1.577.717,9	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah	persen	70 (2023)	73		024 - Kementerian Kesehatan



- 227 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah	persen	40 (2023)	47		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies	kab/kota	- (indikator baru)	110		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	kab/kota	- (indikator baru)	100		018 - Kementerian Pertanian
04.14.01.01	PRO-P: Penguatan Surveilans & Pengendalian KLB/Wabah/ Penanganan Bencana						
04.14.01.02	PRO-P: Penguatan Laboratorium						
04.14.01.03	PRO-P: Penguatan Pos Pintu Masuk Negara						
04.14.01.04	PRO-P: Pengendalian Penyakit Rabies						



- 228 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.14.02 KP: Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba	01 - Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	persen	61,96 (TW II 2024)	65	726.837,7	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penurunan kekosongan (<i>stock out</i>) obat dan vaksin di fasyankes	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	- (indikator baru)	91		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
04.14.02.01 PRO-P: Tata Kelola dan Penyediaan Sediaan Farmasi							



- 229 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.14.02.02 PRO-P: Penggunaan Obat Rasional							
04.14.02.03 PRO-P: Pengendalian Resistensi Antimikroba							
04.14.03 KP: Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	01 - Kab/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	kab/kota	- (indikator baru)	50	97.481,6	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kab/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	kab/kota	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase kab/kota pangan aman	persen	13 (2023)	14		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	persen	77,8 (2023)	78		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	73,3 (2023)	75		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan



- 230 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase obat yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	90		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		07 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	65		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		08 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	68		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		09 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	62		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		10 - Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	persen	- (indikator baru)	94		024 - Kementerian Kesehatan
04.14.03.01 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan							
04.14.03.02 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di hingga tingkat desa, pendekatan khusus pelayanan bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan	01 - Persentase kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar	persen	1,17 (2023)	20	63.354.907,2	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	persen	28	28		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	persen	37	38		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persen	- (indikator baru)	17		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	- (indikator baru)	67		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	98,42	98,6		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		07 - Persentase belanja kesehatan <i>out of pocket</i> masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	persen	4,0 (2023)	3,98		024 - Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 232 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		08 - Pengeluaran kesehatan total per kapita	juta	2,1 (2023)	2,2		024 - Kementerian Kesehatan
		09 - Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	persen	- (indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		10 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	46,72	50		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.01 KP: Investasi pelayanan kesehatan primer	01 - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	01 - Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar	persen	<30	30	1.425.244,5	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase kab/kota dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	persen	18	25		024 - Kementerian Kesehatan



- 233 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar	persen	18,5	40		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	30	50		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	persen	30	35		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Peran Puskesmas							
04.15.01.02 PRO-P: Pengembangan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Peningkatan Peran Kader Kesehatan							
04.15.01.03 PRO-P: Pengembangan Layanan Kesehatan Primer yang Inklusif							



- 234 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.02 KP: Pembangunan RS lengkap berkualitas di kab/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	01 - Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak	01 - Persentase provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar	persen	31,5	40	12.285.915,2	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase kab/kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar	persen	7,8	20		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	- (indikator baru)	8		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Kab/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	kab/kota	26 (2023)	27		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah kab/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas	kab/kota	65	75		024 - Kementerian Kesehatan



- 235 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase RS pemerintah daerah yang memenuhi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	persen	40	45		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Kab/kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	kab/kota	- (indikator baru)	22		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	RS	3	5		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.02.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan							
04.15.02.02 PRO-P: Pengembangan Layanan Unggulan Berbasis Kompetensi							
04.15.02.03 PRO-P: Penguatan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan di Daerah Sulit Akses							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.03 KP: Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	01 - Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan mendorong peningkatan, pemenuhan, dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi, jumlah, maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah	01 - Jumlah kab/kota dengan SDM kesehatan puskesmas sesuai standar	kab/kota	- (indikator baru)	19	263.093,2	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	kab/kota	- (indikator baru)	270		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Rasio dokter spesialis	per 1.000 penduduk	- (indikator baru)	0,19		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	persen	- (indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul	persen	- (indikator baru)	14,82		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.15.03.01 PRO-P: Peningkatan Produksi SDM Kesehatan							
04.15.03.02 PRO-P: Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan							
04.15.03.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan							



- 237 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.04 KP: Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan	01 - Memperkuat kapasitas JKN dan pendanaan kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan	01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN	persen	76,5 (2023)	80	48.982.260,0	BPJS Kesehatan
		02 - Jumlah kepesertaan segmen PBI	juta jiwa	96,7 (2023)	96,8		027 - Kementerian Sosial
		03 - Tingkat kepuasan publik atas layanan jaminan kesehatan nasional	persen	- (indikator baru)	85		BPJS Kesehatan
		04 - Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan	angka	2,92 (Prognosis 2024)	1,5–6		BPJS Kesehatan
		05 - Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	persen	11,9 (2023)	5		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.04.01 PRO-P: Penguatan Kepesertaan JKN							
04.15.04.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola JKN							
04.15.04.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendanaan kesehatan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.05 KP: Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan	01 - Menguatnya tata kelola, data, informasi dan teknologi kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan	01 - Persentase provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah	persen	- (indikator baru)	70	398.394,3	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase sistem informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	49	60		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan <i>online</i> nasional	persen	15	20		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	layanan	2	4		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.05.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kesehatan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.05.02	PRO-P: Penguatan Data dan Informasi						
04.15.05.03	PRO-P: Peningkatan Pemanfaatan dan Inovasi Teknologi Kesehatan						
04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	01 - Menguatnya ketangguhan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak individu dalam keluarga dan mendorong terbentuknya modal sosial	01 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		62,4	64,1	377.964,5	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,3	22,4		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.16.01 KP: Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak	01 - Menguatnya kemampuan keluarga dalam penanaman nilai moral, etika, integritas, karakter dan pengembangan psikososial anak	01 - Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	persen	54,31 (2023)	55,66	16.540,0	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	persen	39,7 (2023)	45		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



- 240 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	persen	39,7 (2022)	45		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		04 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja		84,60	85,20		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		05 - Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	persen	20,50	19,76		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir	persen	9,02	8,82		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.16.01.01 PRO-P: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga							
04.16.01.02 PRO-P: Penguatan Kualitas Pengasuhan dalam Keluarga							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.16.01.03 PRO-P: Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas Keluarga dalam Menjalankan Fungsinya							
04.16.02 KP: Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga	01 - Meningkatnya fasilitas pendukung dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi keluarga	01 - Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	persen	65,97 (2023)	70	155.935,6	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	persen	- (indikator baru)	10		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.16.02.01 PRO-P: Penyediaan fasilitas dan lingkungan pendukung keluarga							
04.16.02.02 PRO-P: Pusat Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga							
04.16.03 KP: Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan	01 - Terjaminnya aspek legalitas, hukum dan ekonomi bagi keluarga rentan	01 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga		54,00	55,41	205.488,9	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Indeks Kerentanan Keluarga		8,5	8,6		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.16.03.01 PRO-P: Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum Bagi Keluarga							
04.16.03.02 PRO-P: Penguatan Keluarga Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga							
04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	01 - Terpenuhi hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Pemenuhan Hak Anak		65,58 (2023)	67,57	872.074,1	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Indeks Perlindungan Khusus Anak		79,91 (2023)	81,44		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	persen	94,03 (2024)	96		010 - Kementerian Dalam Negeri
		04 - Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki : 31,11 perempuan: 36,31	laki-laki : 25,37 perempuan: 31,6		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	persen	2,37	2,41		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.17.01 KP: Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak	01 - Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, meningkatnya kapasitas dan resiliensi anak serta menguatnya kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak	01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun	persen	70	72,5	14.232,8	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota dengan peringkat dalam kab/kota layak anak (KLA)	kab/kota	KLA: 0; utama: 19; nindya: 76; madya: 130; pratama: 135; (2023)	KLA: 0; utama: 20; nindya: 77; madya: 132; pratama: 140		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	persen	77,89	78,03		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir	persen	7,28	7,06		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Jumlah kab/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	kab/kota	280 (2023)	325		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- 244 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.17.01.01 PRO-P: Peningkatan Lingkungan Ramah Anak dan Penguatan Resiliensi untuk Pemenuhan Hak Anak Secara Universal							
04.17.01.02 PRO-P: Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Pemenuhan Hak Anak Secara Universal							
04.17.02 KP: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Meningkatnya pencegahan dan penanganan serta menguatnya kelembagaan dan tata kelola tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	01 - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	persen	5,90	5,61	857.841,3	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Angka pekerja anak usia 5-17 tahun	persen	1,72 (2023)	1,67		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		03 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	46,81	85		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Prevalensi anak usia 13- 17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non- kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 2,18; perempuan: 2,17	laki-laki: 1,56; perempuan: 2,09		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Prevalensi anak usia 13- 17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 1,83; perempuan: 2,67	laki-laki: 1,42; perempuan: 2,25		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 245 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 27,03; perempuan: 33,07	laki-laki: 21,98; perempuan: 28,52		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		07 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	persen	12,64	12,42		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.17.02.01 PRO-P: Pencegahan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak							
04.17.02.02 PRO-P: Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya							
04.17.02.03 PRO-P: Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya							
04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	01 - Meningkatkan kualitas pemuda dan partisipasi aktifnya di bidang ekonomi, sosial, dan politik	01 - Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	persen	62,2 (2023)	66,74	283.522,7	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Angka kesakitan pemuda	persen	6,24 (2023)	5,99		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



- 246 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.18.01 KP: Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Meningkatnya kualitas individu pemuda yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan; penguatan karakter, dan tercegahnya perilaku berisiko pada pemuda	03 - Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	persen	12,63 (2023)	11,63	28.502,0	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Persentase usia muda (16-30 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	persen	25,8 (2023)	24,13		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05 - Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	persen	70,49 (2023)	75,79		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		01 - Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	persen	15,82 (2023)	25,49		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	persen	96,74 (2023)	96,96		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase pemuda yang merokok	persen	24,75 (2023)	23,88		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Persentase pemuda berolahraga	persen	30,32 (2023)	38,92		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



- 247 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.18.01.1 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka							
04.18.01.2 PRO-P: Peningkatan Kualitas Kesehatan Pemuda							
04.18.01.3 PRO-P: Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda							
04.18.02 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan	01 - Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi khususnya partisipasi aktif dalam ketenagakerjaan	01 - Persentase pemuda pekerja tidak penuh	persen	32,46 (2023)	31	210.138,1	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Rasio kewirausahaan pemuda	persen	1,16 (2023)	1,33		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	persen	16,66 (2023)	17,82		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki- laki	persen	66,08 (2023)	66,3		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.02.1 PRO-P: Peningkatan Partisipasi Ketenagakerjaan Layak Pemuda							
04.18.02.2 PRO-P: Peningkatan Kewirausahaan Pemuda							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.18.03 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik	01 - Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan khususnya partisipasi aktif di bidang sosial dan politik	01 - Persentase pemuda (16- 30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	persen	5,44 (2023)	5,65	44.882,6	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	persen	1,44 (2023)	1,48		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.03.1 PRO-P: Peningkatan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda							
04.18.03.2 PRO-P: Peningkatan Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Pemuda							
04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan	01 - Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	persen	0,126 (2023)	0,103	567.125,5	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Proporsi anggota legislatif	persen	laki-laki: 78,10; perempuan: 21,90	laki-laki: 77,55; perempuan: 22,45		076 - Komisi Pemilihan Umum
		03 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	persen	laki-laki: 42,62; perempuan: 37,60 (2023)	laki-laki: 43,41; perempuan: 38,89		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



- 249 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	56,42	56,30–58,80	2.397,8	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	persen	6,6	6,3		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06 - Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu rupiah	laki-laki: 16.736; perempuan: 9.579 (2023)	laki-laki: 16.891; perempuan: 9.920		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		07 - Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	lembaga	K/L: 3; provinsi: 2; kab/kota: 3	K/L: 4; provinsi: 3; kab/kota: 5		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.01 KP: Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan	01 - Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan	01 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	persen	0,258 (2023)	0,255	2.397,8	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Angka partisipasi kasar SMA/SMK/ sederajat	persen	87,29	87,40		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



- 250 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.19.01.01 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi							
04.19.01.02 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan							
04.19.02 KP: Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	01 - Meningkatnya kapasitas, kemandirian, kepemimpinan, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, didukung oleh penguatan kebijakan, akses sumber daya, dan norma sosial budaya yang mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam pembangunan	01 - Persentase perempuan di jabatan tinggi pratama dan madya	persen	pratama 14; madya 16	pratama 14,5; madya 16,5	147.120,0	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase perempuan di posisi managerial	persen	35,02	38,68		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase perempuan kepala desa	persen	5,76	6,26		010 - Kementerian Dalam Negeri
04.19.02.01 PRO-P: Peningkatan <i>Agency</i> dan Representasi Perempuan Dalam Lembaga Masyarakat dan Partai Politik							



- 251 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.19.02.02 PRO-P: Peningkatan <i>Agency</i> dan Representasi Perempuan dalam Birokrasi dan Jabatan Publik							
04.19.03 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan	01 - Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap peluang kerja, dan ekosistem kewirausahaan serta penguatan kebijakan yang ramah perempuan dan keluarga	01 - Persentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan	persen	22,09	21	38.037,0	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Rasio kewirausahaan perempuan	persen	1,70 (2023)	1,79		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Indeks Literasi Digital	persen	laki-laki: 3,56; perempuan: 3,52 (2023)	laki-laki: 3,62; perempuan: 3,60		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
04.19.03.01 PRO-P: Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan							
04.19.03.02 PRO-P: Penguatan Lingkungan Kerja yang Ramah Perempuan							



- 252 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.19.04 KP: Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan	01 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, data, koordinasi lintas sektor, serta kesadaran dan perubahan norma sosial budaya	01 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	persen	3,70	3,59	362.798,8	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	persen	5,7	5,54		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	persen	18	17,35		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan	persen	75,41	77,51		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Prevalensi perempuan yang mengalami P2GP	persen	46,3	43,86		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



- 253 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persen	49,25 (2023)	85		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		07 - Jumlah perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	orang	26.161 (2023)	28.777–30.085		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.04.01 PRO-P: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan							
04.19.04.02 PRO-P: Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan							
04.19.05 KP: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan	01 - Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dalam pembangunan	01 - Persentase anggaran responsif gender	persen	K/L: 4,04 ; prov/kab/kota :10	K/L: 5,20 ; prov/kab/kota : 11,2	16.771,9	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase RO/sub kegiatan responsif gender	persen	K/L: 3.80	K/L: 4,00		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan rencana aksi kesetaraan gender	persen	- (indikator baru)	prov: 7; kab/kota: 0		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.19.05.01	PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan di Pusat						
04.19.05.02	PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan di Daerah						
04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat	01 - Indeks Kesejahteraan Sosial untuk penduduk lanjut usia		- (indikator baru)	59,67	2.204.329,9	027 - Kementerian Sosial
		02 - Indeks Kesejahteraan Sosial untuk penyandang disabilitas		- (indikator baru)	38,42		027 - Kementerian Sosial
04.20.01 KP: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01 - Pemenuhan akses layanan dasar dan perlindungan dari kekerasan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	01 - Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan	persen	99,55 (2023)	99,60	2.135.053,4	027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	persen	8,19	10		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03 - Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	12,33	13,08		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.20.01.01 PRO-P: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas							
04.20.01.02 PRO-P: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia							
04.20.02 KP: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan	01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kebijakan pembangunan	01 - Persentase pemprov yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan	persen	73 (2023)	75	69.276,5	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase pemprov yang melibatkan lansia dalam penyusunan kebijakan	persen	18 (2023)	30		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
04.20.02.01 PRO-P: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan							
04.20.02.02 PRO-P: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Lansia dalam Proses Pembangunan							
04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	01 - Meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional	01 - Jumlah perolehan medali pada <i>SEA Games</i>	medali	87 emas/80 perak/109 perunggu (2023)	87 emas/80 perak/109 perunggu	1.306.885,7	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 256 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.21.01 KP: Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul	01 - Terbinanya olahragawan talenta unggul yang berprestasi di tingkat regional dan internasional	01 - Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade	orang	150 (2023)	180	690.414,4	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	100 (2023)	100		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade	orang	182 (2023)	500		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	22 (2023)	120		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.01.01 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Pembinaan Olahraga Prestasi							
04.21.01.02 PRO-P: Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Elite Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 257 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.21.02 KP: Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Internasional	01 - Terbinanya tenaga dan organisasi keolahragaan berstandar nasional dan internasional	01 - Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional	orang	250 (2023)	250	40.364,0	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional	orang	50 (2023)	50		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Jumlah organisasi keolahragaan berbasis olimpiade dan paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan	lembaga	18 (2023)	18		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.02.01 PRO-P: Pengembangan Tenaga Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional							
04.21.02.02 PRO-P: Pengembangan Organisasi Olahraga Berstandar Nasional dan Internasional							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.21.03 KP: Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas	01 - Jumlah lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	lembaga	11 (2023)	11	340.080,6	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade	lembaga	548 (2023)	548		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.03.01 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Olahraga							
04.21.03.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Sarana Olahraga							
04.21.04 KP: Peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompet isi olahraga	01 - Meningkatnya partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga kelas dunia	01 - Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20	236.026,7	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 259 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.21.04.01 PRO-P: Partisipasi dan Penyelenggaraan <i>Event</i> /Festival/Kompetisi Olahraga Nasional							
04.21.04.02 PRO-P: Partisipasi dan Penyelenggaraan <i>Event</i> /Festival/Kompetisi Olahraga Regional dan Internasional							
04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	01 - Meningkatnya budaya berolahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	persen	25,92 (2021)	36,71	14.902,7	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.01 KP: Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas	01 - Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga melalui pengembangan olahraga pendidikan dan penyandang disabilitas	01 - Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	48,76 (2021)	69,06	7.698,6	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	8,24 (2021)	11,67		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.01.01 PRO-P: Pengembangan Olahraga Pendidikan							
04.22.01.02 PRO-P: Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 260 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.22.02 KP: Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Industri	01 - Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dan industri olahraga	01 - Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	persen	100	100	7.204,1	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun	persen	3,29	3,59		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.02.01 PRO-P: Pengembangan Olahraga Masyarakat							
04.22.02.02 PRO-P: Pengembangan Industri Olahraga							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

PRIORITAS NASIONAL 5: MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM
UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05 PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	01 - Rasio PDB industri pengolahan	persen	18,98	20,80	25.750.834,5	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	02 - Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Biaya logistik	persen PDB	14,29 (2022)	13,52		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Pembentukan modal tetap bruto	persen PDB	29,3 (2023)	29,4		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		03 - Ekspor barang dan jasa	persen PDB	21,7 (2023)	21,7		090 - Kementerian Perdagangan
05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan prioritas	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan	persen	4,43	5,50	2.147.817,6	019 - Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.01 KP: Pengembangan Hilirisasi Nikel	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nikel	01 - Kapasitas produksi industri olahan nikel	juta ton/tahun	27,44	33,64	35.710,8	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi nikel	juta rupiah	113.770.000	44.100.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri <i>Stainless Steel</i>							
05.01.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri <i>Nickel Sulfate</i> , Katoda, dan <i>Battery Precursor</i> Berbasis Nikel							
05.01.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri <i>Battery Pack</i> Berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt)							
05.01.01.04 PRO-P: Tata Kelola Industri Nikel serta Ketersediaan Bahan Baku dan Energi							
05.01.01.05 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Nikel							
05.01.01.06 PRO-P: Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.02 KP: Pengembangan Hilirisasi Tembaga	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga	01 - Kapasitas produksi industri olahan tembaga	ribu ton/tahun	375	1.195	13.631,6	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tembaga	juta rupiah	45.720.000	45.933.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.02.01 PRO-P: Tata Kelola Industri Tembaga dan Ketersediaan Bahan Baku							
05.01.02.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Tembaga							
05.01.02.03 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri tembaga							
05.01.03 KP: Pengembangan Hilirisasi Bauksit	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri bauksit	01 - Kapasitas produksi industri olahan bauksit	juta ton/tahun	5,02	6,27	3.050,9	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi bauksit	juta rupiah	10.790.000	11.782.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.03.01 PRO-P: Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Bauksit							
05.01.03.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Bauksit							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.03.03 PRO-P: Dekarbonasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Bauksit							
05.01.03.04 PRO-P: Harmonisasi Kebijakan Industri Bauksit							
05.01.04 KP: Pengembangan Hilirisasi Timah	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri timah	01 - Kapasitas produksi industri olahan timah	ribu ton/tahun	136,9	142,1	7.250,0	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi timah	juta rupiah	500.000	510.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.04.01 PRO-P: Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Timah							
05.01.04.02 PRO-P: Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Timah							
05.01.04.03 PRO-P: Peningkatan Adopsi Teknologi Tinggi untuk Pengolahan Timah							
05.01.04.04 PRO-P: Dekarbonasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Timah							
05.01.04.05 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk dan Daya Saing Produk Timah di Pasar Domestik dan Global							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.05 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit	01 - Produksi kelapa sawit	ton	235.421.494 (2023)	239.646.870	42.664,6	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Ragam produk hilir sawit	produk	193	208		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Produksi bahan baku (CPO dan CPKO)	ton	52.087.006 (2023)	53.021.870		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku	persen	92,0	92,3		019 - Kementerian Perindustrian
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa sawit	juta rupiah	44.090.000	1.489.335		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.05.01 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit dan Kualitas Bahan Baku							
05.01.05.02 PRO-P: <i>Sustainability</i> dan <i>Traceability</i>							
05.01.05.03 PRO-P: Pengembangan Industri <i>Biofuel</i>							
05.01.05.04 PRO-P: Pengembangan Industri Oleokimia							



- 266 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.05.05 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit							
05.01.05.06 PRO-P: <i>Rebranding</i> Produk Sawit Indonesia yang Berkelanjutan							
05.01.06 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa	01 - Produktivitas kelapa	ton/hektar	1,12 (2023)	1,13	117.488,5	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi kelapa	ton	2.836.201 (2023)	2.880.690		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa	juta rupiah	4.492.915	392.210		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Utilisasi industri pengolahan kelapa	persen	40	55		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.06.01 PRO-P: Perbaikan Data Perkelapaan (Budi Daya dan Pengolahan)							
05.01.06.02 PRO-P: Peningkatan Produksi dan Penyebaran Benih Unggul							
05.01.06.03 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Kelapa							



- 267 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.06.04 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk dan Daya Saing Produk							
05.01.06.05 PRO-P: Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa							
05.01.06.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Industri Pengolahan Kelapa							
05.01.06.07 PRO-P: Integrasi Rantai Pasok di Dalam Negeri dan Ekspor							
05.01.06.08 PRO-P: Peningkatan Riset dan Inovasi Kelapa							
05.01.07 KP: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri rumput laut	01 - Volume produksi rumput laut	juta ton	10,81	11,64	45.146,0	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi rumput laut	juta rupiah	230.000	510.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		03 - Utilisasi industri pengolahan rumput laut	persen	49,51	53,76		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.07.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Bahan Baku melalui Peningkatan Produktivitas Budi Daya Rumput Laut							



- 268 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.07.02 PRO-P: Pengembangan Industri dan Hilirisasi Rumput Laut							
05.01.07.03 PRO-P: Penelitian dan Pengembangan Budi Daya Rumput Spesies Baru dan Inovasi Teknologi untuk Diversifikasi Produk Rumput Laut (Karagenan, Agar-agar, Biostimulan, Nutraseutikal, Pakan Ternak)							
05.01.07.04 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan							
05.01.07.05 PRO-P: Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi							
05.01.08 KP: Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan diversifikasi sagu dan singkong	01 - Produksi sagu	ton	393.284 (2023)	393.623	1.225.799,4	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Kapasitas produksi pati sagu	ton/tahun	60.000	100.000		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Produksi ubi kayu	ton	16.764.227 (2023)	17.270.926		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produktivitas sagu	ton/hektar	2,97 (2023)	3,12		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produktivitas ubi kayu	ton/hektar	27,11 (2023)	27,81		018 - Kementerian Pertanian
05.01.08.01 PRO-P: Jaminan Kepastian Bahan Baku Sagu dan Singkong							



- 269 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.08.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir Sagu dan Singkong							
05.01.08.03 PRO-P: Fasilitasi Akses Pasar Produk Olahan Sagu dan Singkong							
05.01.09 KP: Pengembangan Industri Kimia	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah industri kimia	01 - Kapasitas produksi industri kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batu bara	ribu ton	59.783,45	60.234,97	27.686,6	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Pertumbuhan PDB bahan kimia dan barang dari bahan kimia	persen	-0,98 (2023)	6,08		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi minyak bumi	juta rupiah	17.460.000,00	34.453.998,13		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi gas bumi	juta rupiah	16.114.108,34	20.234.887,79		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.09.01 PRO-P: Mega Proyek Industri Kimia Dasar							
05.01.09.02 PRO-P: Revitalisasi Industri Pupuk untuk Mendukung Swasembada Pangan							



- 270 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.09.03 PRO-P: Gasifikasi Batubara							
05.01.09.04 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Kimia							
05.01.09.05 PRO-P: Tata Kelola Kebijakan Pengembangan Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam							
05.01.09.06 PRO-P: Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam							
05.01.09.07 PRO-P: Pengembangan Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam							
05.01.10 KP: Pembangunan Industri Semikonduktor	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri semikonduktor	01 - Pertumbuhan PDB industri barang logam: komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik	Persen	6,16	3	27.706,7	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi pasir silika	juta rupiah	1.290.000	1.419.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.10.01 PRO-P: Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.10.02 PRO-P: Peningkatan SDM Industri Semikonduktor							
05.01.10.03 PRO-P: Riset dan Pengembangan Semikonduktor							
05.01.11 KP: Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri kosmetik dan farmasi	01 - Pertumbuhan PDB industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional	persen	1,85 (2023)	11,48	41.983,6	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	43	50		024 - Kementerian Kesehatan
05.01.11.01 PRO-P: Penguatan Industri Bahan Baku Kosmetik dan Farmasi							
05.01.11.02 PRO-P: Pemanfaatan PBJ Pemerintah untuk Utilisasi Kapasitas Industri Farmasi							
05.01.11.03 PRO-P: Harmonisasi dan Pemenuhan Standar Internasional							
05.01.11.04 PRO-P: Implementasi Perpres Jamu							



- 272 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.11.05 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi							
05.01.11.06 PRO-P: <i>Branding</i> Kosmetik Halal untuk Perluasan Pasar Ekspor							
05.01.11.07 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Kosmetik dan Farmasi							
05.01.12 KP: Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Persentase produksi kendaraan listrik roda empat terhadap total produksi kendaraan roda empat	persen	0,94 (2023)	1,00	12.012,5	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.12.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri di Dalam Negeri (termasuk IKM)							
05.01.12.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Pengisian Daya							
05.01.12.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Industri EV							
05.01.12.04 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Baterai							



- 273 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.13 KP: Pengembangan Industri Dirgantara	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri dirgantara	01 - Utilisasi industri pesawat terbang dan perlengkapannya	persen	50	50	13.055,9	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.13.01 PRO-P: Penguatan Industri Pesawat Terbang, Komponen, dan Rantai Pasok Kedirgantaraan							
05.01.13.02 PRO-P: Peningkatan SDM, Riset dan Inovasi Kedirgantaraan							
05.01.13.03 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kedirgantaraan							
05.01.13.04 PRO-P: Peningkatan Jasa Kedirgantaraan							
05.01.13.05 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan Satelit							
05.01.14 KP: Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan	01 - Terwujudnya peningkatan daya saing industri mesin dan perlengkapan	01 - Pertumbuhan PDB industri mesin dan perlengkapan	persen	-0,42	1,5	46.378,5	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	56	60		024 - Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 274 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.14.01 PRO-P: Pengembangan Industri EBT							
05.01.14.02 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Kesehatan							
05.01.14.03 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Pertanian							
05.01.14.04 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Berat dan Mesin Perkakas							
05.01.14.05 PRO-P: Adopsi Teknologi, <i>Smart Manufacturing</i> , dan Pemanfaatan Riset/Inovasi di Industri Mesin dan Perlengkapan							
05.01.15 KP: Peningkatan Industri Makanan dan Minuman	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil pada industri makanan minuman	01 - Pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman	persen	5,90	5,43	51.788,3	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.15.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok IKM dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku/Penolong di Industri Makanan dan Minuman							
05.01.15.02 PRO-P: Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Makanan dan Minuman							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 275 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.15.03 PRO-P: Peningkatan Adopsi Teknologi dan Pemanfaatan Riset/Inovasi Industri Makanan dan Minuman							
05.01.15.04 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular dan Industri Hijau di Industri Makanan dan Minuman							
05.01.15.05 PRO-P: Fasilitasi Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing Produk Makanan dan Minuman							
05.01.16 KP: Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri tekstil dan produk tekstil	01 - Pertumbuhan PDB industri tekstil dan pakaian jadi	persen	4,26	3,50	331.640,7	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Produktivitas tenaga kerja industri TPT	juta rupiah/orang/tah un	55,29	60,34		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Penyerapan tenaga kerja industri TPT	orang	3.975.905	3.918.787		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.16.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok							
05.01.16.02 PRO-P: Penguatan SDM dan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Kondusif							
05.01.16.03 PRO-P: Penyediaan Energi Bersih dan Terbarukan yang Andal dan Bersaing							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.16.04 PRO-P: Adopsi Teknologi 4.0 dan Teknologi Rendah Emisi							
05.01.16.05 PRO-P: Optimalisasi Riset dan Inovasi							
05.01.16.06 PRO-P: Peningkatan Akses terhadap Lembaga Pembiayaan							
05.01.16.07 PRO-P: Pengembangan <i>Sustainable Textile</i> dan Tekstil Budaya Lokal							
05.01.16.08 PRO-P: Penguatan <i>Branding</i> Produk Tekstil dan Peningkatan Ekspor							
05.01.16.09 PRO-P: Peningkatan Pangsa Pasar di <i>e-Commerce</i> dan Pemanfaatan PBJ							
05.01.16.10 PRO-P: Kebijakan Tata Niaga Impor dan Pemberantasan Impor Ilegal							
05.01.17 KP: Pengembangan Industri Alas Kaki	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas industri alas kaki	01 - Pertumbuhan PDB industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	persen	6,83	3,80	51.506,6	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.17.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok dan Kualitas Bahan Baku							



- 277 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.17.02 PRO-P: Adopsi Teknologi di Industri Alas Kaki untuk Peningkatan Efisiensi							
05.01.17.03 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Alas Kaki							
05.01.17.04 PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Industri Alas Kaki							
05.01.18 KP: Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam dasar besi dan baja	01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	persen	13,34	9,01	46.066,5	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Utilisasi industri logam dasar	persen	76,76	59		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi industri logam dasar besi dan baja	juta rupiah	9.600.000	10.166.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.18.01 PRO-P: Ketersediaan Bahan Baku Industri Logam Dasar yang Berkualitas dan Kompetitif							
05.01.18.02 PRO-P: Kepastian Pasokan dan Harga Energi untuk Industri Logam Dasar							
05.01.18.03 PRO-P: Peningkatan Utilisasi Kapasitas Terpasang Industri Besi-Baja							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 278 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.18.04 PRO-P: Pengembangan Industri <i>Special Steel</i>							
05.01.18.05 PRO-P: Penerapan Dekarbonisasi Industri di Industri Logam Dasar							
05.01.18.06 PRO-P: Optimalisasi Penerapan Standardisasi di Industri Logam Dasar							
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	persen	2,72 (2016)	3,12	7.250,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.19.01 PRO-P: Tata Kelola Kebijakan Jasa Industri							
05.01.19.02 PRO-P: Pendampingan Pelaku Jasa Industri							
05.01.19.03 PRO-P: Fasilitasi Kemitraan Jasa Industri							
05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di	01 - Terwujudnya aglomerasi industri di	01 - Rasio PDRB industri pengolahan di provinsi	persen	51,00	51,30	262.696,4	019 - Kementerian Perindustrian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 279 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	KI/KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru	KI/KEK prioritas terhadap PDB industri pengolahan					
05.02.01 KP: Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KEK Arun Lhokseumawe	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	triliun rupiah	0,55	0,80	2.600,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.01.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.01.02 PRO-P: Perizinan KEK Arun Lhokseumawe							
05.02.01.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.01.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.01.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.02 KP: Pengembangan KEK Sei Mangkei	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK Sei Mangkei	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	triliun rupiah	5,50	6,03	18.991,3	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 280 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.02.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.02.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi, Perumahan, Pengolahan Persampahan/Limbah, Air Bersih)							
05.02.02.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.02.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.02.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM (APBN dan DAK)							
05.02.03 KP: Pengembangan KEK Galang Batang	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK Galang Batang	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	triliun rupiah	2,40	13,80	24.500,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.03.01 PRO-P: Perizinan KI/KEK Galang Batang							
05.02.03.02 PRO-P: Penataan Ruang KI/KEK Galang Batang							
05.02.03.04 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 281 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.03.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Energi							
05.02.03.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.03.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.03.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.05 KP: Pengembangan KEK Gresik	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK JIPE Gresik	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	triliun rupiah	21,70	22,80	40.723,5	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.05.01 PRO-P: Penataan Ruang KEK Gresik							
05.02.05.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.05.04 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.05.05 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							



- 282 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.05.06 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.06 KP: Pengembangan KI Bintan Inti Industrial Estate	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	triliun rupiah	1,65	1,73	3.500,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.06.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.06.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi)							
05.02.06.05 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.06.06 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.06.07 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.07 KP: Pengembangan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan	triliun rupiah	5,99	5,99	13.905,0	019 - Kementerian Perindustrian



- 283 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon					
05.02.07.01 PRO-P: Penataan Ruang KI Krakatau Industrial Estate Cilegon							
05.02.07.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.07.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.07.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.07.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.08 KP: Pengembangan KIT Wilmar	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KIT Wilmar	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KIT Wilmar	triliun rupiah	13,02	13,14	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.08.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.08.02 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							



- 284 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.08.03 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.08.04 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.09 KP: Pengembangan KIT Batang	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KIT Batang	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KIT Batang	triliun rupiah	3,77	4,14	850,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.09.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.09.02 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.09.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.09.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.09.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.10 KP: Pembangunan KI Seafer	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Seafer	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Seafer	triliun rupiah	0,73	0,73	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.10.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.10.02 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Energi							
05.02.10.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.10.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.10.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.10.06 PRO-P: Perizinan KI Seafer							
05.02.11 KP: Pembangunan KI iSentra @Lamongan	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI iSentra @Lamongan	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI iSentra @Lamongan	triliun rupiah	1,18	1,37	0,0	019 - Kementerian Perindustrian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 286 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.11.01 PRO-P: Perizinan KI iSentra @Lamongan							
05.02.11.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.11.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana pendukung (Energi, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.11.04 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.11.05 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.11.06 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.12 KP: Pembangunan KI Ngawi	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Ngawi	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Ngawi	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	270,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.12.01 PRO-P: Perizinan KI Ngawi							
05.02.12.02 PRO-P: Penataan Ruang KI Ngawi							



- 287 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.12.04 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.12.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi dan Air Bersih)							
05.02.12.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.12.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.12.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.13 KP: Pengembangan KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)	01 -Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)	triliun rupiah	2,22	2,31	8.863,6	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.13.01 PRO-P: Penataan Ruang dan Fasilitasi Perizinan untuk Perluasan Kawasan							
05.02.13.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							



- 288 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.13.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.13.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.13.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.13.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.14 KP: Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	triliun rupiah	2,24	4,30	1.317,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.14.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.14.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.14.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							



- 289 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.14.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.14.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.15 KP: Pembangunan KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	triliun rupiah	1,05	1,05	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.15.01 PRO-P: Perizinan KI Indonesia Pomalaa Industry Park							
05.02.15.02 PRO-P: Pengembangan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.15.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan							
05.02.15.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.15.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 290 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.15.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.15.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.16 KP: Pengembangan KI Konawe	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Konawe	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Konawe	triliun rupiah	305,94	305,96	1.500,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.16.01 PRO-P: Penataan Ruang KI Konawe							
05.02.16.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.16.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Kesehatan, Perumahan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.16.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.16.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.16.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							



- 291 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.17 KP: Pengembangan KI Stardust	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Stardust	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Stardust	triliun rupiah	0,33	0,48	1.700,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.17.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.17.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi, Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.17.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.17.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.17.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.18 KP: Pembangunan KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	triliun rupiah	6,99	9,16	19.989,2	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.18.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 292 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.18.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.18.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.18.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.18.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM (APBN dan DAK)							
05.02.19 KP: Pengembangan KI Morowali	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Morowali	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Morowali	triliun rupiah	466,71	467,46	123.986,8	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.19.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.19.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.19.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.19.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							



- 293 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.19.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.20 KP: Pembangunan KI Sumbawa Barat	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Sumbawa Barat	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Sumbawa Barat	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.20.02 PRO-P: Perizinan KI Sumbawa Barat							
05.02.20.03 PRO-P: Penataan Ruang KI Sumbawa Barat							
05.02.20.05 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.20.06 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.20.10 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.20.11 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							



- 294 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.20.12 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.21 KP: Pengembangan KI Pulau Obi	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Pulau Obi	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Pulau Obi	triliun rupiah	0,01	2,53	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.21.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.21.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.21.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.21.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.21.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.22 KP: Pengembangan KI Weda Bay	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Weda Bay	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Weda Bay	triliun rupiah	346,33	349,49	0,0	019 - Kementerian Perindustrian



- 295 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.22.02	PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi						
05.02.22.03	PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)						
05.02.22.07	PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan						
05.02.22.08	PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok						
05.02.22.09	PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM						
05.02.23 KP: Pembangunan KI Buli	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Buli	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Buli	triliun rupiah	0,01	0,21	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.23.01	PRO-P: Pengembangan Konektivitas Simpul Transportasi						
05.02.23.02	PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan						
05.02.23.03	PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.23.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.23.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.23.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.24 KP: Pembangunan KI Fakfak	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Fakfak	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Fakfak	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.24.02 PRO-P: Perizinan KI Fakfak							
05.02.24.03 PRO-P: Penataan Ruang KI Fakfak							
05.02.24.05 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.24.06 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.24.10 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.24.11 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.24.12 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	02 - Menguatnya kinerja layanan konektivitas <i>backbone</i> dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Biaya transportasi logistik terhadap PDB	persen	8,79 (2022)	8,27	22.526.386,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan	hari	1,8	1,7		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.03.01 KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan <i>Backbone</i> , dan Sarana Penunjang Logistik	01 - Menguatnya infrastruktur konektivitas, layanan <i>backbone</i> , dan sarana penunjang logistik	01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan darat selain angkutan rel terhadap PDB	persen	2,66	2,50	22.133.430,8	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB	persen	1,02	0,96		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84		022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.03.01.01 PRO-P: Standarisasi Fasilitas Pelabuhan, Bandara, serta Terminal		04 - Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB	persen	0,04	0,03		022 - Kementerian Perhubungan
		05 - Biaya transportasi logistik pada angkutan sungai danau dan penyeberangan terhadap PDB	persen	0,10	0,09		022 - Kementerian Perhubungan
		06 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	lokasi (kumulatif)	6	7		022 - Kementerian Perhubungan
		07 - Kinerja bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas	box/ship/jam	21 (2023)	31		022 - Kementerian Perhubungan
		08 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi	18 (2023)	22		022 - Kementerian Perhubungan
		09 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama	juta ton	1.391	1.419		022 - Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.03.01.02 PRO-P: Pengembangan Konektivitas Jalan dan Kereta Api Terintegrasi dengan Simpul Utama dan <i>Hinterland</i>							
05.03.01.03 PRO-P: Penyediaan Layanan Angkutan Logistik							
05.03.01.04 PRO-P: Tata Kelola Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Logistik							
05.03.01.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Penunjang Logistik, termasuk Rantai Berpendingin							
05.03.02 KP: Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik	01 - Menguatnya integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik serta dan digitalisasi pada layanan logistik	01 - Waktu penahanan (<i>dwell time</i>) di pelabuhan selama fase impor	hari	2,85	2,90-2,85	5.839,9	015 - Kementerian Keuangan
05.03.02.01 PRO-P: Penguatan Integrasi pada Sistem dan Proses Bisnis Logistik							
05.03.02.02 PRO-P: Percepatan Adopsi Teknologi Digital pada Layanan Penyedia Jasa Logistik							
05.03.03 KP: Peningkatan Daya	01 - Meningkatnya daya saing sumber daya	01 - Indeks peningkatan SDM transportasi		110,10	85,5	387.115,3	022 - Kementerian Perhubungan



- 300 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik	manusia dan penyedia jasa logistik dalam negeri	02 - Pertumbuhan sektor pos logistik	persen	9,16	9,5		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
05.03.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia di Bidang Logistik							
05.03.03.02 PRO-P: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik							
05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	01 - Meningkatnya realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Nilai PMA dan PMDN	triliun rupiah	1.714,2	1.905,6	224.574,1	065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.01 KP: Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi	01 - Meningkatnya investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi	01 - Nilai PMA/PMDN sektor sekunder	triliun rupiah	721,3	855,9	140.677,4	065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		02 - Persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	(persen total nilai PMA/PMDN)	47,5	48,3		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



- 301 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan	triliun rupiah	253,4 (2023)	307,1		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi	triliun rupiah	407,8	521,4		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.01.01	PRO-P: Percepatan Transformasi Digital pada Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha di Sektor Industri dan Non Industri						
05.04.01.02	PRO-P: Penyusunan Informasi Investasi Proyek Prioritas Strategis pada Sektor-Sektor Pendorong Transformasi Ekonomi						
05.04.01.03	PRO-P: Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi dan Hilirisasi yang Terintegrasi						
05.04.01.04	PRO-P: Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Investasi dalam Rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan						
05.04.01.05	PRO-P: Peningkatan Kemitraan Usaha Nasional untuk Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM						
05.04.01.06	PRO-P: Penguatan Transformasi Digital melalui Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi						



- 302 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.04.01.07 PRO-P: Peningkatan Pelayanan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Pusat-Pusat							
05.04.02 KP: Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya Investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global	01 - Nilai PMA berorientasi ekspor	triliun rupiah	115,4 (2023)	171,6	76.028,7	065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		02 - Nilai PMDN berorientasi ekspor	triliun rupiah	41,2 (2023)	60,4		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.02.01 PRO-P: Percepatan Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha untuk Investasi Luar Negeri (FDI/PMA) Strategis							
05.04.02.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitas <i>Outward Investment</i> dan Penguatan Kerjasama Penanaman Modal untuk Pengembangan Rantai Nilai Global							
05.04.02.03 PRO-P: Penguatan Promosi Penanaman Modal untuk Mendorong Hilirisasi dan Industrialisasi di Pusat-Pusat Pertumbuhan							
05.04.03 KP: Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik	01 - Meningkatnya investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik	01 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	persen	52,2	52,1	7.868,0	065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal



- 303 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.04.03.01 PRO-P: Percepatan Strategi dan Rencana Proyek Penanaman Modal dalam Rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan							
05.04.03.02 PRO-P: Peningkatan Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN pada Forum Bisnis dan Investasi Internasional							
05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	01 - Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia	Persen	1,11 (2023)	1,12	589.360,4	090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor jasa Indonesia	miliar USD	23,10 (2022)	29,93		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	0,81 (2022)	0,99		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah	triliun rupiah	1.622 (2022)	1.803		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.01 KP: Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik,	01 - Meningkatnya nilai pembelian perdagangan antar wilayah per pulau	01 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sumatera	triliun rupiah	205 (2022)	217	276.020,7	090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Jawa	triliun rupiah	1.059 (2022)	1.158		090 - Kementerian Perdagangan



- 304 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
Antardaerah, dan dengan Global		03 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Bali-Nusra	triliun rupiah	51 (2022)	93		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Kalimantan	triliun rupiah	121 (2022)	144		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sulawesi	triliun rupiah	135 (2022)	138		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Papua-Maluku	triliun rupiah	51 (2022)	55		090 - Kementerian Perdagangan
	02 - Meningkatnya kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Provinsi per pulau	01 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera	persen	11,63 (2022)	12,10		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa	persen	12,48 (2022)	13,31		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra	persen	9,23 (2022)	10,06		090 - Kementerian Perdagangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 305 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan	persen	10,12 (2022)	10,65		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi	persen	10,78 (2022)	11,98		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku	persen	10,63 (2022)	11,95		090 - Kementerian Perdagangan
	03 - Meningkatnya nilai ekspor barang per pulau	01 - Nilai ekspor barang di Pulau Sumatera	miliar rupiah	1.159.400 (2022)	1.352.500		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor barang di Pulau Jawa	miliar rupiah	1.542.700 (2022)	1.953.800		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor barang di Pulau Bali-Nusra	miliar rupiah	51.700 (2022)	76.200		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai ekspor barang di Pulau Kalimantan	miliar rupiah	961.500 (2022)	1.127.400		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai ekspor barang di Pulau Sulawesi	miliar rupiah	429.700 (2022)	551.400		090 - Kementerian Perdagangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	04 - Meningkatnya diversifikasi ekspor per pulau	06 - Nilai ekspor barang di Pulau Papua-Maluku	miliar rupiah	257.700 (2022)	321.200		090 - Kementerian Perdagangan
		01 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sumatera		0,42 (2022)	0,30		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Jawa		0,09 (2022)	0,05		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Bali-Nusra		0,37 (2022)	0,27		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Kalimantan		0,60 (2022)	0,45		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sulawesi		0,53 (2022)	0,39		090 - Kementerian Perdagangan
	05 - Meningkatnya jumlah usaha <i>e-commerce</i> per pulau	06 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Papua- Maluku		0,74 (2022)	0,60		090 - Kementerian Perdagangan
		01 - Jumlah usaha <i>e- commerce</i> di Pulau Sumatera	unit kumulatif	330.700 (2022)	482.800		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Jumlah usaha <i>e- commerce</i> di Pulau Jawa	unit kumulatif	2.288.300 (2022)	3.340.800		090 - Kementerian Perdagangan



- 307 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah usaha <i>e-commerce</i> di Pulau Bali-Nusra	unit kumulatif	125.300 (2022)	183.000		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Jumlah usaha <i>e-commerce</i> di Pulau Kalimantan	unit kumulatif	132.000 (2022)	192.700		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Jumlah usaha <i>e-commerce</i> di Pulau Sulawesi	unit kumulatif	109.700 (2022)	160.100		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Jumlah usaha <i>e-commerce</i> di Pulau Papua-Maluku	unit kumulatif	10.100 (2022)	14.700		090 - Kementerian Perdagangan
	06 - Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	01 - Koefisien variasi (<i>coefficient of variation</i>) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	persen	- (indikator baru)	20-25		125 - Badan Pangan Nasional
05.05.01.001 PRO-P: Integrasi Informasi Keunggulan Daerah serta Data Permintaan dan Penawaran Setiap Daerah							
05.05.01.002 PRO-P: Promosi Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah							



- 308 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.01.003	PRO-P: Kerja sama Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah						
05.05.01.004	PRO-P: Peningkatan Kualitas SDM Daerah untuk Mendorong Ekspor						
05.05.01.005	PRO-P: Stabilisasi Harga Bahan Pangan dengan Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Antardaerah						
05.05.01.006	PRO-P: Pelatihan Ekspor dan Adaptasi Bisnis <i>E-Commerce</i> bagi Pelaku UMKM di Daerah						
05.05.01.007	PRO-P: Pendampingan Pelaku Usaha di Daerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik, Antardaerah dan Ekspor						
05.05.01.008	PRO-P: Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah						
05.05.01.009	PRO-P: Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Digitalisasi Perdagangan						
05.05.02 KP: Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi di pasar global	01 - Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia	persen	22,67 (2022)	24,98	73.456,5	090 - Kementerian Perdagangan



- 309 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia	persen	0,65 (2022)	0,72		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (<i>environmental goods</i>)	miliar USD	8,59 (2022)	17,09		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	persen	11,95	5,6		019 - Kementerian Perindustrian
05.05.02.001 PRO-P: Pengembangan Pasar Ekspor Indonesia							
05.05.02.002 PRO-P: Promosi Ekspor Produk Teknologi Menengah Tinggi							
05.05.02.003 PRO-P: Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Perlindungan HKI untuk Mendorong Ekspor Barang dan Jasa							
05.05.02.004 PRO-P: Pendampingan dalam Rangka Mendorong Perdagangan Hijau yang Berkelanjutan							



- 310 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.02.005 PRO-P: Optimalisasi <i>Market Intelligence</i> untuk Produk Ekspor Barang dan Jasa							
05.05.02.006 PRO-P: Pengamanan Pasar Ekspor							
05.05.03 KP: Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi	01 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia	persen	1,35 (2022)	1,43	25.412,4	090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	pelaku usaha (kumulatif)	20.533 (2022)	22.354		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Persentase usaha <i>e-commerce</i> yang melakukan ekspor	Persen	0,85 (2022)	1,06		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.03.001 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Eksportir							
05.05.03.002 PRO-P: Promosi Ekspor Produk UMKM dan Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi							
05.05.03.003 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)							



- 311 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.03.004	PRO-P: Integrasi Informasi dan Mekanisme Ekspor						
05.05.03.005	PRO-P: <i>Business Matching</i> untuk Mendorong Kemitraan dalam Rantai Nilai Global						
05.05.03.006	PRO-P: Fasilitasi Pembiayaan dan Asuransi Perdagangan Internasional						
05.05.04 KP: Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk pertanian, perikanan dan industri berbasis SDA di pasar global	01 - Nilai Ekspor hasil perikanan	miliar USD	5,63 (2023)	6,25	36.279,6	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia	persen	2,96 (2022)	3,28		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia	persen	2,38 (2022)	2,59		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		0,294 (2023)	0,286		019 - Kementerian Perindustrian
		05 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	produk	179 (2022)	208		019 - Kementerian Perindustrian



- 312 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Nilai ekspor rumput laut	juta USD	433,72 (2023)	574,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		07 - Proporsi ekspor produk olahan rumput laut	persen	34,31	46,5		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
05.05.04.001 PRO-P: Kebijakan dan Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA							
05.05.04.002 PRO-P: Promosi Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA							
05.05.04.003 PRO-P: Kerja Sama untuk Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA							
05.05.04.004 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Perdagangan di Kawasan Perbatasan							
05.05.05 KP: Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya ekspor jasa dan produk kreatif	01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi	miliar USD	2,37 (2022)	2,82	21.812,0	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Nilai ekspor jasa bisnis lainnya	miliar USD	5,93 (2022)	8,46		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	miliar USD	23,96 (2023)	26,44		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif



- 313 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Nilai perdagangan komoditas digital	miliar USD	9,27 (2022)	10,86		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.05.001	PRO-P: Perluasan Akses Informasi Pasar Potensial dan <i>Buyer</i> untuk Ekspor Jasa dan Produk Kreatif						
05.05.05.002	PRO-P: Koordinasi Kebijakan dan Penyediaan Data Perdagangan Sektor Jasa dan Produk Kreatif yang Terintegrasi						
05.05.05.003	PRO-P: Perundingan Perdagangan dan Kerja sama Perdagangan Jasa						
05.05.05.004	PRO-P: Penguatan SDM dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa						
05.05.05.005	PRO-P: Promosi Ekspor Jasa dan Produk Kreatif						
05.05.06	01 - Meningkatnya partisipasi sektor elektronik Indonesia dalam rantai nilai regional di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara	01 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	42,00 (2022)	35,00	19.557,6	019 - Kementerian Perindustrian
KP: Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk <i>Electric Vehicle</i> (EV)	dan sektor otomotif Indonesia termasuk <i>electric vehicle</i> (EV) dalam rantai nilai global	02 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk <i>electric vehicle</i> (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	23,00 (2022)	19,00		019 - Kementerian Perindustrian



- 314 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.06.001 PRO-P: Sinkronisasi SNI Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia dengan Standar Internasional							
05.05.06.002 PRO-P: Kerja Sama untuk Penurunan Hambatan Tarif dan Non-Tarif Produk Ekspor Indonesia							
05.05.06.003 PRO-P: Pemantauan NTM yang Diterapkan Indonesia untuk Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia							
05.05.06.004 PRO-P: Penyelenggaraan Forum Bisnis dan <i>Business Matching</i> bagi Pelaku Ekspor Indonesia untuk Masuk dalam Rantai Pasok Global							
05.05.06.005 PRO-P: Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor yang Terintegrasi							
05.05.07 KP: Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya pemanfaatan atau utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	01 - Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP	miliar USD	172,8 (2023)	184,9	30.273,2	090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN	miliar USD	53,1 (2023)	56,8		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam rangka utilisasi Indonesia- EFTA CEPA	miliar USD	2,8 (2023)	3,0		090 - Kementerian Perdagangan



- 315 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Nilai ekspor barang ke Australia dalam rangka utilisasi IA-CEPA	miliar USD	3,2 (2023)	3,4		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai ekspor barang ke Jepang dalam rangka utilisasi IJEPA	miliar USD	20,8 (2023)	22,2		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Nilai ekspor barang ke UAE dalam rangka utilisasi IUAE-CEPA	miliar USD	2,6 (2023)	2,8		090 - Kementerian Perdagangan
		07 - Nilai ekspor barang ke Korea dalam rangka utilisasi IK-CEPA	miliar USD	10,3 (2023)	11,0		090 - Kementerian Perdagangan
		08 - Nilai ekspor barang ke Chile dalam rangka utilisasi Indonesia-Chile CEPA	miliar USD	0,31 (2023)	0,33		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.07.001	PRO-P: Sosialisasi dan Penyediaan Informasi Digital Terkait Aturan Perdagangan, Peluang Bisnis, dan Lainnya						
05.05.07.002	PRO-P: Peninjauan dan Sinkronisasi Regulasi Perdagangan Dalam Negeri untuk Mengoptimalkan Utilisasi FTA/CEPA						



- 316 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.07.003 PRO-P: Pengembangan <i>Exporter Tools</i> untuk Meningkatkan Kapasitas Eksportir di antaranya Informasi Pasar, Persiapan Ekspor, Strategi Pemasaran, Logistik, Akses - Manajemen Keuangan, dan Manajemen Risiko							
05.05.07.004 PRO-P: Peningkatan Jumlah dan Kapasitas dari Perwakilan Perdagangan							
05.05.07.005 PRO-P: Peningkatan Kesepakatan dan Proses Ratifikasi Perundingan Perdagangan							
05.05.08 KP: Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	01 - Meningkatnya daya saing produk Indonesia terstandarisasi	01 - Persentase produk ekspor Indonesia yang ber- SNI	persen	3,109 (2023)	3,3	106.548,5	084 - Badan Standardisasi Nasional
		02 - Persentase produk ber- SNI	persen	10	10		084 - Badan Standardisasi Nasional
		04 - Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat	01 - Indeks Persaingan Usaha	4,87/7,00 (2022)	5,35/7,00		108 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha
		05 - Meningkatnya keberdayaan konsumen	01 - Indeks Keberdayaan Konsumen	53,23 (2022)	63		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.08.001 PRO-P: Pengembangan Standar Nasional Produk dalam rangka Pengamanan Pasar Domestik dan Pemenuhan Standar Pasar Ekspor							



- 317 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.08.002 PRO-P: Penguatan Akreditasi, Kalibrasi, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi							
05.05.08.003 PRO-P: Percepatan Penerapan dan Pemberlakuan secara wajib Standar Produk dan Tata Kelola Ekosistem Standarisasi							
05.05.08.004 PRO-P: Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat							
05.05.08.005 PRO-P: Pemberdayaan Konsumen							
05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Danantara	01 - Meningkatnya investasi strategis	01 - Jumlah nilai investasi strategis	triliun rupiah	- (indikator baru)	100	0,0	Danantara
05.06.01 KP: Pengelolaan Portofolio dan Tujuan Investasi Strategis	01 - Optimalisasi portofolio investasi strategis	01 - <i>Return on Investment</i> (ROI)	persen	- (indikator baru)	6,0	0,0	Danantara
05.06.01.01 PRO-P: Portofolio							
05.06.01.02 PRO-P: Tujuan Investasi							



Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.06.02 KP: Peningkatan Investasi Strategis pada Sektor Prioritas	01 - Meningkatnya investasi strategis pada sektor prioritas	01 - Jumlah investasi strategis sektor prioritas yang mencapai <i>financial close</i>	proyek	- (indikator baru)	2	0,0	Danantara
05.06.02.01 PRO-P: Pertambangan, Energi, Pangan dan air							
05.06.02.02 PRO-P: Infrastruktur dan Perumahan							
05.06.02.03 PRO-P: Teknologi, Industri Strategis dan Kesehatan							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.



- 319 -

PRIORITAS NASIONAL 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI,
DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06 PN: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01 - Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	01 - Proporsi penduduk kelas menengah	persen	17,13	17,50	206.321.902,9	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Tingkat kemiskinan	persen	8,57	7,0–8,0		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		03 - Tingkat kemiskinan ekstrem	persen	1,47	0 ^{a)}		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		04 - Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	persen	9,07 (2023)	10		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
	02 - Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persen	65,25	67,00		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 320 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.01 PP: Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi	03 - Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Persentase desa mandiri	persen	22,85	23,29		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	04 - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	01 - Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional	persen	56,56 (2022)	57,29		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	01 - Tersedianya data dalam satu sistem yang efisien, tepat, dan efektif untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan	01 - Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala	persen	30	40	196.842,5	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	01 - Terbangunnya sistem interoperabilitas data antar kementerian/lembaga	01 - Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek	persen	7	40	105.660,5	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



- 321 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.01.01.001 PRO-P: Pengelolaan Sistem Data							
06.01.01.002 PRO-P: Monitoring dan Pemutakhiran Data							
06.01.01.003 PRO-P: Pengelolaan Data dan Regulasi							
06.01.01.004 PRO-P: Integrasi Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan Data Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati							
06.01.02 KP: Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	01 - Terselenggaranya pemanfaatan data yang optimal untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional	01 - Persentase K/L yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT	persen	30	60	91.182,0	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT	persen	30	60		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
06.01.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Data Sektoral							
06.01.02.02 PRO-P: Penataan Sumber Daya Manusia							



- 322 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.01.02.03 PRO-P: Integrasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati							
06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	01 - Terwujudnya integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif dalam menghadapi bencana alam, bencana sosial, serta dampak perubahan iklim	01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	persen	64,75 (2023)	68	157.977.493,2	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	persen	29,77 (semester I)	32,15		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		03 - Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	keluarga per tahun	- (indikator baru)	1,5 juta		027 - Kementerian Sosial
06.02.01 KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	01 - Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi	01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	persen	60 (2023)	65	155.303.007,5	027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	persen	7 (2023)	8		027 - Kementerian Sosial



- 323 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera	keluarga per tahun	10 ribu	400 ribu		027 - Kementerian Sosial
06.02.01.01 PRO-P: Bantuan Keluarga, Pendidikan dan Kesehatan							
06.02.01.02 PRO-P: Bantuan Energi dan Pangan							
06.02.01.03 PRO-P: Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan							
06.02.02 KP: Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terlaksananya reformasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	10,63 (semester I)	14,01	21.888,9	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	52,39 (semester I)	54,18		026 - Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat jaminan sosial secara inklusif	rekomendasi kebijakan	3 (2023)	3		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
06.02.02.01 PRO-P: Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara Inklusif							
06.02.02.02 PRO-P: Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional							
06.02.03 KP: Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy)	01 - Meluasnya pemberian layanan keperawatan	01 - Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	persen	25	28	2.652.596,7	027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase tenaga SDM kesejahteraan sosial/pendamping perawatan yang tersertifikasi	persen	37	40		027 - Kementerian Sosial
06.02.03.01 PRO-P: Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain							
06.02.03.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat							



- 325 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	01 - Terciptanya lapangan kerja dari peningkatan wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan	01 - Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	persen	73,8	74,1	1.827.987,4	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	persen	4,96	14,98		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
06.03.01 KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	01 - Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	01 - Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap	persen	3,90 (2023)	4,10	760.772,2	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
06.03.01.01 PRO-P: Penatakelolaan Kartu Usaha							
06.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing							
06.03.02 KP: Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	01 - Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif	01 - Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	jiwa per tahun	- (indikator baru)	1.000.000	731.100,8	027 - Kementerian Sosial



- 326 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.03.02.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kerja							
06.03.02.02 PRO-P: Penguatan Kewirausahaan Afirmatif							
06.03.03 KP: Reforma Agraria	01 - Terlaksananya reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma Agraria	01 - Persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan	persen	46,16	40	336.114,3	056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		02 - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria	persen	46,64	42		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		03 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah untuk Petani/Nelayan		0,0057	0,0006		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
06.03.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Penataan Aset Reforma Agraria							
06.03.03.02 PRO-P: Pelaksanaan Penataan Akses (Pemberdayaan Masyarakat) Reforma Agraria							



- 327 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya peran wilayah metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional	persen	44,13 (2022)	44,35	10.058.628,7	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan	skor	44,61 (2023)	44,81		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya peran perkotaan non-wilayah metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB perkotaan Non- Wilayah Metropolitan terhadap PDB nasional	persen	6,97 (2022)	7,47		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	skor	48,36 (2023)	48,66		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.04.01 KP: Pembangunan Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatnya peran wilayah metropolitan KBI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan KBI terhadap PDB nasional	persen	40,75 (2022)	40,93	9.102.213,5	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	skor	45,86 (2023)	46,16		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



- 328 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatkan peran wilayah metropolitan KTI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan KTI terhadap PDB nasional	persen	3,38 (2022)	3,42		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	skor	42,74 (2023)	43,04		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.04.01.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan							
06.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang							
06.04.01.03 PRO-P: Pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta							
06.04.01.04 PRO-P: Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung							
06.04.01.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang							
06.04.01.06 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya							
06.04.01.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar							



- 329 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.04.01.08 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin							
06.04.01.09 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar							
06.04.01.10 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado							
06.04.02 KP: Pembangunan Perkotaan Non- Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatnya peran perkotaan non-wilayah metropolitan KBI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB perkotaan Non- Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB nasional	persen	3,83 (2022)	3,89	956.415,2	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	skor	49,81 (2023)	50,11		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya peran perkotaan non-wilayah Metropolitan KTI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB perkotaan Non- Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB nasional	persen	3,15 (2022)	3,57		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	skor	47,20 (2023)	47,50		145 - Kementerian Pekerjaan Umum



- 330 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.04.02.01 PRO-P: Penyiapan Perkotaan yang Berpotensi Menjadi Wilayah Metropolitan							
06.04.02.02 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar							
06.04.02.03 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang							
06.04.02.04 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil							
06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	01 - Mengembangkan kota berkelanjutan di dunia	01 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara		47,79	48,29	18.127.753,6	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	02 - Menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan	persen	5,4	5,8		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	03 - Mewujudkan simbol identitas nasional	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara		61,35	62,85		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara



- 331 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.05.01 KP: Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	01 - Terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya	01 - Luas area kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	ha	715,32	800–850	17.820.869,6	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	20		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		04 - Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	23	50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		05 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara		0,65	0,74		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara



- 332 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	01 - Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	orang	- (indikator baru)	1.700–4.100		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	25		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
06.05.01.01 PRO-P: Perencanaan dan Penataan Ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya							
06.05.01.02 PRO-P: Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.03 PRO-P: Pembangunan Hunian/Rumah Tangga Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.04 PRO-P: Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.05 PRO-P: Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.06 PRO-P: Pemindahan ASN/Hankam ke Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.07 PRO-P: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Cerdas Ibu Kota Nusantara							



- 333 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.05.02 KP: Pembangunan Sosial, <i>Superhub</i> Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan Ibu Kota Nusantara	01 - Terwujudnya pengembangan <i>superhub</i> ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar	01 - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah di Ibu Kota Nusantara	persen	1,58	1,88	306.884,0	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Realisasi nilai investasi sektor swasta di Ibu Kota Nusantara	triliun rupiah	58,41	60		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Rencana klaster <i>superhub</i> ekonomi IKN yang disiapkan	klaster	1	1		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	02 - Terwujudnya pembangunan sosial dan sumberdaya manusia di Ibu Kota Nusantara	01 - Persentase masyarakat sejahtera	persen	8,91	9,50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara	persen	55	63		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	persen	65	70		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara



- 334 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara	01 - Persentase pengelolaan kawasan lindung Ibu Kota Nusantara	persen	17	18		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara		70,72	71,22		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara		104,00	100,80		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		04 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan	ha	- (indikator baru)	50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
06.05.02.01 PRO-P: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.02 PRO-P: Peningkatan Investasi di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.03 PRO-P: Pengembangan <i>Superhub</i> Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar							



- 335 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.05.02.04 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.05 PRO-P: Pembangunan Kesehatan di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.06 PRO-P: Pembangunan Pendidikan di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.07 PRO-P: Penyelenggaraan Kawasan Lindung dan Kehutanan Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.08 PRO-P: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.09 PRO-P: Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara							
06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	01 - Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	unit per tahun	769.078	314.124	2.179.313,5	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



- 336 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.06.01 KP: Fasilitas Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	01 - Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	01 - Jumlah unit rumah baru yang terbangun	unit per tahun	4.311	476	1.005.584,5	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	unit per tahun	150.202	38.504		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		03 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	unit per tahun	43.008	0		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.01.01 PRO-P: Fasilitas Pembangunan Rumah Baru							
06.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Perumahan dan Permukiman							
06.06.01.03 PRO-P: Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah							
06.06.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan pada Perumahan Tapak							



- 337 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.06.02 KP: Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu	01 - Meningkatnya perumahan publik vertikal yang disediakan secara terpadu	01 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	unit per tahun	1.320	1.944	945.761,9	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	unit per tahun	- (indikator baru)	0		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.02.01 PRO-P: Penyediaan Hunian Publik Vertikal Milik							
06.06.02.02 PRO-P: Penyediaan Hunian Publik Vertikal Sewa							
06.06.02.03 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan di Hunian Publik Vertikal							
06.06.03 KP: Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	01 - Meningkatnya pelaksanaan bantuan kemudahan dan fasilitasi pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	rumah tangga per tahun	570.237	273.200	16.000,0	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Perumahan							



- 338 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.06.03.02 PRO-P: Fasilitas dan Penyaluran Subsidi/ Bantuan Pembiayaan Perumahan							
06.06.03.03 PRO-P: Fasilitas Kerja sama Pembiayaan Perumahan dengan Berbagai Instansi							
06.06.03.04 PRO-P: Penyiapan Proyek Kerja sama dan Investasi Perumahan							
06.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Perumahan	01 - Terciptanya ekosistem perumahan yang mendukung tersedianya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	kab/kota	514	514	100.836,2	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	rekomendasi kebijakan	1	1		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.04.01 PRO-P: Implementasi Standar Keandalan Bangunan							
06.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kapasitas Pelaku Pembangunan Perumahan							
06.06.04.03 PRO-P: Perlindungan Konsumen Perumahan							



- 339 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.06.04.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Hunian Publik							
06.06.04.05 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Hunian Privat							
06.06.05 KP: Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu	01 - Meningkatnya permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	01 - Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	ha per tahun	198,98	177,84	111.130,9	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.05.01 PRO-P: Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kota							
06.06.05.02 PRO-P: Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kawasan							
06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	01 - Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Persentase desa mandiri KTI dan KBI	persen	KTI: 7,42 KBI: 15,42	KTI: 7,74 KBI: 15,55	15.953.884,0	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



- 340 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.01 KP: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	01 - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	01 - Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman	persen	18,9 (2023)	22	2.993.759,8	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman	persen	4,77	6		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	25,99	26,12		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		04 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24,62	24,81		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.07.01.01 PRO-P: Penguatan Pembangunan Layanan Dasar Kesehatan Desa							
06.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Utilitas Dasar Desa							
06.07.01.03 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Desa							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 341 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.02 KP: Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Desa	01 - Meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui transformasi aktivitas dan pemberdayaan ekonomi desa	01 - Persentase bagi hasil BUMDes terhadap PADes	persen	3,97	4,02	123.976,1	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	02 - Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai embrio pusat pertumbuhan lokal	01 - Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status berdaya saing	kawasan	3	4		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	03 - Memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap kondisi sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan desa	01 - Persentase desa berketahanan iklim	persen	33,73	34,73		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
06.07.02.01 PRO-P: Transformasi Ekonomi Lokal Desa							
06.07.02.02 PRO-P: Transformasi Ketahanan Sosial Desa							



- 342 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.02.03 PRO-P: Transformasi Pelestarian Lingkungan Desa							
06.07.02.04 PRO-P: Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan							
06.07.03 KP: Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif	01 - Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif	01 - Persentase desa yang menerapkan layanan berbasis digital	persen	74 (2022)	76	1.505.423,5	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		02 - Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	desa	- (indikator baru)	90		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	desa	- (indikator baru)	150		010 - Kementerian Dalam Negeri
06.07.03.01 PRO-P: Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa							
06.07.03.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Desa							
06.07.03.03 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Data Desa							



Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.04 KP: Pembangunan Daerah Tertinggal	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal	01 - Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	persen	- (indikator baru)	16,67	7.048.255,6	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
06.07.04.01 PRO-P: Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal							
06.07.04.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal							
06.07.04.03 PRO-P: Peningkatan Konektivitas di Daerah Tertinggal							
06.07.04.04 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Dasar di Daerah Tertinggal							
06.07.04.05 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal							
06.07.04.06 PRO-P: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna di Daerah Tertinggal							
06.07.04.07 PRO-P: Pembangunan Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal							



- 344 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.05 KP: Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	01 - Menjadi beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah	01 - Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas	persen	21,46	19,87	890.144,1	111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		02 - Persentase desa maju dan mandiri di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan	persen	44,38	45,56		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		03 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan		0,52	0,56		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		04 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas		0,64	0,68		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
06.07.05.01 PRO-P: Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan							
06.07.05.02 PRO-P: Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 345 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.05.03 PRO-P: Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Perbatasan							
06.07.05.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan							
06.07.06 KP: Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	01 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal	01 - Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi	persen	52,88	55,49	1.846.602,7	152 - Kementerian Transmigrasi
		02 - Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		0,425	0,450		152 - Kementerian Transmigrasi
		03 - Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi	persen	0,90	1,10		152 - Kementerian Transmigrasi
		04 - Persentase dukungan kegiatan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/badan usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi	persen	37,5	40		152 - Kementerian Transmigrasi
06.07.06.01 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Aksesibilitas Logistik							



- 346 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.06.02 PRO-P: Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi							
06.07.06.03 PRO-P: Redistribusi Aset (Tanah) Transmigrasi							
06.07.06.04 PRO-P: Penataan Persebaran Penduduk dan Penyediaan Tenaga Terampil							
06.07.07 KP: Tata Kelola Pendampingan/ Penyuluhan	01 - Meningkatnya kapasitas pendamping pembangunan	01 - Jumlah kementerian/lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan	kementerian/ lembaga	4	4	1.545.722,2	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
06.07.07.01 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Keluarga Berencana							
06.07.07.02 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Pertanian							
06.07.07.03 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kehutanan							
06.07.07.04 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Sosial							



- 347 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.07.05 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kesehatan							
06.07.07.06 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kewirausahaan							
06.07.07.07 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Perikanan							

Keterangan: a) Target menggunakan US\$ 1,90 PPP sedangkan apabila menggunakan US\$ 2,15 PPP target tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2025 adalah 0,5–1 persen.

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.



- 348 -

PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07 PN: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	01 - Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,68 (2023)	0,69	12.924.554,7	130 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
		02 - Indeks Persepsi Korupsi		37	38		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		03 - Indeks Integritas Partai Politik		62,83	63,00–64,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	02 - Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Nasional ^{a)}		69,98	71,38		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		93	93,5		011 - Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 349 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	01 - Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	poin	1,73	1,70		066 - Badan Narkotika Nasional
	04 - Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	01 - <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMN	persen	3,14 (2023)	3,21		041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	05 - Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	01 - Rasio pendapatan negara terhadap PDB	persen	12,84	12,36		015 - Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 350 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	06 - Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Tingkat Inflasi	persen	1,57	2,5±1,0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	01 - Terwujudnya partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional	01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi		64,98	65,00–66,99	557.311,9	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan		61,42	61,50–63,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		03 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik		61,85	62,00–63,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		04 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal		61,11	61,50–63,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		05 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen		67,47	68,00–69,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	02 - Terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas	01 - Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu		61,72	64,85		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



- 351 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Terwujudnya penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat	01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	daerah	- (indikator baru)	150		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.01 KP: Penguatan Tata Kelola Partai Politik dan Pendidikan Politik	01 - Terwujudnya kelembagaan partai politik yang berbasis nilai serta pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel	01 - Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri	persen	100 (2023)	100	137.889,1	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik	persen	100	100		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.01.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Partai Politik							



- 352 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.01.01.03 PRO-P: Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Politik untuk Kader Partai Politik dan Masyarakat							
07.01.02 KP: Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	01 - Terselenggaranya pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	01 - Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	persen	6,67	10	171.113,2	010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional							
07.01.02.02 PRO-P: Peningkatan Kuantitas Layanan Administrasi Kependudukan							
07.01.03 KP: Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	01 - Terwujudnya sistem pemilu yang transformatif	01 - Persentase kepuasan masyarakat atas kinerja KPU	persen	- (indikator baru)	72	163.189,6	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu ^{b)}		76,96	0 (tidak dihitung)		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
07.01.03.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu							
07.01.03.03 PRO-P: Perbaikan Regulasi Kepemiluan							
07.01.04 KP: Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu	01 - Terwujudnya sistem pemilu yang inklusif dan partisipatif	01 - Persentase daftar pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif	persen	- (indikator baru)	95	85.120,0	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 - Persentase kualitas pengawasan data pemilih berkelanjutan	persen	- (indikator baru)	80		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
07.01.04.01 PRO-P: Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih							
07.01.04.02 PRO-P: Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih							
07.02 PP: Reformasi Hukum	01 - Terwujudnya regulasi yang adaptif dan taat azas, akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patut hukum	01 - Indeks Materi Hukum		0,60 (2023)	0,51	384.379,1	135 - Kementerian Hukum
		02 - Indeks Budaya Hukum		0,81 (2023)	0,83		135 - Kementerian Hukum



- 354 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.02.01 KP: Mendirikan Pusat Legislasi Nasional	01 - Terwujudnya sistem regulasi yang adaptif dan taat asas	01 - Indeks Kualitas Peraturan Perundang- undangan		3,70	3,26	6.921,8	135 - Kementerian Hukum
07.02.01.01 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Regulasi							
07.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Regulasi							
07.02.02 KP: Transformasi Akses terhadap Keadilan	01 - Terwujudnya layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan	01 - Indeks Perlindungan Saksi dan Korban		- (indikator baru)	81	179.879,5	123 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		02 - Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi	persen	84,4 (2023)	88,2		135 - Kementerian Hukum
07.02.02.01 PRO-P: Pemenuhan Layanan Akses terhadap Keadilan							
07.02.02.02 PRO-P: Penguatan Kebijakan Transformasi Akses terhadap Keadilan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.02.03 KP: Penguatan Budaya Hukum	01 - Terwujudnya program literasi hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat yang inklusif	01 - Tingkat kepatutan hukum masyarakat		0,67 (2023)	0,72	106.763,8	135 - Kementerian Hukum
		02 - Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum		0,95 (2023)	0,94		135 - Kementerian Hukum
07.02.03.01 PRO-P: Penguatan Pemberdayaan Hukum Masyarakat							
07.02.03.02 PRO-P: Penguatan Budaya Hukum Penyelenggara Negara							
07.02.04 KP: Pembangunan Hukum Sektor Strategis	01 - Memperkuat pembangunan sektor strategis yang berlandaskan hukum	01 - Persentase penyelesaian kasus pertanahan	persen	58,03	50	90.813,9	056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
07.02.04.01 PRO-P: Penegakan dan Pelayanan Hukum							
07.02.04.02 PRO-P: Penyusunan Kebijakan							
07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01 - Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Indeks Kelembagaan Hukum		0,73 (2023)	0,76	107.309,7	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Penegakan Hukum		0,64 (2023)	0,73		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan



- 356 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.03.01 KP: Penguatan Kelembagaan Hukum	01 - Terwujudnya lembaga penegak hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum		0,73 (2023)	0,69	40.880,9	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.03.01.01 PRO-P: Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman							
07.03.01.02 PRO-P: Penguatan Lembaga Hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan, dan Pembangunan Hukum							
07.03.02 KP: Penerapan dan Penegakan Hukum	01 - Terwujudnya penegakan hukum yang adil, tidak tebang-pilih, transparan, berintegritas, dan profesional	01 - Tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum	persen	56,7 (2023)	58,7	66.428,8	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata	persen	54	35		005 - Mahkamah Agung
07.03.02.01 PRO-P: Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif							
07.03.02.02 PRO-P: Penerapan dan Penegakan Hukum Perdata yang Berkepastian							



- 357 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan <i>Advocaat</i> <i>Generaal</i>	01 - Terwujudnya efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan RI dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara	01 - Persentase peningkatan pengendalian perkara	persen	- (indikator baru)	61	517.174,1	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		02 - Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan	persen	- (indikator baru)	60		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.01 KP: Penguatan kelembagaan Kejaksaan	01 - Terwujudnya sistem penuntutan yang integratif	01 - Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	persen	- (indikator baru)	61	499.219,9	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.01.01 PRO-P: Pengendali Perkara							
07.04.01.02 PRO-P: <i>Advocaat Generaal</i>							
07.04.02 KP: Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa	01 - Terwujudnya kualitas dan kuantitas jaksa yang proporsional	01 - Tingkat kecukupan personil jaksa	persen	98,02	98,20	17.954,2	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		02 - Tingkat pengembangan kapasitas personil jaksa	persen	10,65	50		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		03 - Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM jaksa	persen	77,6	80		006 - Kejaksaan Republik Indonesia



- 358 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator / Pengampu
07.04.02.01 PRO-P: Pemenuhan Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi							
07.04.02.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi							
07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	01 - Terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis	01 - Indeks Integritas Nasional		71,53	74,52	39.513,9	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		02 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		3,85	3,97		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		03 - Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang		5,37 (2022)	5,52		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.05.01 KP: Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi secara Lebih Sistematis	01 - Terwujudnya pelebagaan gerakan pemberantasan korupsi lebih sistematis	01 - Nilai dimensi internal (Indeks Integritas Nasional)		72,34	81,30	13.495,2	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.01.01 PRO-P: Penguatan Lembaga Penegak Hukum Pemberantas Korupsi							



- 359 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.05.01.02 PRO-P: Gerakan Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis							
07.05.02 KP: Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi	01 - Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	01 - Nilai dimensi persepsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi)		3,76	3,84	4.450,7	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.02.01 PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi							
07.05.02.02 PRO-P: Gerakan Budaya Antikorupsi							
07.05.03 KP: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	01 - Terwujudnya strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintah dan masyarakat	01 - Nilai dimensi eksternal (Indeks Integritas Nasional)		86,44	89,17	5.846,3	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.03.01 PRO-P: Revitalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi							
07.05.03.02 PRO-P: Sistem Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan Hajat Hidup Orang Banyak dan Perlindungan Sumber Daya Publik							



- 360 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.05.04 KP: Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	01 - Terwujudnya strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU yang terintegrasi, modern, dan berorientasi pada pengejaran aset tindak pidana	01 - Persentase capaian implementasi Stranas TPPU	persen	75	80	15.721,7	078 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
07.05.04.01 PRO-P: Integrasi Pencegahan TPPU							
07.05.04.02 PRO-P: Optimalisasi Pemberantasan TPPU							
07.06 PP: Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	01 - Terciptanya upaya holistik dan terintegratif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dilakukan baik ditingkat pusat, provinsi, dan kab/kota	01 - Indeks P4GN		63,6	63,6	136.719,9	066 - Badan Narkotika Nasional



- 361 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.06.01 KP: Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Narkoba, dan Pengembangan Keterampilan Hidup Sehat, terutama Dimulai dari Keluarga dan Sekolah	01 - Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	01 - Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika		58,56	59,00	39.083,5	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.01.01 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika							
07.06.01.02 PRO-P: Peningkatan Keterampilan Masyarakat dan Budaya Hidup Sehat di Kawasan Rawan Narkotika							
07.06.02 KP: Optimalisasi Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepulihan penyalahguna narkotika	01 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi		3,53	3,57	39.223,4	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.02.01 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika							



- 362 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.06.02.02 PRO-P: Memperkuat Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba							
07.06.03 KP: Meningkatkan Program Deteksi Dini Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa	01 - Terciptanya generasi penerus bangsa yang bebas dari ancaman perilaku negatif yang bisa menghambat potensinya	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja		52,70	60	3.683,4	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.03.01 PRO-P: Peningkatan Pengetahuan Bahaya Narkotika di Kalangan Anak Usia Sekolah							
07.06.03.02 PRO-P: Penguatan Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Satuan Pendidikan							
07.06.04 KP: Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Narkoba	01 - Terlaksananya penanganan tindak pidana narkotika yang sesuai dengan UU yang berlaku	01 - <i>Clearance rate</i> tindak pidana narkotika	persen	89	90	18.057,8	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.04.01 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkoba							



- 363 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Akurasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika							
07.06.06 KP: Meningkatkan Kemampuan Penyelidikan Intelijen P4GN	01 - Meningkatnya kemampuan deteksi dini dan pemetaan terhadap potensi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika	01 - Persentase jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal	persen	- (indikator baru)	7	36.671,8	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.06.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Intelijen dalam Rangka P4GN							
07.06.06.02 PRO-P: Peningkatan Data dan Informasi Intelijen P4GN							
07.06.07 KP: Optimalisasi Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	01 - Jumlah perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	perkara	20	25	0,0	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.07.01 PRO-P: Pengungkapan Kasus TPPU Narkotika dari TPA Narkotika yang Berpotensi TPPU							



- 364 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	01 - Indeks Sistem Merit ASN		0,54 (2023)	0,61	477.344,8	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.01 KP: Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep <i>Total Reward</i> Berbasis Kinerja ASN	01 - Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif	01 - Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin Indeks Sistem Merit	persen	67	67	4.800,0	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Aspek manajemen kinerja Indeks Sistem Merit	persen	61	61	.	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.01.01 PRO-P: Penerapan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN							
07.07.01.02 PRO-P: Penerapan Sistem Manajemen Kinerja ASN							
07.07.02 KP: Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN	01 - Terwujudnya sistem manajemen talenta ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	01 - Aspek perencanaan kebutuhan Indeks Sistem Merit	persen	78,45 (2023)	78,45	5.600,0	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Aspek pengadaan Indeks Sistem Merit	persen	78,91 (2023)	78,91		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.02.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Manajemen Talenta ASN							



- 365 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.07.02.02 PRO-P: Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN							
07.07.02.03 PRO-P: Penerapan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN							
07.07.02.04 PRO-P: Penerapan Standardisasi Jabatan dan Standar Kompetensi ASN							
07.07.03 KP: Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar	01 - Terwujudnya penerapan pengembangan kompetensi ASN yang berkualitas	01 - Aspek pengembangan karier Indeks Sistem Merit	persen	33,57 (2023)	33,57	408.487,9	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.03.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Pengembangan Kompetensi							
07.07.03.02 PRO-P: Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN							
07.07.03.03 PRO-P: Pemberian Beasiswa Pendidikan							



- 366 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.07.04 KP: Digitalisasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang berkualitas	01 - Aspek sistem informasi Indeks Sistem Merit	persen	57,2 (2023)	57,2	47.873,8	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.04.001 PRO-P: Penguatan Platform Digital Manajemen ASN							
07.07.04.02 PRO-P: Pengembangan dan Pemeliharaan <i>Backend Services</i> Platform Digital Manajemen ASN							
07.07.05 KP: Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkatan Integritas ASN	01 - Terbangunnya perilaku ASN yang beretika	01 - Indeks BerAkhlak	persen	61,1 (2023)	61,1	8.583,1	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.05.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Budaya Kerja							
07.07.05.02 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Budaya Kerja ASN							
07.07.06 KP: Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penerapan dan evaluasi manajemen ASN yang berkualitas	01 - Jumlah instansi pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "Baik"	instansi pemerintah	98	98	2.000,0	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 367 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.07.06.01 PRO-P: Penerapan Kebijakan Sistem Merit							
07.07.06.02 PRO-P: Evaluasi Manajemen ASN							
07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	01 - Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	01 - Indeks Pelayanan Publik		4,02	3,68	250.198,5	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional		64,91 (2023)	70		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.08.01 KP: Tata Kelola Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	01 - Indeks Pelayanan Publik K/L		4,39	3,9	47.845,8	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Indeks Pelayanan Publik Provinsi		3,97	3,64		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Indeks Pelayanan Publik Kabupaten		3,67	3,51		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



- 368 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Indeks Pelayanan Publik Kota		4,05	3,96		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	02 - Terwujudnya pengawasan eksternal pelayanan publik	01 - Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi	persen	57,41	38,15		110 - Ombudsman Republik Indonesia
07.08.01.01 PRO-P: Penguatan Kerangka Regulasi Tata Kelola Pelayanan Publik							
07.08.01.02 PRO-P: Penguatan Pelayanan Publik Inklusif dan Terpadu							
07.08.01.03 PRO-P: Penguatan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik							
07.08.01.04 PRO-P: Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik							
07.08.02 KP: Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas	01 - Persentase instansi pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori "B" ke atas)	persen	97,62	97	33.390,6	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 369 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase instansi pemerintah (provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori "B" ke atas)	persen	100	100		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Persentase instansi pemerintah (kab/kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori "B" ke atas)	persen	75,79	76		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		04 - Nilai kinerja pengadaan		58	49,88		106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		05 - Tingkat penerapan tata kelola pengadaan		57	59,96		106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		06 - Persentase kegiatan prioritas utama dengan kinerja baik	persen	66,30	70		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



- 370 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		07 - Tingkat pemanfaatan data statistik	persen	- (indikator baru)	65		054 - Badan Pusat Statistik
		08 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,35	2,35		054 - Badan Pusat Statistik
07.08.02.01 PRO-P: Penguatan Ekosistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah							
07.08.02.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah							
07.08.02.03 PRO-P: Penyediaan Data Pembangunan							
07.08.03 KP: Sinergi Pengendalian dan Pengawasan Program Pembangunan Nasional	01 - Terwujudnya sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional	01 - Persentase K/L dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	47,57	168.962,1	089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		02 - Persentase provinsi dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	39,47		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase kab/kota dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	9,84		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		04 - Tingkat pemanfaatan hasil pengawasan intern dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	predikat	- (indikator baru)	Optimal		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		05 - Tingkat pemanfaatan hasil pengendalian program prioritas presiden dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	persen	- (indikator baru)	30		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
07.08.03.01 PRO-P: Pengendalian Program Prioritas Presiden							
07.08.03.02 PRO-P: Pengendalian Intern dan Pengawasan Pembangunan							



- 372 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	01 - Terwujudnya harmonisasi pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan memperhatikan tipologi kewilayahan serta penguatan fondasi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah	01 - Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat		72,01 (2023)	73	265.680,8	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		83,75 (Persentase capaian penerapan SPM di daerah tahun 2023)	88		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (<i>local tax ratio</i>)	persen PDRB	1,20 (Data Anggaran APBD 2024)	1,25		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.01 KP: Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah	01 - Terwujudnya harmonisasi kewenangan pusat dan daerah yang optimal	01 - Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori sangat baik	provinsi	13 (2023)	17	168.600,0	010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.01.01 PRO-P: Penyiapan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah							
07.09.01.02 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Multi Aktor di Daerah							
07.09.01.03 PRO-P: Optimalisasi Sinergi Pemerintahan Pusat dan Daerah							



- 373 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.09.02 KP: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah	01 - Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintah daerah dengan memperhatikan tipologi kewilayahan	01 - Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori tuntas paripurna	provinsi	2 (2023)	5	73.362,4	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setidaknya berkategori tuntas madya	kabupaten/kota	28 (2023)	152		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori sangat inovatif (prov, kab, kota)	daerah (prov/kab/kota)	75 (2023)	82		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.02.01 PRO-P: Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Urusan Wajib Pemerintah Daerah							
07.09.02.02 PRO-P: Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah							
07.09.02.03 PRO-P: Optimalisasi Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah							



- 374 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.09.03 KP: Penguatan Fondasi Keuangan Daerah	01 - Terwujudnya keuangan daerah dengan pendapatan daerah yang optimal, belanja daerah yang berkualitas, dan pemanfaatan pendanaan alternatif yang meningkat	01 - Jumlah daerah dengan proporsi pajak daerah terhadap PAD meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300 (estimasi 2024)	300	23.718,4	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Jumlah daerah dengan proporsi retribusi daerah terhadap PAD meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300 (estimasi 2024)	300		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	persen	6,81	6,10		015 - Kementerian Keuangan
		04 - Jumlah provinsi yang memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik	provinsi	4	19		010 - Kementerian Dalam Negeri
		05 - Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pendanaan alternatif	daerah (prov/kab/kota)	7	2		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.03.01 PRO-P: Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah							
07.09.03.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Belanja Daerah							
07.09.03.03 PRO-P: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pendanaan Alternatif Daerah							



- 375 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.10 PP: Pemerintah Digital	01 - Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien	01 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,12	3,00 ^{c)}	1.523.786,0	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.01 KP: Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital	01 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transformatif	01 - Jumlah kebijakan pemerintah digital yang ditetapkan	kebijakan	- (indikator baru)	4	3.517,4	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.01.01 PRO-P: Kebijakan Pemerintah Digital							
07.10.01.02 PRO-P: Kedaulatan Sistem Pemerintah Digital							
07.10.01.03 PRO-P: Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital							
07.10.01.04 PRO-P: Pengembangan Proses Bisnis Tematik dalam Arsitektur Pemerintah Digital							



- 376 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.10.02 KP: Penguatan Teknologi Pemerintah Digital	01 - Tersedianya teknologi pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh	01 - Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP	persen	- (indikator baru)	90	35.663,0	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	persen	- (indikator baru)	5		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
07.10.02.01 PRO-P: Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital							
07.10.02.02 PRO-P: Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital							
07.10.02.03 PRO-P: Penguatan Keamanan Siber Pemerintah							
07.10.03 KP: Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN	01 - Terwujudnya ASN yang berkompotensi dan berbudaya digital dalam pelaksanaan pemerintah digital	01 - Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal	persen	- (indikator baru)	50	77.537,9	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.03.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Digital ASN							
07.10.03.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Digital ASN							



- 377 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.10.03.03 PRO-P: Peningkatan Kompetensi ASN Pengelola Layanan Digital							
07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	01 - Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu	01 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik	layanan	- (indikator baru)	10	1.279.941,7	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.04.01 PRO-P: Pengembangan Layanan Publik Prioritas berbasis Digital							
07.10.04.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Layanan Perizinan Berusaha							
07.10.04.03 PRO-P: Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan							
07.10.04.04 PRO-P: Transformasi Pelayanan Pertanahan							
07.10.05 KP: Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah	01 - Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional	01 - Nilai Indeks Satu Data Indonesia		- (indikator baru)	51-70	127.126,0	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase cakupan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia	persen	- (indikator baru)	8		083 - Badan Informasi Geospasial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 378 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	persen	- (indikator baru)	4		083 - Badan Informasi Geospasial
		04 - Persentase IGT yang termanfaatkan	persen	- (indikator baru)	4		083 - Badan Informasi Geospasial
07.10.05.01 PRO-P: Tata Kelola Data							
07.10.05.02 PRO-P: Penguatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan							
07.10.05.03 PRO-P: Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik							
07.10.05.04 PRO-P: Penyediaan Peta Dasar Skala Besar							
07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	01 - Meningkatnya produktivitas BUMN	01 - <i>Profit Margin Ratio</i> (PMR) BUMN	persen	11,15 (2023)	10,50	11.673,5	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.11.01 KP: Peningkatan Daya Saing BUMN	01 - Meningkatnya daya saing BUMN	01 - <i>Total Asset Turnover</i> BUMN	kali (x)	0,282 (2023)	0,305	9.710,9	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 379 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.11.01.01 PRO-P: Kinerja BUMN							
07.11.01.02 PRO-P: Ekonomi Berkelanjutan							
07.11.01.03 PRO-P: Ketahanan Energi dan Pangan							
07.11.01.04 PRO-P: Transformasi Digital							
07.11.01.05 PRO-P: Infrastruktur Konektivitas							
07.11.01.06 PRO-P: Pariwisata dan Budaya							
07.11.01.07 PRO-P: Pembiayaan Sektor Strategis							
07.11.02 KP: Peningkatan Efisiensi Peran BUMN dalam Penugasan Pemerintah	01 - Meningkatnya efisiensi peran BUMN dalam penugasan pemerintah	01 - Peringkat risiko komposit BUMN minimal 3	persen	- (indikator baru)	60,9	1.962,6	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.11.02.01 PRO-P: Efisiensi Peran BUMN pada Program Perintis							



- 380 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.11.02.02 PRO-P: Penguatan Peran BUMN dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan							
07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	01 - Tercapainya peningkatan penerimaan perpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	01 - Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	persen PDB	10,08	10,24	218.848,5	015 - Kementerian Keuangan
	02 - Terwujudnya peningkatan PNBPN yang optimal dan tidak bergantung pada SDA	01 - Rasio PNBPN (persen PDB)	persen PDB	2,62	2,11		015 - Kementerian Keuangan
07.12.01 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	01 - Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak	01 - Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi	persen	90	90	207.680,5	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh WP badan dan orang pribadi berdasarkan target yang ditetapkan	persen	100	100		015 - Kementerian Keuangan



- 381 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara	persen	100	100		015 - Kementerian Keuangan
07.12.01.01 PRO-P: Implementasi Sistem Informasi Inti Perpajakan (<i>core tax</i>) dan Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Stakeholder Terkait, Menuju Data-Driven							
07.12.01.02 PRO-P: Simplifikasi Proses Bisnis dan Kelembagaan serta Penguatan Kebijakan							
07.12.01.03 PRO-P: Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan (termasuk <i>Sin Tax</i>)							
07.12.01.04 PRO-P: Peningkatan Kepatuhan Perpajakan							
07.12.02 KP: Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	01 - Terciptanya dukungan PNBPN yang optimal	01 - Rasio capaian PNBPN terhadap target yang ditetapkan (persen)	persen	90–100	90–100	11.168,0	015 - Kementerian Keuangan
07.12.02.01 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Migas							
07.12.02.02 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi							



- 382 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.12.02.03 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan Non-SDA							
07.12.02.04 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Pengelolaan Aset							
07.12.02.05 PRO-P: Inovasi Layanan Berbasis IT untuk Meningkatkan Kepatuhan							
07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negara	01 - Terwujudnya dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan	01 - Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara		86	86	22.246,5	015 - Kementerian Keuangan
07.13.01 KP: Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat	01 - Meningkatnya alokasi Belanja Negara yang produktif	01 - Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah		84	85	17.754,6	015 - Kementerian Keuangan
07.13.01.01 PRO-P: Percepatan Reformasi Subsidi Tepat Sasaran							



- 383 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.13.01.02 PRO-P: Tata Kelola Belanja Negara untuk Penyiapan Landasan Transformasi							
07.13.01.03 PRO-P: Kebijakan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan							
07.13.01.04 PRO-P: Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Terintegrasi							
07.13.02 KP: Optimalisasi Kualitas Belanja TKD	01 - Meningkatnya kualitas belanja TKD untuk mendukung transformasi ekonomi	01 - Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	persen	100	100	4.491,9	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Alokasi TKD untuk infrastruktur	triliun rupiah	70,4	55,6		015 - Kementerian Keuangan
		03 - Persentase kinerja hibah daerah	persen	75	75		015 - Kementerian Keuangan
07.13.02.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah							
07.13.02.02 PRO-P: Kebijakan dan Mekanisme Sinkronisasi Belanja TKD dan Belanja K/L							



- 384 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	01 - Terwujudnya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi	01 - Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman	persen PDB	2,29	2,53	31.720,6	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin Keberlanjutan Fiskal	persen PDB	39,36	39,15		015 - Kementerian Keuangan
07.14.01 KP: Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Utang yang Menjaga Keseimbangan Fiskal	01 - Terciptanya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan yang berkelanjutan	01 - Imbal hasil (<i>yield</i>) SBN	persen	7,0	6,8–7,2	21.407,9	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara	persen	100	100		015 - Kementerian Keuangan
07.14.01.01 PRO-P: Optimalisasi Portofolio Pembiayaan							
07.14.01.02 PRO-P: Peraturan Mengenai Pengelolaan Pembiayaan Luar Negeri dan Dalam Negeri							



- 385 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.14.02 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber- Sumber Pembiayaan Non Utang yang Inovatif	01 - Meningkatnya pemanfaatan skema pendanaan inovatif	01 - Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan	peraturan	1	1	10.312,7	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan	sistem informasi	1	1		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
07.14.02.01 PRO-P: Penyempurnaan Peraturan Mengenai Skema KPBU							
07.14.02.02 PRO-P: Sistem Informasi Terintegrasi Pendanaan KPBU dan Pendanaan Inovasi Lainnya							
07.15 PP: Pengendalian Inflasi	01 - Terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi	01 - Tingkat Inflasi	persen	1,57	2,5±1,0	8.059.042,2	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
07.15.01 KP: Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	01 - Terjaganya komponen inflasi harga bergejolak	01 - Inflasi harga bergejolak	persen	0,12	3,00–5,00	8.059.042,2	125 - Badan Pangan Nasional
07.15.01.01 PRO-P: Stabilisasi dan Pengawasan Harga Pangan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 386 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.15.01.02 PRO-P: Pengembangan Jaringan Irigasi							
07.15.01.03 PRO-P: Peningkatan Ketersediaan Pangan Dalam Negeri							
07.15.01.04 PRO-P: Sarana dan Prasarana Penyimpanan Produk							
07.15.01.05 PRO-P: Peningkatan Teknologi Pertanian							
07.15.01.06 PRO-P: Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian							
07.15.01.07 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan							
07.15.01.08 PRO-P: Sarana Logistik dan Distribusi Pangan							
07.15.01.09 PRO-P: Infrastruktur dan Layanan Transportasi							
07.15.01.10 PRO-P: Ketersediaan Data Inflasi dan Harga Pangan							



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 387 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.15.01.11 PRO-P: Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi							
07.15.01.12 PRO-P: Sinergi Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi							
07.16 PP: Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	01 - Terwujudnya pelindungan WNI, termasuk pekerja migran Indonesia	01 - Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri	persen	85	87	321.604,5	011 - Kementerian Luar Negeri
07.16.01 KP: Penguatan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	01 - Meningkatnya proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum	01 - Proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum	persen	55,56 (2023)	60	99.942,6	104 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
07.16.01.01 PRO-P: Persiapan Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia							
07.16.01.02 PRO-P: Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia							



- 388 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.16.02 KP: Pelindungan dan Pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif	01 - Terintegrasinya dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) , termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri		96	96	221.661,9	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		97,5	98		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri		98,5	98,7		011 - Kementerian Luar Negeri
07.16.02.01 PRO-P: Tata Kelola dan Diplomasi Pelayanan dan Pelindungan							
07.16.02.02 PRO-P: Penanganan Kasus WNI di Luar Negeri							

Keterangan: a) Angka *baseline* dan target merupakan proyeksi nilai Reformasi Birokrasi nasional tahun 2024 dan akan dimutakhirkan, b) Penghitungan indikator hanya dilakukan pada tahun tahapan pemilu, c) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.



PRIORITAS NASIONAL 8: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA,
SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08 PN: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	01 - Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		62,85 (2021)	65,49	90.058.877,2	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	02 - Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	01 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	persen	0,140 (2022)	0,137		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	01 - Terwujudnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah dalam kehidupan beragama, serta layanan keagamaan yang transformatif	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		76,47	76,77	3.891.423,8	025 - Kementerian Agama
		02 - Indeks Layanan Keagamaan		86,51 (2024)	87,11		025 - Kementerian Agama



- 390 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.01 KP: Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan	01 - Meningkatnya moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan	01 - Nilai Layanan Penyuluhan Agama		84,52 (2024)	84,63	287.848,1	025 - Kementerian Agama
		02 - Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis)		61,78 (2021)	64,39		025 - Kementerian Agama
		03 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	persen	27	35		025 - Kementerian Agama
		04 - Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga	persen	0,5 (2022)	0,7		025 - Kementerian Agama
08.01.01.01 PRO-P: Peningkatan Literasi Keagamaan							
08.01.01.02 PRO-P: Peningkatan Bimbingan Keagamaan Keluarga							
08.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Layanan Bimbingan Perkawinan (Calon Pengantin)							



- 391 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.02 KP: Jaminan Hak Beragama serta Kehidupan Beragama yang Harmonis dan Rukun	01 - Meningkatkan jaminan kebebasan beragama dan kehidupan beragama yang harmonis serta rukun	01 - Persentase rekomendasi <i>Early Warning System</i> (keagamaan) yang di tindaklanjuti	persen	10	25	223.421,0	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	persen	24	30		025 - Kementerian Agama
08.01.02.01 PRO-P: Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik							
08.01.02.02 PRO-P: Pembinaan Kerukunan Umat Beragama							
08.01.02.03 PRO-P: Penyelenggaraan <i>Event</i> Keagamaan							
08.01.03 KP: Peningkatan Peran Tokoh Agama, Lembaga Agama, dan Lembaga Sosial Keagamaan	01 - Menguatnya peran dan kerjasama tokoh agama dan lembaga agama/sosial keagamaan dalam mewujudkan layanan keagamaan yang inklusif	01 - Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	persen	40 (2024)	43	143.489,5	025 - Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 392 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.03.01 PRO-P: Peningkatan Peran Lembaga Agama dan Keagamaan dalam Pembangunan							
08.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Partisipasi Tokoh Agama dalam Pembangunan							
08.01.04 KP: Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	01 - Tersedianya sarpras peribadatan yang memenuhi standar	01 - Persentase sarana prasarana peribadatan yang memenuhi standar	persen	66,69	67,35	348.978,5	025 - Kementerian Agama
08.01.04.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Ibadah & Sarpras Peribadatan lainnya							
08.01.04.02 PRO-P: Penyediaan Kitab Suci yang Sahih dan Merata							
08.01.05 KP: Transformasi Layanan Keagamaan yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA)	01 - Meningkatnya kualitas layanan KUA secara merata, inklusif, dan transformatif	01 - Indeks Kepuasan Layanan KUA		85,53 (2024)	85,64	1.050.055,6	025 - Kementerian Agama
08.01.05.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana KUA							
08.01.05.02 PRO-P: Pengembangan Inovasi Layanan KUA (Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan)							



- 393 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.06 KP: Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	01 - Meningkatnya kualitas layanan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman	01 - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): (a) Layanan haji dalam negeri; (b) Layanan haji luar negeri		90,45 (2022); 88,20 (2024)	91,00; 88,25	1.296.907,7	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase nilai pertumbuhan perolehan nilai manfaat dana haji	persen	10,4	12,2		Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
		03 - Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): (a) Lembaga penyelenggara haji khusus; (b) Lembaga penyelenggara umrah	persen	82; 96 (2024)	82,05; 96,01		025 - Kementerian Agama
08.01.06.01 PRO-P: Revitalisasi Sarpras Layanan Ibadah Haji dan Umrah							
08.01.06.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Ibadah Haji							
08.01.06.03 PRO-P: Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Haji Khusus dan Umrah							



- 394 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.07 KP: Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional	01 - Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal		88,56 (2024)	90,98	399.088,9	142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
		02 - Tingkat literasi produk dan jasa halal	persen	34,08	42,09		142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
08.01.07.01 PRO-P: Penguatan Literasi Produk Halal							
08.01.07.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Penjaminan Produk Halal							
08.01.07.03 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Penjaminan Produk Halal							
08.01.08 KP: Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	01 - Meningkatnya pengembangan dana sosial keagamaan produktif untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat	01 - Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan	persen	1 (2024)	2	141.634,5	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	persen	78 (2024)	81		025 - Kementerian Agama
08.01.08.01 PRO-P: Revitalisasi Dana Sosial Keagamaan untuk Pengentasan Kemiskinan							



- 395 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.08.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lembaga Filantropi Keagamaan							
08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	01 - Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan berkebudayaan maju	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		57,13 (2023)	58,39	2.165.116,3	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.01 KP: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	01 - Terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang kokoh berlandaskan nilai-nilai Pancasila	01 - Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	persen	36,00 (2023)	36,71	417.381,0	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.01.01 PRO-P: Penguatan Etika Sosial Budaya untuk Membentuk Masyarakat yang Harmonis, Rukun, dan Berkeadaban							
08.02.01.02 PRO-P: Penguatan Etika Politik dan Pemerintahan untuk Melembagakan Sistem Demokrasi yang Substantif dan Partisipatif, serta Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terintegrasi, dan Berorientasi Pelayanan							
08.02.01.03 PRO-P: Penguatan Etika Ekonomi dan Bisnis sebagai Landasan Transformasi Ekonomi untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing Bangsa							
08.02.01.04 PRO-P: Penguatan Etika Hukum yang Berkeadilan untuk Menjamin Kepastian Hukum yang Mengedepankan Nilai-Nilai Kemanusiaan							



- 396 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.02.01.05 PRO-P: Penguatan Etika Keilmuan untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Kreatif, dan Inovatif							
08.02.01.06 PRO-P: Penguatan etika lingkungan sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan							
08.02.02 KP: Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya	01 - Terwujudnya pengelolaan terpadu warisan budaya yang efektif dan berkelanjutan	01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	persen	58 (2024)	60	534.451,1	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.02.01 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan							
08.02.02.02 PRO-P: Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal							
08.02.02.03 PRO-P: Revitalisasi Manuskrip							
08.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Budaya Bahari							
08.02.02.05 PRO-P: Revitalisasi Jalur Rempah							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 397 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.02.03 KP: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	01 - Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan	01 - Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya	persen	0,43 (2023)	0,49	606.407,2	140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah kawasan pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (kumulatif)	Kawasan	1	1		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.03.01 PRO-P: Pengelolaan Terpadu Festival Seni Budaya Daerah Berkelas Internasional							
08.02.03.02 PRO-P: Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya di Kawasan Pemajuan Kebudayaan							
08.02.04 KP: Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	01 - Terpenuhinya hak berkebudayaan dan kebebasan berekspresi, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat	01 - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	persen	1,58 (2024)	1,67	119.792,8	140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan	wilayah adat	3	3		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.04.01 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat							



- 398 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.02.04.02 PRO-P: Pelindungan Hutan Adat dan Tanah Ulayat							
08.02.04.03 PRO-P: Penguatan dan Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
08.02.05 KP: Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia	01 - Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia	01 - Indeks Pembangunan Kebahasaan		45,82 (2022)	51,31	256.647,0	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
08.02.05.01 PRO-P: Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia							
08.02.05.02 PRO-P: Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional							
08.02.05.03 PRO-P: Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah							
08.02.06 KP: Transformasi Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan	01 - Terwujudnya kearsipan yang transformatif untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan	01 - Indeks Budaya Tertib Arsip 02 - Indeks Memori Kolektif Bangsa		70,24 69,10	72,40 71,65	40.304,0	087 - Arsip Nasional Republik Indonesia 087 - Arsip Nasional Republik Indonesia



- 399 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.02.06.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Tertib Arsip							
08.02.06.02 PRO-P: Perluasan Layanan Kearsipan untuk Publik							
08.02.06.03 PRO-P: Pengembangan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara							
08.02.07 KP: Pengembangan Diplomasi Kebudayaan	01 - Meningkatnya rekognisi global atas kebudayaan Indonesia	01 - Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia	unit	2	3	190.133,1	140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kumulatif)	rumah budaya	10 (2017)	11		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.07.01 PRO-P: Pengelolaan Warisan Budaya Dunia Indonesia							
08.02.07.02 PRO-P: Promosi dan Pertukaran Budaya							
08.02.07.03 PRO-P: Penguatan Kerja Sama Kebudayaan							



- 400 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)	01 - Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)	persen	0,995 (2023)	0,135	81.302.087,1	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
08.03.01 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	01 - Peningkatan Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	01 - Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil		- (indikator baru)	55	751.395,8	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
08.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh							
08.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Ketahanan Perikanan terhadap Perubahan Iklim							
08.03.01.03 PRO-P: Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai							
08.03.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar							
08.03.02 KP: Pengelolaan Sumber Daya Air Adaptif Iklim	01 - Meningkatnya Keakurasian Modifikasi Cuaca	01 - Persentase akurasi keberhasilan modifikasi cuaca	persen	- (indikator baru)	82	12.682.756,0	075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika



- 401 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.03.02.01 PRO-P: Pembangunan Tampung Air							
08.03.02.02 PRO-P: Revitalisasi Tampung Air							
08.03.02.03 PRO-P: Pembangunan Pengendalian Banjir							
08.03.02.04 PRO-P: Pengendalian Lahar/Sedimen							
08.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air							
08.03.03 KP: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim	01 - Menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada sektor pertanian	01 - Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	persen	0,248 (2023)	0,091	15.320.542,9	018 - Kementerian Pertanian
08.03.03.01 PRO-P: Pembangunan Embung atau Tampung Air Skala Kecil Lainnya							
08.03.03.02 PRO-P: Irigasi Pertanian							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 402 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.03.03.03 PRO-P: Optimasi Lahan Pertanian							
08.03.03.04 PRO-P: Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim							
08.03.03.05 PRO-P: Penyediaan Pupuk dan Saprodi Pertanian							
08.03.03.06 PRO-P: Pengembangan, Pengelolaan, dan Modernisasi Jaringan Irigasi							
08.03.03.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Petani terkait Informasi Iklim							
08.03.04 KP: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim	01 - Menurunnya persentase Kejadian Penyakit Sensitif Iklim	01 - Persentase penurunan kejadian penyakit sensitif iklim	persen	- (indikator baru)	10	3.520.271,5	024 - Kementerian Kesehatan
08.03.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit DBD							
08.03.04.02 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit Malaria							
08.03.04.03 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit Pneumonia							



- 403 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.03.04.04 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare							
08.03.04.05 PRO-P: Pengendalian Vektor dan Penyebaran Penyakit Sensitif Iklim							
08.03.04.06 PRO-P: Peningkatan Kesehatan Lingkungan							
08.03.05 KP: Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas untuk Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Meningkatnya Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Pembangunan Berketahanan iklim	01 - Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas	persen	- (indikator baru)	10	49.027.120,8	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
08.03.05.01 PRO-P: Penyediaan Informasi Pendukung Peningkatan Ketahanan Iklim							
08.03.05.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM untuk Ketahanan Iklim							
08.03.05.03 PRO-P: Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Iklim							
08.03.05.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pemerintah							



- 404 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	01 - Menurunnya tingkat risiko bencana nasional	01 - Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana nasional	persen	1,54 (2023)	1,2	2.700.250,1	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.01 KP: Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi	01 - Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana	01 - Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang	persen	62 (2023)	67	544.153,6	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Penanggulangan Bencana							
08.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Mitigasi Bencana melalui Riset dan Inovasi							
08.04.01.03 PRO-P: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana							
08.04.01.04 PRO-P: Penyediaan Logistik dan Peralatan sesuai Standar Penanggulangan Bencana							



- 405 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.04.02 KP: Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	01 - Meningkatnya penyelenggaraan layanan peringatan dini dan keandalan respons saat terjadi bencana	01 - Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana	persen	6,00	6,10	1.779.391,4	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		02 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik	menit	3	< 3		075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
		03 - Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar	persen	75	100		103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.02.01 PRO-P: Pendampingan Penanganan Kedaruratan Bencana							
08.04.02.02 PRO-P: Pelayanan Peringatan Dini Multiancamam Bencana							
08.04.03 KP: Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	01 - Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	01 - Persentase daerah pasca bencana masif yang ditangani	persen	100	100	47.233,4	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana



- 406 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.04.03.01 PRO-P: Pemulihan Kehidupan Masyarakat Pascabencana							
08.04.03.02 PRO-P: Pemulihan Ekonomi Terintegrasi Pascabencana							
08.04.04 KP: Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	01 - Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap bencana	01 - Persentase desa berketahanan bencana multipihak	persen	10,31	10,49	52.458,2	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Adaptif Masyarakat dalam Menghadapi Bencana							
08.04.04.02 PRO-P: Pemberdayaan Komunitas Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana							
08.04.05 KP: Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana	01 - Meningkatnya infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana	01 - Rasio kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana	persen	- (indikator baru)	19	277.013,5	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
08.04.05.01 PRO-P: Peningkatan Keandalan Bangunan Berketahanan Bencana							
08.04.05.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air							



- 407 -

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.04.05.03 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Mitigasi Bencana Geologi							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,
Dia Silvanna Djaman
SK No 154152 C